



**DINAMIKA PARTAI HIJAU (*BUNDESGRÜNE* 90/*DIJER GRÜNEN*) DALAM
KEHIDUPAN POLITIK DI JERMAN
(SEBUAH KAJIAN POLITIK HIJAU DI JERMAN)**

S K R I P S I

Ditajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Apriwan
NIM 990910101017

Pembimbing

Drs. DJOKO SUSILO, MSI
NIP. 131 832 318

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2003**

Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl. 30 AUG 2003
No. Induk :

Klass

324-2838

APR

mit

d

LEMBAR PERNYATAAN

**Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya
dan semua bahan yang digunakan berasal dari sumber yang
sah dan diketahui**

Penulis



APRIWAN

990910101017

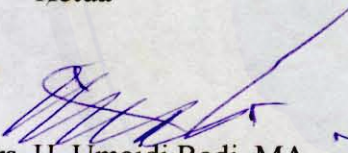
PENGESAHAN

Diterima oleh panitia penguji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat
untuk mencapai gelar sarjana
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Dipertahankan di depan Penguji pada
Hari, Tanggal : Senin, 28 Juli 2003
Jam : 08.00 BBWI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

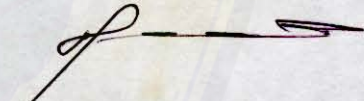
Panitia Penguji

Ketua


Drs. H. Umaid Radi, MA

NIP. 130 239 058

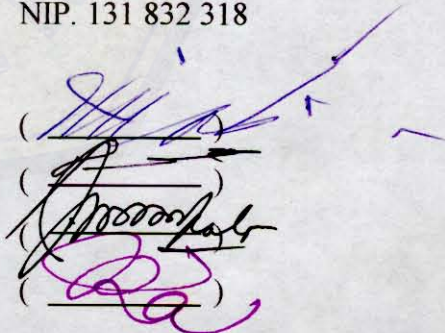
Sekretaris


Drs. Djoko Susilo, MSi

NIP. 131 832 318

Anggota Tim Penguji

1. Drs. H. Umaid Radi, MA
2. Drs. Djoko Susilo, MSi
3. Drs. Sunardi P. MIS
4. Drs. Pra Adi S



Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Jember



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832

Lembar Persembahkan

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

Yang Tercinta : Ayahanda Agus Latief dan Bunda Mariana
Serta Kakak-kukakku Tersayang, atas segala do'a, perhatian dan
dorongan yang diberikan kepada Penulis

Semua teman dan sahabat yang telah memberikan dorongan dan perhatian

Almamater dan seluruh pecinta ilmu pengetahuan dan perdamaian

Motto

Alam Takambang Jadi Guru*

Jalan menemukan Tuhan “adalah melihat Dia
dalam ciptaan-Nya dan bersatu dengan ciptaan itu”

(Ahimsa--Mahatma Gandhi)**

* Filosofi Hidup Masyarakat Minangkabau

** Dr. Hans J. Daeng, Manusia, Kebudayaan & Lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000,
hal. 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Politik Hijau yang dimanifestasikan dalam bentuk partai politik memiliki pengaruh dan peran tersendiri dalam kehidupan politik di Jerman. Partai Hijau yang muncul dari akar-akar gerakan kiri baru, feminisme dan lingkungan hidup serta gerakan-gerakan lainnya pada dasawarsa 70-an, telah menjadi *icon* baru dalam panggung politik kontemporer umumnya dan Jerman khususnya. Dengan isu ekologi sebagai platform utama, partai ini tampil dengan karakteristik yang berbeda dengan partai-partai mapan (*established parties*).

Meskipun merupakan kelompok baru, partai ini cukup mampu mendapat perhatian publik Jerman, salah satu indikasinya adalah bahwa partai ini terakhir terlibat dalam membentuk pemerintahan koalisi dengan SPD di RFJ. sementara, di negara-negara Eropa lainnya juga terdapat akar gerakan ekologi dan partai Hijau, namun prestasi dan perkembangannya tidak sehebat yang terjadi pada partai Hijau yang ada di Republik Federal Jerman.

Fenomena inilah yang menarik bagi penulis untuk menjadikannya sebagai skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Djoko Soesilo, MSi, selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan masukan seta arahan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Phd selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di FISIP Universitas Jember
3. Bapak Drs. Moch. Toerky, selaku Dekan beserta staf pengajarnya yang telah memberikan bantuannya selama penulis kuliah di FISIP.
4. Bapak Drs. Nurudin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan seluruh tenaga edukasi di Jurusan HI.

5. Litbang Deplu RI-Jakarta, CSIS Jakarta, *Germany Embassy*-Jakarta, *The American Institute for Contemporary German Studies*(AICGS)-The Johns Hopkins University-Washington, D.C., dan Partai Hijau Jerman yang membantu melengkapi data-data bagi skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperantauan di Permato, Alam takambang jadi guru, kawan! Adri, Ferdi, Ramzi dan lain-lain
7. Sahabat-sahabat di Komunitas Karpet Merah (Majalah Mahasiswa. Tegalboto), Firman, Ronald, Miky, Cymenk, dek Nova, Wendra, Romdie, Rudi Holland, dek Sica, dan lain-lain, *Keep Fighting friends!*. Cak Pram, Pak Idoer, Kang Djoko, Bang Wino, Gussan Trackboy terimakasih atas diskusi panjangnya..
8. Kawan-kawan Pers Mahasiswa Jember, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Komunitas Jurnalistik Indonesia
9. Keluarga Besar pak Nasrul Amien, yang telah membantu dan menjadi keluarga penulis selama di Jember.
10. Ninien manies dan Keluarga terimakaish untuk semuanya!
11. Kawan-kawan di Wisma Pandawa, Mamang, Tilunk, Mifta Hoeda terimakasih atas kebersamaannya.
12. *Smart Generations*, Korps mahasiswa HI'99: Titik, Saba, Ika, Arief (yang hijrah ke UGM), Vivien, Futie, Ririn, Koko dan lain-lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. *We're The best generations!*
13. Teman-teman KKN Desa Patempuran: Lita, Luluk gondrong, Bude Evie, Pak Kordes Pesta, Evie02, Carolina, dan Dwi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Jember, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR FIGUR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	8
1.3 Permasalahan.....	9
1.4 Kerangka Konsep dan Pemikiran.....	10
1.5 Hipotesis.....	25
1.6 Metode Penelitian.....	26
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	26
1.6.2 Metode Analisa Data.....	26
1.7 Pendekatan	27
BAB II GERAKAN POLITIK HIJAU SEBAGAI POLITIK	
BARU	29
2.1 Gambaran Umum politik Hijau	29
2.1.1 Issu Global Ekologi	29
2.2 Gerakan Aksi Pecinta Lingkungan Hidup.....	35
2.3 Krisis Sosialisme dan Kapitalisme	39
2.4 Dari <i>New Left</i> , Anarkisme dan Feminisme ke Politik Hijau	44
2.4.1 Gerakan Kiri Baru.....	44

2.4.2 Anarkisme.....	49
2.4.3. Feminisme	52
2.5 Politik Hijau sebagai Politik Baru	57

BAB III SEJARAH POLITIK POLITIK HIJAU DI JERMAN

(PARTAI HIJAU)	62
3.1 Gambaran Umum Jerman sebelum Perang Dunia Kedua.....	62
3.2 Republik Federal Jerman paska Perang Dunia Kedua.....	65
3.3 Kehidupan Politik Jerman (1949-1990)	66
3.4 Kajian Historis Politik Hijau di Jerman	69
3.4.1. Masyarakat Pasca Industrialis dan Pasca Materialis.....	71
3.4.2. Gerakan Aksi Mahasiswa dan Kelas Menengah Radikal	76
3.4.3. Dari Gerakan aksi ke Partai	80
3.4.4. Partai Hijau di Jerman Barat (<i>The Grunen -The Green</i>).....	82
3.6 Reunifikasi Duo Jerman	87
3.6.1 Neo Jerman dan Sistem Politik.....	88
3.6.2 Kolaborasi Bundnis90/The Grunen (<i>Alliance90/The Green</i>).....	91
3.6.3 Prinsip dan Program Partai Hijau Jerman.....	97
3.6.4 Partai Hijau Sebagai Kekuatan Baru.....	104

BAB IV. PARTAI HIJAU (*ALLIANCE90/THE GREENS*) DALAM POLITIK PEMERINTAHAN JERMAN

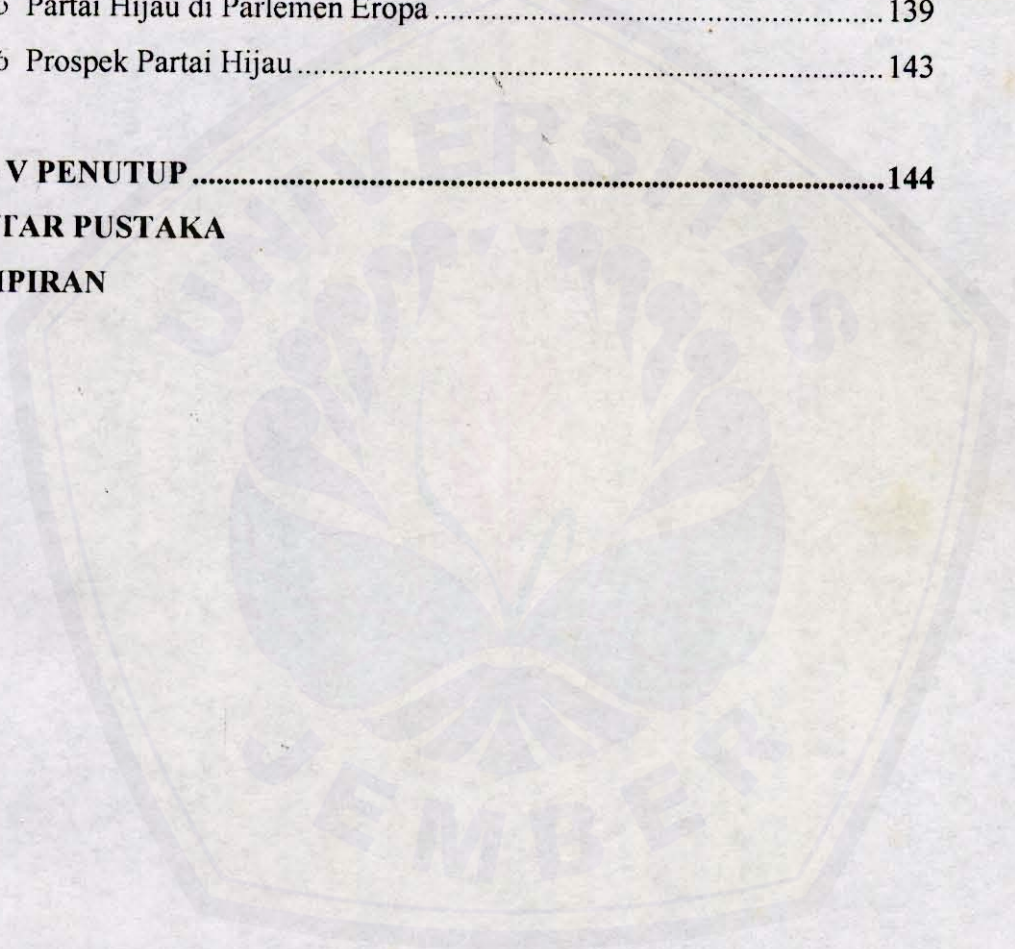
4.1 Partai Hijau Jerman Dalam Pemilu Federal (<i>Bundestagwahl</i>)	106
4.1.1 Pemilu Federal 1994.....	107
4.1.2 Pemilu Federal 1998.....	111
4.1.3 Pemilu Federal 2002.....	116
4.2 Partai Hijau dalam Pemerintahan dan Parlemen (<i>Landtage</i>) Negara Bagian.....	
4.4 Koalisi Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau (<i>Red-Green Coalition</i>) dalam Pemerintahan Federal	123

4.5 Politik Hijau dan Kebijakan Politik Pemerintahan RFJ	129
4.5.1 PolitikHijau dan kebijakan Dalam Negeri Jerman.....	129
4.5.2 Politik Hijau dan Kebijakan Luar Negeri Jemrna.....	131
4.4 Partai Hijau di Pemerintahan dan Parlemen Negara	
Bagian (<i>Landtage</i>)	136
4.5 Partai Hijau di Parlemen Eropa	139
4.6 Prospek Partai Hijau	143

BAB V PENUTUP.....	144
---------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Sikap Generasi Muda Terhadap Isu-isu Politik Lama dan Politik Baru	74
Suara untuk Partai Hijau: Pemilu Nasional 1980-1990.....	83
Perempuan dalam Partai Politik 1980-1992.....	93
Hasil Pemilu Federal 1994	109
Distribusi Kursi 1994	109
Hasil Pemilu Federal 2002	119
Susunan Kabinet Koalisi Merah-Hijau 1998-2002	127
Partai Hijau di Parlemen Negara Bagian RFJ (<i>Landtage</i>) 1987-1998	138
Perolehan Jumlah Suara Partai-Partai Hijau di Parlemen Eropa.....	140

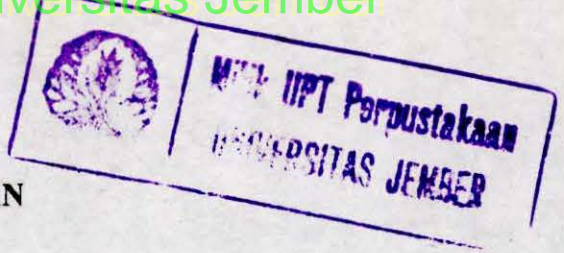
DAFTAR FIGUR

Environmentalisme, Ideologi dan Pendekatan Politik	13
Sejarah Kiri baru	45
Segitiga Spektrum Politik.....	60
Distribusi Kursi Pemilu 1994	110
Perbandingan Distribusi Suara 1994:1998	114
Distribusi Kursi Pemilu 1998	115
Hasil Pemilu 2002 : tingkat Federal	121
Distribusi Kursi di Parlemen	121
Perbandingan Hasil Pemilu 1998:2002/ Barat:Timur	122
Spektrum Ideologi Partai.....	124
Hasil Pemilu Eropa 1990.....	142

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : National election results
(Member Parties of the European Federation of Green Parties)
- Lampiran 2 : Isu dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 1994
- Lampiran 3 : Isu dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 1998
- Lampiran 4 : Isu dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 2002
- Lampiran 5 : Hasil Pemilu di Tingkat Parlemen Eropa 1999
- Lampiran 6 : Federal Governments Since 1949 (Chancellor, tenure, coalition)

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup (ekologi)¹ selama dekade 60-an dan 70-an telah mulai merebak menjadi isu global dalam masyarakat dunia. Suara-suara protes yang awalnya cuma dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan, aktivis gerakan dan kelas menengah telah mampu membawa isu ini menjadi perhatian mayoritas publik di dunia.

Ini bisa dilihat dengan terealisasinya konferensi Lingkungan Hidup PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 di Stockholm, yang membahas Hukum Internasional Lingkungan, dan memulai kerjasama Internasional dalam permasalahan Lingkungan Hidup. Bahkan dari konferensi ini dimulai debat internasional akan permasalahan lingkungan hidup.

Disamping itu, aktivis gerakan lingkungan hidup terus tumbuh dan berkembang khususnya di kawasan Eropa dan Amerika. Mereka mengecam modernitas dengan produk industrialisasinya sebagai salah satu biang terjadinya permasalahan lingkungan yang semakin akut. Sebagai contoh kelemahan utama dari cara hidup masyarakat industri dengan 'etos' ekspansi adalah cara hidup itu tidak dapat langgeng. Masa keberlangsungannya hanya sebatas usia seseorang yang lahir pada hari ini. Maka sangat diperlukan tindakan radikal karena

¹ Gejala-gejala lingkungan hidup (ekologi) yang sekarang terjadi seperti:

*Lapisan ozon yang melindungi bumi pada garis lintang utara bumi yang padat penduduknya menipis dua kali lipat lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh para ilmuwan beberapa tahun sebelumnya.

*Sekurang-kurangnya 140 jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan punah setiap harinya

*Tingkat karbon dioksida di atmosfer yang merupakan perangkap panas, sekurang-kurangnya 26% lebih tinggi daripada konsentrasi dari zaman pra industri dan kinipun masih tetap meningkat.

* Permukaan bumi lebih panas dalam tahun 1990 daripada tahun sebelumnya sejak pencatatan mulai dilakukan pada pertengahan abad kesembilan belas, dan enam dari tujuh tahun-tahun yang tercatat paling panas terjadi sejak tahun 1980.

* Hutan-hutan lenyap dengan kecepatan sekitar 17 hektare pertahun, suatu kawasan yang luasnya kira-kira setengah dari luasnya seluruh negara Finlandia.

Penduduk bumi bertambah dengan 92 juta jiwa pertahunnya, kira-kira sama banyaknya dengan penduduk negara Meksiko; dari jumlah itu 88 juta orang merupakan penambahan penduduk di negara berkembang.

Lihat, Brown, Lester R, Ed., *Jangan Biarkan Bumi Merana*, Laporan Watch Institute, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm 2, Lihat juga *Greens Century*, Time, September 2, 2002

pertumbuhan jumlah penduduk dunia saat ini; dan pendapatan perkapita yang semakin meningkat pada satu pihak, dan di lain pihak semakin rusaknya sistem lingkungan serta berkurangnya sumber daya, semuanya itu sangat merusak sendi-sendi dasar bumi untuk mampu bertahan hidup. Dengan sendirinya, bumi kita ini tidak mampu lagi untuk menampung semua tuntutan ekologi yang semakin meningkat. Pertumbuhan apapun yang *tanpa batas* tidak akan dapat dilestarikan dengan sumber daya yang *terbatas*. Inilah simpul yang sangat kuat dari posisi yang kurang menguntungkan bagi lingkungan hidup.²

Gerakan lingkungan hidup yang muncul dan berkembang pada dekade 70-an dan 80-an mendapat dukungan publik yang belum pernah sedemikian kuatnya selama abad ini. Alasan pertama adalah bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan di sekitar masalah lingkungan adalah kelompok yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat umum, dan sama sekali tidak menonjolkan pamrih individu ataupun kelompok tertentu. Mereka tidak terikat sama kelompok kekuasaan sehingga benar-benar independen.

Dukungan publik yang begitu luas yang mampu menghidupi mereka, memberi pengaruh politis. Alasan yang lain adalah, bahwa jumlah kelompok atau organisasi lingkungan baik kecil maupun besar, nasional maupun sampai keluar batas negara yang berupaya mengadakan perubahan sosial dalam tahun 1970-an, adalah kelompok yang belum dikenal sebelumnya tetapi beertumbuh pesat dalam jumlah organisasinya, mulai dari beberapa ratus saja pada awal tahun 1970-an menjadi sekitar 3.000 pada akhirnya, dan mulai hanya dengan beberapa gelintir penggerak pada awalnya sampai berjumlah jutaan orang di seluruh negeri, dengan berbagai corak kegiatan.³

Di antara sekian banyak kelompok-kelompok gerakan lingkungan hidup⁴ dengan berbagai variasi kegiatan. Seiring dengan itu juga muncul gerakan-gerakan radikal sayap kiri turunan marxist seperti *new left* (kiri-baru), maupun

² Kirk Patrick Sale, *Revolusi Hijau : Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 36

³ Ibid, 39

⁴ Gerakan Lingkungan seperti 1) *Greenpeace*, dibentuk 1971 sebagai kritik terhadap uji coba nuklir, kemudian melebar dengan kampanye "Selamatkan Ikan Paus", samapai dasawarsa terakhir tetap intens melakukan kampanye samapai masalah hutan tropis dan masalah limbah industri beracun. 2) Worldwatch Institute, sebuah pusat penelitian dan studi, di prakasai oleh Lester Brown pada tahun 1975 untuk mengumpulkan informasi dari seluruh dunia

gerakan *feminsme*, bahkan sampai *anarchisme*, yang mengkritik modernitas dengan proyek industrialisasi telah menimbulkan permasalahan baru dalam kalangan umat manusia. Seperti kritik Max Horkheimer dan Theodor Adorno dalam *Dialektik der Aufklärung* (dialektika Pencerahan), dengan tegas mereka melontarkan bahwa berbagai industri kebudayaan *ala* pencerahan tidak lebih sebagai penipuan masa, ketika film-film dan radio tidak lagi berpretensi seni, berbagai teknologi, mesin penjawab bukan lagi diasumsikan sebagai pencapaian rasionalitas modernitas akan tetapi tidak lebih dari bagian dari pengekangan mitos-mitos baru. Pengukuhan kapitalisme sebagai idea utama dalam masyarakat modern kritik mazhab Frankfurt ini. Imbasnya muncul lingkaran manipulatif kebudayaan yang tidak lain dijadikan komoditas industrialisasi yang punya nilai jual beli, bukan pada porsi sesungguhnya, untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.⁵

Dari berbagai kelompok radikal tersebut, lalu mereka mulai mengkritik kapitalisme melalui pisau analisa lingkungan hidup. Secara sederhana, dalam pandangan mereka, perilaku serakah manusia membuat bukan saja manusia menjadi korban tetapi juga lingkungan tempat manusia itu hidup. Jika lingkungan menjadi korban, bukan manusia yang hidup sekarang saja yang bakal menjadi korban, akan tetapi manusia yang hidup di masa mendatang.

Berawal dari kesadaran tersebutlah, gerakan-gerakan lingkungan yang berasal dari tradisi kiri mulai marak bermunculan awal 1970-an, inspirasinya berawal dari kalangan akademis dan ilmuwan yang sadar akan bahaya krisis lingkungan. Sebelumnya gerakan ini hanya menyandarkan diri pada kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, menurut Marx, kepemilikan adalah sumber dari segala bencana manusia, selama manusia masih serakah mengumpulkan harta untuk dimilikinya praktek penghisapan si kaya terhadap si miskin akan terus berlangsung.

Sehingga klop, disaat komunisme memperoleh kecaman masyarakat dunia, sebagai akibat dari praktek ideologi tersebut di Uni Soviet yang melahirkan rejim otoriter dan sama sekali tidak membebaskan rakyat. Sehingga komunisme

⁵ Theodore Adorno dan Max Horkheimer, *Dialektika Pencerahan*, Penerjemah, Ahmad Sahidah, IRCISOD, Yogyakarta, 2002, hlm. 24

ditinggalkan , banyak mahasiswa gerakan-gerakan radikal kiri tersebut mencari alternatif seperti menggunakan isu lingkungan sebagai platform gerakan mereka untuk mengkritik proyek-proyek kapitalis..

Dan dari gerakan ini pula , isu lingkungan pun menjadi komoditas dalam ranah politik baik dalam tingkatan lokal, nasional bahkan internasional. Politik lingkungan yang lebih sering disebut Politik Hijau (Green Politik) mulai melakukan perubahan-perubahan. Awalnya yang hanya berupa bentuk gerakan aksi, mencoba melembagakan kan diri ke dalam bentuk institusi partai politik. Asumsinya. Gerakan aksi saja tidaklah cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan . sehingga dibutuhkan institusi seperti partai politik yang bisa menjadi bagian pengambilan kebijakan (*stake holder*).

Walhasil, maka gerakan politik hijau yang awalnya hanya dalam bentuk gerakan aksi di jalan akhirnya bermetamorfosis ke dalam bentuk institusi partai. fenomena ini awalnya berkembang di seluruh negara-negara Eropa, Amerika, dan di negara-negara Scandinavia. Untuk Eropa perkembangan sangat mencolok terjadi di negara Republik Federal Jerman. Bahkan kesuksesan Partai Hijau (Bundnis 90/ Die Grunen) menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan lingkungan di berbagai negara lain, *The Mother of Green Party*—panggilan yang diberikan oleh partai hijau sedunia bagi Die Grune .

Green Party United States of America (GPUSA), misalnya yang awalnya dibentuk sebagai *Committees of Correspondence* pada suatu pertemuan di Minneapolis pada tahun 1984, meniru model organisasi serupa di Jerman, *German Greens*, yang pada tahun sebelumnya berhasil memenangkan 27 kursi di Parlemen Jerman (Bundestag).⁶

Politik Hijau yang dimanifestasikan dalam bentuk partai ini terus mengalami peningkatan dalam perolehan suara dalam pemilu. Untuk *German Greens* setelah reunifikasi dua Jerman , mendeklarasikan Partai Hijau Bundnis90/Die Grunen pada Mei 1993 sebagai gabungan dari Partai Hijau Die Grunen Jerman Barat dengan Bundnis 90 , sebuah aliansi gerakan-gerakan pembela hak-hak sipil di wilayah eks Jerman Timur. Dengan menggalang isu-isu lingkungan hidup , hak asasi manusia, gender, serta reformasi sosial ekonomi

⁶ Kirk Patrick Sale, *Op Cit*, hlm 87

partai ini tampil menjadi partai terbesar ketiga pada pemilu tahun 1994, yang menggeser posisi FDP (*Freie Demokratische Partei* atau *Free Democratic Party*).⁷

Di tengah derap reformasi dengan penyatuan dua Jerman ini, partai Hijau menjadi partai alternatif, dengan slogan “*a party anti-party*”, dimana partai ini berusaha mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak bisa dimanifestasikan oleh partai-partai mapan seperti *Socialis Democratic party* (SPD), CDU/CSU. Andrei Markovits dan Philips Gorsky dalam *The German Left*, mengamati bahwa “selama tahun 1980-an, partai hijau berkembang menjadi agen sosialisasi kiri Jerman dalam arti bahwa sesungguhnya semua ide, inovasi politis, formulasi strategis, gaya hidup yang baruberasal dari kelompok hijau dan lingkungan mereka.”⁸

Kesuksesan Partai Hijau ini terus berlanjut pada pemilu tahun 1998 dan pemilu tahun 2002 yang lalu. Pada kabinet periode 1998-2002 partai Hijau memegang sebanyak tiga portofolio di pemerintahan, pada jabatan menteri Luar Negeri sekaligus wakil Perdana Menteri—terpilih Joschka Fischer yang merupakan pimpinan Partai ini. Renate Kunast sebagai Menteri Perlindungan Konsumen, Makanan dan Pertanian, Sementara Jergen Tritin sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Bundnis90/Die Grünen (Partai Hijau) selama satu dekade terakhir mendapat perhatian publik dari berbagai kalangan, dia tidak hanya terkenal di kalangan media, dan partisannya saja, akan tetapi juga di kalangan para ilmuwan dan analis politik. Pendekatan yang paling populer untuk menjelaskan munculnya fenomena gerakan hijau (*The Green's*) tercakup pada terminologi perubahan struktur sosial dan perubahan prioritas nilai dalam masyarakat paska industri. Menurut pandangan ini berawal dari munculnya sekelompok kalangan pendidikan kelas menengah baru yang memikirkan nasib Eropa Barat di bawah kondisi sosial yang relatif makmur dan damai. Orientasi nilai yang mereka miliki tidak selamanya bersesuaian dengan paradigma tradisional kiri-kanan, seperti dalam

⁷Di akses dari <http://www.europeangreens.org/peopleandparties/member/germany/html>. pada tanggal 17 September 2002. lihat juga pada *Partai Hijau nan Menguning*, FORUM Keadilan No.9, 16 Juni 2002 hal.45-55

⁸Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 62

politik tradisional.

Menurut Ronald Inglehart dari penelitiannya secara nasional, kehadiran *greens* merupakan fenomena pasca materialis (*post materialisme*) bahwa fenomena ini tidak bisa lepas dari adanya kecenderungan perubahan dalam masyarakat pasca industri, dimana adanya pergeseran dari ‘nilai-nilai kelangkaan’ ke nilai-nilai ‘pasca materialis’, dan sekaligus perubahan distribusi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jalur-jalur kelas seperti dikotomi kiri-kanan. Dengan mengumpulkan materi survey dari serangkaian negara industrial, Inglehart menunjukkan bahwa nilai-nilai pencapaian dan pertumbuhan ekonomi memudar seiring meningkatnya kemakmuran. Sehingga masyarakat memperlihatkan lebih besarnya sensitivitas mereka akan isu kualitas hidup, yang menyangkut seperti lingkungan, nilai-nilai kebebasan berekspresi dan partisipasi⁹.

Asumsi di atas tidak bisa lepas dari kondisi sosial politik masyarakat Jerman sendiri. Pengalaman sejarah membangun paradigma politik masyarakat di negara ini. Mulai dari keterlibatan Jerman pada perang dunia I yang memaklumkan perang terhadap Perancis, yang berimbas pada infansi dan buruknya perkembangan ekonomi. Perang Dunia Kedua juga tidak terlepas dari peran negara ini, Adolf Hitler dengan motor politiknya NAZI (national Socialist) awalnya memperoleh simpati masyarakat luas, semakin menunjukkan gerakan ultra nasionalisnya dengan pembantaian masyarakat Yahudi (*Holocaust*) imbas dari paham Antisemitismus (anti-Yahudi) plus aneksasi keberbagai kawasan di wilayahnya sekitarnya. Pun akhirnya Jerman kembali menuai kegagalan dianeksasi oleh Sekutu pada 8 Mei 1945, harus rela Jerman terpecah menjadi dua Jerman—Pertama, Republik Jerman Timur (*Deutsches Demokratische Republik/DDR*) yang berafiliasi Komunis dibawah Pengaruh *Union of Soviet Socialist Republics*(USSR). Kedua Jerman Barat (*Bundes Republik Deutschland/BRD*) yang demokratis kapitalis di bawah pengaruh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis¹⁰.

Sedikit banyaknya, latar belakang sejarah Jerman, ikut menentukan

⁹ E.Gene Frankland and Donald Schoonmaker, *Between Protest and Power : The Green Party in Germany*, Westview Press, Boulder, San Fransisco, Oxford, 1992, hal. 3

¹⁰ Hefni Effendi, Bangkitanya Jerman Dari Puing Kehancuran, Kompas 21 September 2002

keberadaan sistem politik atau partai-partai yang ada di negara ini. Walaupun dua Jerman telah bersatu kurang lebih satu dasawarsa, tepatnya 3 Oktober 1990, yang dikenal *Tag der Deutschen Einheit*, masyarakat Jerman tetap memiliki kepekaan akan fenomena politik.

Dewasa ini politik Jerman di dominasi oleh masyarakat yang cenderung melinat politik sebagai kegiatan praktis. Bagi mereka politik adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan dan rumah. Politik dilihat sebagai sarana kebutuhan pokok sebagai warga negara. Sehingga pemerintahan yang menjanjikan dan keamanan selalu menjadi pemerintahan yang populer, sebab yang dibutuhkan rakyat Jerman dewasa ini bukan lagi kekuasaan sebagai Negara yang berpengaruh di dunia akan tetapi kesejahteraan hidup yang dapat dinikmati oleh setiap rakyat Jerman¹¹.

Akhirnya bukan masyarakat Jerman, kalau tidak cenderung berganti-ganti pilihan, patokan mereka yang melihat hasil kerja daripada slogan semata. Sehingga tidak heran di Jerman bahkan banyak orang lupa partai apa yang mereka pilih empat tahun yang lalu, ungkap Prof.Dr.Gerhard Gohler, ahli politik di Bonn¹².

Lebih lanjut, Politik Hijau merupakan isu baru dalam kamus politik kontemporer, perkembangan dari gerakan politik ini, tidak hanya muncul dan berkembang dalam fora politik nasional, akan tetapi sudah ikut berkembang dalam tingkat regional bahkan global (politik internasional), sebut saja di tingkat Uni Eropa, Partai Hijau ikut berperan di Parlemen Eropa seperti Le Verst dari Perancis yang bergabung dengan Bundnis90/The Grunen dari Jerman. Bahkan gebrakan-gebrakan Politik Hijau ini juga mempengaruhi hubungan antar negara (terakhir pertikaian antara Jerman dengan Amerika dalam masalah Irak, tidak terlepas dari peran partai Hijau Jerman) dan juga organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti PBB.

Berdasarkan semua paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji fenomena baru dalam dinamika politik kontemporer, yang dikenal dengan Politik

¹¹ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm.23

¹² *Pemilu Jerman: Pilih Kepentingan Ekonomi atau Masalah Internasional*, Kompas 22 September 2002

Hijau ini, secara umum dan perkembangan Partai Hijau di Jerman khususnya. Dan memutuskan untuk menetapkan judul :

Dinamika Partai Hijau (*Bundnis 90/Die Grunen*) dalam Kehidupan Politik di Jerman (Sebuah Kajian Politik Hijau di Jerman)

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Layaknya tulisan ilmiah, harus memiliki batasan jangkauan dan kajian. Tujuannya agar analisis menjadi terarah sehingga peta permasalahan lebih mudah dipahami. disamping itu adanya pembatasan akan mengarahkan tulisan tetap pada poin yang telah digariskan. Dengan demikian pembahasan yang diberikan tidak akan lepas dari judul yang ditetapkan sebelumnya. Akhirnya dengan adanya pembatasan ini akan menghasilkan analisis yang cukup tajam, akurat dan memiliki bobot layaknya sebuah tulisan ilmiah. Batasan yang penulis gunakan dalam analisa dikategorikan pada dua pembatasan, yaitu pembatasan waktu dan pembatasan materi. :

a. Pembatasan Materi

Menyangkut dengan prinsip-prinsip atau platform politik Hijau yang termanifestasi dalam bentuk Partai Hijau Bundnis90/Die Grunen seperti tanggung jawab lingkungan, Demokrasi akar rumput, anti kekerasan, dan lain sebagainya Relevansinya dengan kondisi masyarakat Jerman yang cukup memiliki responibilitas terhadap fenomena politik. Disamping itu juga menganalisis signifikansi dari Partai Hijau dalam menentukan kebijakan baik domestik maupun luar negeri di tubuh pemerintahan.

b. Pembatasan Waktu

Pembatasan waktu ini berhubungan dengan durasi dari analisis yang akan penulis fokuskan, dan disini penulis melihat gerakan politik hijau dengan terwujudnya pendeklarasian Partai Hijau Die Grunen berkolaborasi dengan Bundnis 90 menjadi Partai Hijau Bunnis90/Die Grunen pada tahun 1993, sampai pada hasil pemilu nasional 22 September 2002. Asumsinya pada periode ini, Partai Hijau terus mengalami peningkatan dalam perkembangannya, berawal dari pemilu nasional 1994 membawa Bundnis90/Die Grunen menjadi partai ketiga terbesar di Republik Federal Jerman. Dan sampai pada pemilu terakhir 2002 yang

terus memperlihatkan peningkatan jumlah suara bagi partai ini.

1.3 Rumusan Permasalahan

Munculnya permasalahan merupakan langkah awal untuk memulai pembahasan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari suatu persoalan. Dalam kerangka penelitian ilmiah, persoalan tersebutlah yang akan menjadi akar untuk memecahkan suatu kasus. Disini permasalahan bisa dimaknai arah pembahasan dengan analisis yang kritis, permasalahan merupakan stimulus bagi penulis untuk berusaha menemukan jawaban yang tepat dan akurat, dan ini akan diperoleh dengan adanya dukungan dari data-data yang cukup objektif.

Munculnya gerakan Politik Hijau, yang dimanifestasikan dalam bentuk partai Hijau seperti di Jerman merupakan suatu kajian yang menarik. Asumsinya kemunculan gerakan ini cukup memperoleh tempat di publik Jerman, pada awal terbentuknya partai mereka dan langsung mengikuti pemilihan di tingkat federal pada tahun 1980, sudah mendapatkan kursi di Parlemen (*Bundestag*), suatu prestasi yang cukup mengagumkan, karena mereka merupakan partai yang relatif muda. Ditambah penafsiran politik masyarakat Jerman yang cukup bagus terhadap fenomena politik.

Kemudian, selama tiga periode pemilu terakhir 1994, 1998 dan 2002 Partai Hijau terus mengalami peningkatan jumlah suara. Bahkan indikasi yang paling menentukan adalah terlibatnya Partai Hijau di tubuh pemerintahan sebagai mitra koalisi dari SPD (koalisi ini sering disebut *red-green coalitions*) yang jelas sangat menguntungkan partai Hijau karena bisa secara langsung mempengaruhi kebijakan di tubuh pemerintahan.

Namun, bukan berarti perkembangan Partai Hijau cukup lancar tanpa hambatan sama sekali. Seperti yang diungkapkan sebelumnya. Partai ini cukup memiliki tantangan yang signifikan baik dalam perannya sebagai mitra koalisi SPD, akan tetapi juga diluar konteks itu. Dimana Partai Hijau yang hanya sebagai mitra koalisi cenderung menjadi bayang-bayang dalam pengambilan keputusan di tubuh pemerintahan, artinya keterlibatan *Bundnis90/Die Grunen* bukan berarti akan mampu menerapkan sekian kebijakan yang diinginkan oleh partai ini. Karena jelas jumlah suara yang dimiliki Partai Hijau masih jauh dari jumlah suara

yang dimiliki SPD.

Di samping itu, lawan-lawan politik seperti CDU/CSU cenderung terus merongrong setiap sepak terjang yang dilakukan oleh partai Hijau dan koalisinya. Belum lagi kalangan industrialis dan pebisnis Jerman yang cukup frontal dengan kebijakan Partai Hijau. Dan yang lebih real adalah Partai Hijau (*Bundnis90/Die Grunen*) sendiri dalam berhadapan dengan masyarakat Jerman yang memiliki kekritisian dan responabilitas yang cukup tinggi terhadap politik.

Selain itu, Politik Hijau tidak hanya muncul di Jerman, tapi hampir di seluruh negara-negara Eropa Barat (lihat Lampiran1, Tabel hasil pemilu partai-partai Hijau di Eropa)) dan Amerika, akan tetapi perkembangan yang mencolok justru terjadi di Negara ini. Berangkat dari sinilah muncul pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik bagi penulis untuk ditemukan jawabannya.

Jadi melihat kondisi dari gerakan Politik Hijau yang termanifestasi dalam Partai Hijau di Jerman penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah yang melatarbelakangi dinamika Partai Hijau sehingga Partai ini Menjadi Salah Satu Kekuatan Politik Baru di Jerman?”

Dus, ruang lingkup pertanyaan tersebut memiliki substansi mengenai aspek-aspek yang *inheren* dengan dinamika Partai Hijau Jerman, sehingga Partai ini tampil menjadi kekuatan politik baru di Republik Federal Jerman.

1.4 Kerangka Konsep dan Pemikiran

Dalam penulisan karya ilmiah, kerangka pemikiran merupakan hal yang sangat krusial, disamping berguna untuk menjelaskan permasalahan dan menghindari adanya bias, juga untuk menyusun hipotesa. Selain itu kerangka dasar pemikiran bisa dijadikan acuan dan pedoman untuk bertindak dalam proses pengujian data menganalisis persoalan yang akan dibahas, dan ini akan menghindari terjadinya anomali terhadap hasil kesimpulan yang akan diperoleh, akan tetapi akan membawa pada kesimpulan dan solusi yang tepat pada suatu masalah.

Dalam menganalisa akan keberadaan gerakan politik hijau Partai Hijau

Bundnis90/Die Gruenen) di Republik Federal Jerman, penulis menggunakan beberapa Konsep pemikiran yang diasumsikan cukup relevan sebagai pisau analisa terhadap permasalahan tersebut.

Partai Hijau yang merupakan metamorfosa dari gerakan-gerakan ekologis yang muncul pada dasawarsa 70-an mendapat perhatian dari banyak ilmuwan politik yang *concern* terhadap fenomena ini. Berbagai pendekatan yang ditawarkan cukup bervariasi untuk menjelaskan fenomena ini.

Seperti klaim yang diberikan oleh Tim Hayward, bahwa **Teori Politik Hijau** (*Green Political Theory*) adalah khusus diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi teori politik. Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisme) akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals*¹³.

Menurut Mathew Patterson perlu untuk membedakan antara *green poliitics* dan *environmentalism*. Environmentalis menerima kerangka kerja yang ada dalam politik, sosial, ekonomi dan struktur normatif dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut. Sementara politik hijau menganggap bahwa struktur tersebut sebagai dasar utama bagi munculnya krisis lingkungan dan oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur tersebut butuh perubahan dan perhatian yang lebih utama¹⁴.

Pada tabel 1.1, memperlihatkan perbedaan antara pola gerakan lingkungan hidup yang di dasarkan pada ideologi politik maupun ideologi ekonomi. Gerakan lingkungan hidup ini dibedakan antara *gerakan lingkungan radikal* dan *gerakan lingkungan reformis*.¹⁵

Kelompok reformis berangkat dari pandangan umum ideologi budaya liberalalisme, demokrasi (seperti yang dipraktekan oleh partai buruh dan sosial demokrat), dan sosialisme. Dengan pendekatan ini mencoba memperbaiki sistem kapitalisme menjadi lebih baik, sebagai reaksi terhadap permasalahan

¹³ Tim Hayward, *Green Political Theory*, University of Edinburg, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf> pada tanggal 17 Oktober 2002

¹⁴ Matthew Patterson, *Green Politics* dalam *International Relation Theory*, ed., Scoot Burchill and Andrew Linklater, St.Martin's Press. Inc, New york, 1996, hlm.252

¹⁵ David Pepper, *Environmentalism*, dalam Gary Brownig, etc (ed), *Understanding Contemporary Society (Theories end The Present)*, SAGE Publication, London, 2000, hal.447

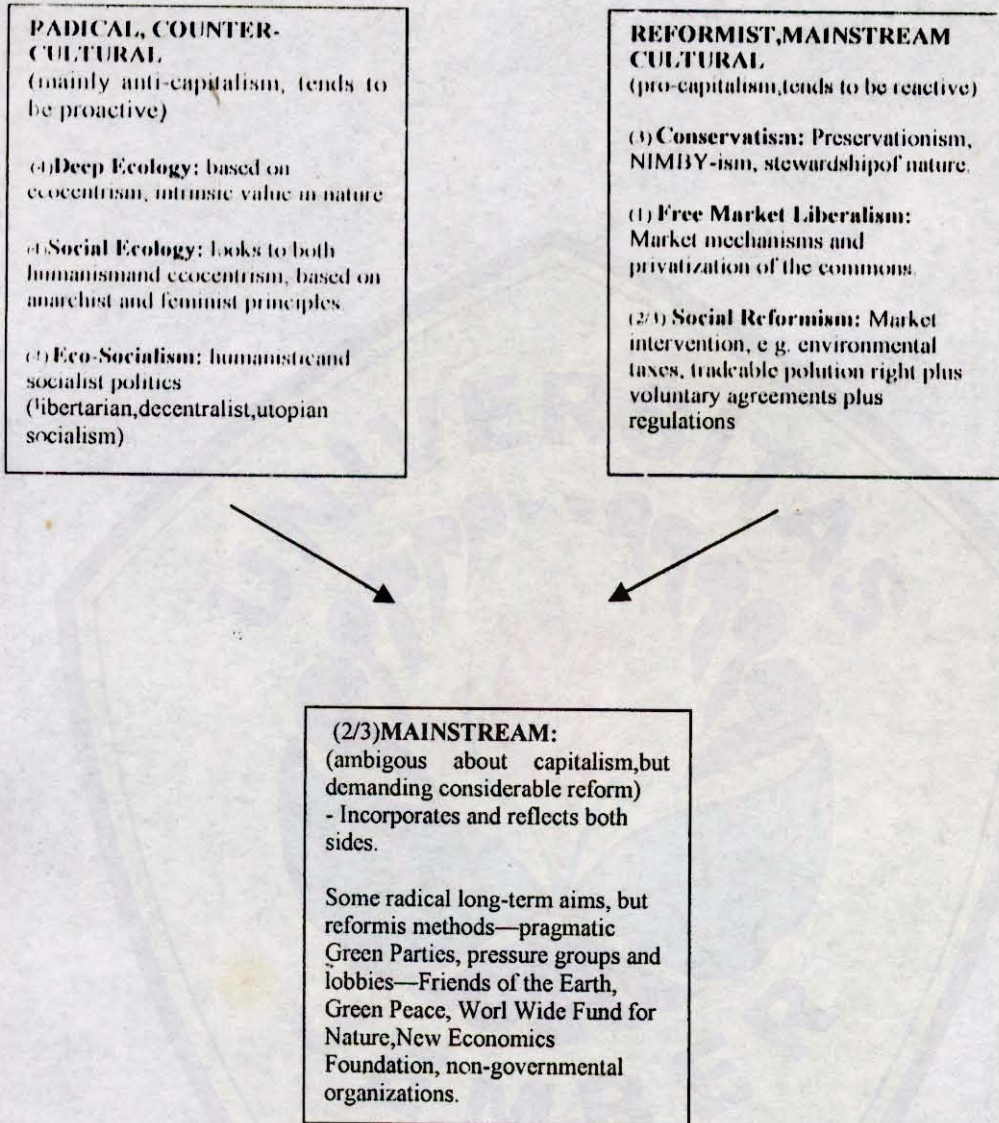
lingkungan, mereka mengadopsi perspektif yang dikenal dengan teknosentris. Paham teknosentrisme diyakini sebagai ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen ekosistem yang rasional dan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan lingkungan. Argumen ini lebih jauh mempertanyakan seberapa banyak keterlibatan negara dalam ekonomi pasar. Sementara ide pasar bebas tidak akan mengurangi pengelompokan kekuatan pasar dengan meningkatnya kepemilikan individu terhadap lingkungan yang mempengaruhi kondisi objektif lingkungan sendiri.

Untuk itu kelompok ini menyarankan jalan keluar dengan peningkatan pajak lingkungan (*eco-taxes*), insentif, dan regulasi perusahaan-perusahaan dan kepemilikan individu. Berangkat dari pandangan yang sama, kelompok konservatif menawarkan proteksi alam dengan konsep pemeliharaan lingkungan, seperti yang diadopsi dalam program lingkungan Uni Eropa yang dikenal dengan 'prinsip pencegahan'-nya. Mereka menolak kemungkinan pembangunan menghasilkan ketidakpastian terhadap kondisi lingkungan. Konservatif tradisional bersikap sama yang termanifestasi dalam sindrom 'Not In My Back Yard' (*NIMBY*), yang mencoba menyerahkan permasalahan polusi dan kerusakan lingkungan kepada komunitas dan negara yang relatif berperan, atau sederhananya tidak bisa melawan mereka untuk alasan politik atau ekonomi.¹⁶

Bertolak belakang dengan aliran reformis, gerakan lingkungan radikal justru lebih pro aktif, melihat permasalahan lingkungan pada akhirnya lebih dari sekedar reaksi sederhana terhadap kerusakan yang disebabkan oleh operasi kapitalisme global. Untuk itu diperlukan perubahan sosial yang fundamental, yang salah satunya dengan pengeliminasian atau lebih lengkap merekonstruksifikasi kapitalisme. Jadi perdebatan tentang lingkungan bergeser dari pendekatan kultural/ekonomis dan menjadi perlawanan-kultural yang sering digambarkan dalam tradisi perlawanan kultural seperti romantisme, anarkisme, sosialisme utopis dan lain sebagainya. Pendekatan ini mencakup:

- *Social Ecology*, secara garis besar didasarkan pada prinsip anarkis yang terutama di interpretasikan dalam kerja Murray Bookchin (e.g. 1990)

¹⁶ Ibid



Figures 1.1 Environmentalism, and their political ideologies and approaches
 (Sumber: David Pepper, *Environmentalism*, dalam Gary Brownig, etc(ed), *Understanding Contemporary Society (Theories and The Present)*, SAGE Publication, London, 2000, hal.447

- *Eco-socialism*, bersifat libertarian, desentralistis dan komunalis dalam prinsipnya, berangkat dari pemikiran sosialisme yang pada akhirnya dihadapkan pada negara, dan
- *Deep ecology*, memfokuskan pada perubahan yang fundamental dalam sikap dan nilai terhadap alam. Mengajak masyarakat dimaapun untuk

menyesuaikan diri dengan prinsip ekologi (seperti prinsip 'kapasitas memiliki' yang berimplikasi terhadap batasan pertumbuhan penduduk dan ekonomi¹⁶

Gerakan Lingkungan *Mainstream* seperti di gambar merupakan gabungan dari radikal dan reformis. Seperti asumsi Dobson, kadang menganjurkan untuk radikal (termasuk ekosentris dan oposit terhadap kapitalisme), tapi mereka juga pragmatis secara politik, menyuarakan bahwa solusi utama krisis lingkungan harus direformasi daripada tidak sama sekali, mereka kadang melakukan aksi anti kekerasan secara langsung, namun juga menjadi anggota parlemen seperti partai-partai Hijau yang ada di Eropa, atau LSM *Friends of The Earth* kelompok radikal di Amerika.¹⁷

Di samping itu, ada beberapa pandangan yang satu sama lain memiliki perbedaan dalam mendefinisikan karakter dari Politik Hijau. R. Eckersley memberikan definisi karakteristiknya adalah Ekosentrisme—yang menolak sebuah pandangan *anthropocentric* yang menempatkan bahwa nilai moral berpusat pada manusia, dan salah satunya menyetujui dengan menempatkan kebebasan nilai juga pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan.¹⁸

Sementara R.E Goddin juga menempatkan etika pada pusat dari posisi Politik Hijau, pernyataannya bahwa sebuah *Green Theory of Value* merupakan pusat dari Teori Politik Hijau. Formulasinya yang merupakan nilai teori hijau, bahwa sumber nilai tersebut merupakan suatu fakta dari mereka yang memiliki sejarah dibentuk oleh proses alamiah dan lebih dari sekedar peran manusia.¹⁹

Lain lagi dengan John Barry, dia melihat bahwa Politik Hijau didasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain :

- (1) Sebuah teori distribusi (intergenerasional) keadilan
- (2) Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan
- (3) Usaha untuk mencapai keberlanjutan ekologi²⁰

Tiga prinsip utama ini merupakan konsepsi yang mewakili makna dari

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hlm. 449

¹⁸ Matthew Patterson, *Op Cit*, hlm.253

¹⁹ Ibid

²⁰ John Barry, *Green Political Theory and The State "Discursive Sustainability ; The State (and citizen) of Green Political Theory*, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf> pada tanggal 17 Oktober 2002

pusat politik Hijau, mereka sepenuhnya digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan apa dan apakah bukan sebuah konsepsi dari teori hijau. Seperti contoh kita bisa memahami kelangsungan dari teori hijau (atau eko-otoritarianisme) sebagai usaha keberlanjutan bagi biaya demokrasi dan keadilan sosial²¹.

Disamping itu, A. Dobson mempunyai dua defenisi karakteristik dari Politik Hijau, yang salah satunya menolak pandangan antropocentrisme seperti yang diungkapkan oleh Ekcersley, yang lain perlu adanya batasan pertumbuhan, yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami. Pandangan politik Hijau—ini merupakan pengalaman dari pertumbuhan ekonomi secara eksponensial selama dua abad terakhir sebagai penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada sekarang ini.²²

Disamping itu, munculnya proyek hijau memperoleh dukungan banyak di negara-negara Eropa; tampaknya lebih banyak di Eropa Utara daripada eropa Latin. Partai hijau bertambah kuat di tingkat lokal, seperti 'die grunen' di Jerman Barat, kelompok yang paling aktif dan fasih, dan disebut sebagai partai induk oleh kelompok lain. Proyek hijau ini mengindikasikan tidak ada Internasional Hijau (yang harus dilihat lebih luas dari partai hijau) pada dirinya adalah transnasional mengingat persoalan yang dihadapi. Isu yang pertama adalah perlindungan lingkungan yang menurut pandangan hijau tidak sesuai dengan sistem industri modern baik sosialis maupun kapitalis. Menurut Rudolf Bahro, yang telah mengalami keduanya, meminjam konsep E.P Thomson "ekstrimisme sebagai ciri umum peradaban Barat (Bahro 1984). Industrialisasi yang merebak di seluruh dunia akan merusak kehidupan di muka bumi. Namun sebelum hal ini terjadi, kompetisi atas sumber daya yang semakin langka akan meningkatkan ketegangan politik dalam sistem dunia sampai ke titik di mana bencana nuklir akan menghancurkan dunia ini. Jadi isu kedua yang memobilisasi gerakan hijau adalah perdamaian. Ekologi dan perdamaian saling terkait, namun realisasinya membutuhkan transformasi masyarakat.²³

²¹ Ibid

²² Mathew patterson, *Op.Cit*, hlm.253

²³ Bjorn Hettre, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 337-338

Dengan demikian, masalah yang mengaktifkan kelompok hijau berbeda dari isu kampanye yang lazim dari kelompok-kelompok aliran politik yang lazim. Ekologi dan Perdamaian merupakan titik acuan bagi semua isu lainnya; isu lainnya harus menyesuaikan diri dengan titik acuan tersebut. Keduanya bukan hanya segelintir butir dari seluruh program partai, juga bukan hanya isu kampanye pemilu. Inilah sebabnya mengapa proyek hijau layak di perhatikan dalam konteks ini. Dan dari sudut pandang ini, jumlah suara yang diperoleh tidaklah menjadi hal yang krusial.²⁴

Politik Hijau atau gerakan ekologi sendiri memiliki sepuluh nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan sekaligus sebagai acuan bagi artikulasi kebijakan politik yang mereka lakukan. Walaupun ada perbedaan antara Partai Hijau yang satu dengan Partai Hijau yang lain namun kesepuluh nilai ini tidak jauh berbeda, antara lain²⁵ :

1. *Kesadaran dan Keberlangsungan Ekologi*

Merupakan isu yang paling utama, menghubungkan tradisi pencerahan dengan pengalaman batasan industrialisme, sebuah kompleksitas kesadaran baru yang diambil dari prinsip-prinsip ekologi. Berangkat dari asumsi bahwa manusia harus bertindak berdasarkan pemahaman bahwa ia merupakan bagian dari alam dan bukan berada di atas alam lingkungannya. Untuk itu perlu dijaga keseimbangan ekologis dan hidup dalam keterbatasan sumber daya serta batas-batas ekologi planet bumi.

2. *Demokrasi Akar Rumput*

Dalam hal demokrasi, kaum ekologis percaya bahwa demokrasi yang sebaik-baiknya harus di praktikan di tingkat akar rumput . Maksudnya di tingkat masyarakat lokal dan bukan di lembaga perwakilan nasional maupun daerah. Menurut mereka, setiap manusia berhak ikut berpendapat terhadap keputusan yang ikut berpengaruh terhadap hidup mereka. Pun manusia tidak

²⁴ Ibid

²⁵ *The Future is Green : Alliance90/The Greens (Party Program and Principles)*, hlm. 5 - 8, diakses dari situs resmi partai hijau Jerman *Alliance90/The Greens* <http://www.archiv.gruene-partei.de/dokumente/grundsatzprogramm-english.pdf> pada tanggal 23 Maret 2003, lihat juga pada *Ten Key Value*, di akses dari <http://www.greenparty.org/tenkeyvalue/html> pada tanggal 17 September 2002. Lihat juga pada Partai Hijau nan Menguning : 10 Printah Kaum Ekologis,, suplemen Forum Keadilan No.9, 16 Juni 2002

boleh menjadi korban dari keinginan segelintir orang saja. Demokrasi diartikan sebagai *interface* antara kebebasan berekspresi pada satu pihak dan penghargaan yang sama dipihak lain.

3. ***Keadilan sosial dan Persamaan Kesempatan***

Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dari sumber daya yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu perlu dihilangkan hambatan-hambatan sosial, seperti: sikap rasis, seksisme dan heteroseksisme, opresi antar kelas, homofobia, serta penelantaran kepentingan orang tua dan crang cacat. Sikap yang memberikan perlakuan yang sama ini harus mendapat perlindungan undang-undang.

4. ***Anti Kekerasan***

Menyangkut pluralitasnya manusia, penting untuk dikembangkan suatu alternatif yang efektif terhadap kebiasaan masyarakat kini dalam menggunakan kekerasan. Untuk itu perlu diperjuangkan proses demiliterisasi dan penghilangan senjata pendestruksi masal di dalam negerinya sendiri, tanpa berniat naif terhadap niat buruk negara lain. Walaupun mengakui tindakan mempertahankan diri dari orang-orang yang berada dalam situasi terdesak, perlu diupayakan penyelesaian konflik secara non kekerasan. Kelompok ekologis bergiat guna mewujudkan suatu kedamaian personal, komunitas, dan global yang abadi.

5. ***Desentralisasi***

Berangkat dari asumsi bahwa sentralisasi kesejahteraan dan kekuasaan berkontribusi besar terhadap ketidakadilan ekonomi, perusakan lingkungan, dan militerisasi. Karena itu mereka mendukung upaya restrukturisasi institusi-institusi politik, sosial dan ekonomi yang dikuasai oleh (dan hanya menguntungkan segelintir orang kuat. Institusi tersebut akan diubah dengan sistem yang lebih demokrasi dengan lebih sedikit birokrasi. Pengambilan keputusan harus sebisa mungkin berada pada tingkat individu dan lokal.

6. ***Ekonomi Berbasis Komunitas dan Berkeadilan***

Bahwa penting untuk menerapkan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan dimana bisa diciptakan lapangan kerja baru dan standar hidup yang baik untuk semua orang tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis.

Sistem ekonomi tersebut harus bisa memberikan sebuah kebanggaan terhadap pekerjaan “yang berarti” dan membayarkan biaya hidup yang sesuai dengan nilai nyata dari sebuah pekerjaan. Dalam hal ini mereka sangat membela jenis-jenis pekerjaan yang selama ini termarginalkan, tetapi sebenarnya sangat penting dalam menopang harmoni hidup bermasyarakat. Misalnya, pekerjaan domestik dan pekerjaan menjaga kebersihan yang selama ini kurang dihargai.

7. *Feminisme dan Kesetaraan Gender*

Partai-partai ekologi menyadari sepenuhnya bahwa manusia mewarisi sistem sosial yang berdasarkan pada dominasi laki-laki, baik dalam wilayah politik maupun ekonomi. Karena itu, mereka menyerukan pergantian budaya dan etika dominasi dan kontrol dengan suatu cara berinteraksi yang lebih kooperatif dimana perbedaan pendapat dan gender dihormati. Nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan jenis kelamin, tanggung jawab antar personal dan kejujuran haruslah dikembangkan dengan kesadaran moral. Kita seharusnya mengingat bahwa proses yang menentukan keputusan dan tindakan kita sama pentingnya dengan usaha penyelesaian yang kita inginkan.

8. *Penghormatan terhadap keberagaman*

Adanya keyakinan akan pentingnya keberagaman budaya, etnik, ras, agama dan kepercayaan spiritual. Sebab itu mereka mempromosikan suatu hubungan yang saling menghargai di antara keberbedaan tadi. Berangkat dari keyakinan ini, mereka percaya bahwa perbedaan-perbedaan yang ada harus pula tercermin dalam organisasi-organisasi dan badan-badan pengambilan keputusan. karenanya mereka sangat mendukung kemunculan pemimpin dari kalangan mereka yang selama ini terpinggirkan dari peran kepemimpinan. Misalnya kaum perempuan.

9. *Tanggung Jawab Personal dan Global*

Kaum ekologis mendukung tindakan individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, akan tetapi tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan keseimbangan ekologi dan harmoni sosial. Karenanya mereka mau bergabung dengan orang-orang dan organisasi yang mau memperjuangkan perdamaian abadi, keadilan sosial ekonomi, dan menjaga kelestarian bumi.

10. *Fokus pada masa depan dan Keberlanjutan*

Tindakan dan kebijakan kaum ekologis dimotivasi oleh tujuan jangka panjang. Mereka berjuang dalam perlindungan sumber daya alam yang berharga, mengamankan dengan pengaturan atau tidak melakukan semua pemborosan. Dengan mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan yang tidak menggantungkan diri pada ekspansi berketerusan untuk mampu bertahan hidup. Mereka melawan dengan keras pandangan yang mempunyai tujuan keuntungan jangka pendek. caranya, mereka menjaga agar perkembangan ekonomi, penggunaan teknologi baru dan kebijakan fiskal ikut bertanggung jawab terhadap generasi mendatang, yaitu mereka yang akan mewarisi hasil dari tindakan saat ini.

Politik Hijau merupakan Jenis politik sistem Ketiga. Ketika sistem ketiga berkembang (dalam bentuk sistem ekonomi informal, jaringan kerjasama bukan makroorganisme yang dikendalikan oleh negara, melainkan fokus pada komunitas loka' yang semakin kuat dan semakin otonom, dan lain-lain), peran negara dalam hal ini (sistem pertama) secara otomatis akan surut, begitu pula perusahaan besar (sistem kedua) yang beroperasi dalam sistem fungsional bukan sistem teritorial. Dari sudut pandang perusahaan raksasa, revitalisasi kehidupan teritorial berarti kehilangan pasar, sebagaimana halnya kehilangan pajak dari sudut pandang alat negara.²⁶

Disamping itu gerakan hijau dalam proyek-proyeknya juga menolak bentuk integrasi dalam level dunia. Menurut Rudolf Bahro, Pemimpin kharismatik Partai Hijau Jerman "tidak ada keselamatan tanpa pembongkaran kompleksitas . jadi mereka menekankan pembangunan teritorial dengan fokus lokal, yang kurang lebih sehaluan dengan tradisi pembangunan *civil society* dan lain sebagainya. Dan

²⁶ Bjorn Hettre, *Op Cit*, hlm. 377-388

Lebih lanjut, perbedaan anantara prinsip pembangunan fungsional dan teritorial adalah: **Fungsional** berhubungan dengan pola pembangunan yang umum dipakai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh spesialisasi dan pembagian kerja antar wilayah yang akhirnya diperhitungkan adalah jumlah hasil pada level perekonomian nasional, atau menurut sebagian pandangan perekonomian dunia. Masalah keterbelakangna regional dilihat atau sebagai ketidakseimbangan sementara atau pengorbanan yang perlu untuk mencapai pertumbuhan secara keseluruhan. Sementara Prinsip **Teritorial** sebaliknya, memberi prioritas pada regio dan komunitas lokal, pembangunan merela harus sesuai dengan ciri-ciri ekologis dan kultural tiap regio. Ini merupakan pembangunan dari bawah ke atas (Bjorn Hettre :2001)

hal ini tentu sesuai dengan slogan yang didengung-dengungkan oleh gerakan politik hijau sendiri, yaitu *"Think Globally, Act locally!"*²⁷

Di samping itu, untuk melihat fenomena Politik Hijau yang bermetamorfosis ke dalam bentuk institusi partai politik, penulis juga menggunakan konsep partai secara komprehensif.

Terminologi partai politik mulai berkembang dan terorganisir pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 di Eropa Barat, sebagai buah dari usaha-usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan kebijaksanaan pemerintah. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok dalam pemerintah terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dominan mereka. Dengan demikian partai-partai politik merupakan penghubung antar rakyat dengan pemerintah; dan di dunia modern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dari hubungan itu²⁸.

Dalam hal ini ada beberapa definisi partai yang bisa menjadi acuan.. salah satunya yang didefinisikan oleh Sigmund Neuman, :

Partai politik sebagai organisasi artikulator yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa lain kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik tersebut merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas²⁹.

Menurut Mark N.Hagopian, Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam

²⁷ Ibid

²⁸ Gabriel Almond, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik dalam Mohtar Mas'ood dan Colin M Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000, hlm.61

²⁹ Sigmund Neuman, *Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai-partai Politik*, dalam Miriam Budiardjo (penyunting), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 70

kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.³⁰

Menjadi partai dari sesuatu selalu berarti mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok dan membedakan diri dari kelompok lain. Samuel P. Huntington mengklasifikasi pertumbuhan dan perkembangan Partai kedalam empat tahap, yakni tahap faksional, tahap polarisasi, tahap perluasan dan tahap pelembagaan³¹.

Dalam tahap pertama, *Faksionalisasi*, masyarakat baru mengenal partai suatu invensi kultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Politik ditandai dengan persaingan sengit antar kelompok atau faksi yang berusaha memperebutkan kekuasaan atau pengaruh. Masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi politik modern, yakni organisasi profesional dan basis sosial pendukung organisasi politik tersebut. partai-partai modern menggabungkan dua dimensi pokok tersebut.

Tahap kedua *Polarisasi*, dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding sosial tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Meningkatnya kesadaran politik warga negara dengan sendirinya memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Heterogenitas masyarakat modern di tengah perubahan sosial-ekonomi secara perlahan-lahan menumbuhkan polarisasi kelompok sebagai akibat dari semakin kompleksnya masyarakat politik. Masyarakat yang terpolar secara dinamis mempelebar basis sosial masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan memperkuat posisi masing-masing.

Tahap ketiga, *ekspansi* atau *perluasan*, partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa yang luas dan beragam secara berlapis-lapis merupakan syarat pokok untuk membangun kekuatan partai. Kekuatan-kekuatan yang tumbuh dan berkembang membutuhkan sistem partai sebagai sarana menyalurkan dan mengendalikan eksistensi kepentingan kelompok. Dengan kata lain, pada tahap ketiga ini partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator

³⁰ DR. Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, hal. xi

³¹ Bambang Cipto, M.A, Drs, *Op Cit* hlm.4-6

kepentingan umum.

Pelebagaan, merupakan tahap terakhir dari pertumbuhan partai politik. Pada titik ini sistem partai relatif mencapai tahap mapan. Ditandai terbentuknya system dua partai, system multi partai.

Sementara Almond menambahkan lebih lanjut, bahwa perbedaan-perbedaan agama, suku, etnik, dan kelas dalam suatu masyarakat tidak selalu menimbulkan kepartaian yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan itu. Yang lebih memungkinkan mempengaruhi pembentukan partai politik adalah pengalaman-pengalaman historik yang memperkuat kesadaran politik dari satu atau beberapa kelompok. Dominasi satu suku atas suku yang lain ; konflik-konflik yang sudah berjalan lama antar kelompok –kelompok keagamaan; adanya usaha dari kelompok kultural yang dominan untuk memaksakan pemakaiannya pada kelompok kultural yang lain; dominasi dari suatu aristokrasi atau kelas industrialis terhadap buruh dan petani kecil, dan sebagainya—semua ini merupakan situasi yang dapat mempengaruhi pola pembentukan partai politik³².

Disamping itu , dalam memahami fenomena politik Partai Hijau di Republik Federal Jerman, juga perlu untuk memahami fungsi dari partai politik itu sendiri. beberapa fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai sarana komunikasi politik, arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah , artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (the rulers) dengan “mereka yang diperintah” (the ruled).
2. Sarana sosialisasi politik, merupakan proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada; proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Rekrutmen politik, adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon

³² Gabriel Almon, *Op Cit*, hlm. 63

pemimpin.

4. Sarana pengatur politik (*conflict management*). Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan sudah merupakan hal yang wajar. Sementara dalam masyarakat yang heterogen sifatnya, maka perbedaan pendapat sering mengundang konflik. Dalam hal ini peran partai politik bisa membantu mengatasi pertikaian tersebut³³.

Disamping itu, parati politik juga berfungsi sebagai artikulasi kepentingan (*interest articulation*), dimana tuntutan-tuntutan, pendapat dan sikap dari masyarakat perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*)³⁴.

Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyaknya menyangkut hal yang sama, digabung menjadi satu dan hal ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest agregation*). Dan terakhir, fungsi partai politik, yang paling utama adalah sebagai pembuat kebijaksanaan (*decision maker*), dalam hal ini partai politik berperan dalam merentukan kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah. Jadi partai politik melalui suaranya baik di parlemen ataupun di jajaran pengambil kebijakan lainnya ikut andil dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*)³⁵.

Perkembangan yang progresif dari partai-partai politik Eropa pertamanya berputas disekitar dua pertentangan dasar, yaitu antara konservatif dan liberal dan antara sosialis dan kapitalis. Pada saat ini, yang pertama disebut tadi sudah boleh dikatakan tidak ada lagi, tetapi yang keduanya masih tetap berlangsung.

Konflik antara konservatif dan liberal merupakan suatu hal yang jarang terjadi untuk saat ini. Karena merekapun sudah sering menganut pandangan politik yang sama, dan adakalanya mereka bersatu menjadi suatu partai politik. Tetapi kurang lebih dua abad yang lalu konfrontasi mereka sering meledak melalui suatu tindakan kekerasan (manifestasi yang paling jelas adalah Revolusi

³³ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik suatu Pengantar*, dalam Miriam Budiardjo, (penyunting), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 17-19

³⁴ *Ibid*, hlm 17

³⁵ Gabriel Almond, *Op Cit*, hlm. 68

Perancis tahun 1789 dan Revolusi Eropa tahun 1830 dan 1848). Pertikaian anatar konservatif dan liberal ini telah demikian mendalamnyadi beberapa negara, sehingga beberapa ahli sejarah menganggapnya sebagai bukti kelanjutan perjuangan yang tak ada akhirnya anatar penduduk asli daerah tersebut dengan penyerbu kejam yang datang . akan tetapi konflik antara konservatif dan liberal bukanlah perjuangan anatar dua ras seperti yang diperkirakan oleh Francois Guizot dan Augustin Thierry, tetapi lebih merupakan perjuangan kelas dimana setiap kelas mengembangkan suatu ideologi yang sejalan dengan kepentingan kelas itu.³⁶

Kemudian antara 1815 dan 1848 terjadilah revolusi industri yang kedua, yang menghasilkan sejumlah besar pabrik-pabrik baik yang besar maupun yang kecil. Sementara kekayaan dan kekuasaan kaum borjuis bertambah, dan kaum borjuis ini terus saja berusaha menggantikan kedudukan kaum aristokrat, kelas pekerjapun menjadi semakin banyak . konsentrasi mereka bekerja dan hidup sangat membantu meluasnya sosialisme, suatu ideologi yang mengkristalkan aspirasi kelas pekerja (proletar) dan memperkuat perjuangan mereka melawan pemilik modal (kapital).³⁷

Sementara itu, kondisi dan perkembangan masyarakat di negara-negara Barat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terutama karena adanya pembagian kerja dalam masyarakat yang menghasilkan berlipat gandanya kelompok-kelompok, peran-peran dan pekerjaan dengan keanggotaan yang selalu tumpang tindih. Sesuai dengan perkembangna tersebut partai-partai harus menjadi institusi yang menghubungkan struktur sosial multi kelompok dengan pemerintah. Ini berarti bahwa dalam partai harus ada pra kondisi demi terselenggaranya kompromi dan akomodasi hal tersebut.

Saat ini, seorang warga negara yang melakukan banyak peran dan masuk ke dalam berbagai organisasi modern akan menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap semua kelompok dan berbagai peran. Hal ini juga berlaku bagi partai yang mengharapkan dukungan rakyat. Akibatnya partai di negara-negara barat jadi Agregatif (mengumpulkan dan menyatukan kepentingan) serta tidak eksklusif

³⁶ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 46

³⁷ *Ib'd*, hlm. 53

dan sektarian.³⁹

1.5 Hipotesa

Di dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan metodologi, Mohtar Mas'eod mengemukakan, bahwa hipotesa pada dasarnya adalah dugaan tentang hubungan antara konsep-konsep. Sesudah itu diuji dengan bukti-bukti yang ada berdasar azas-azas metode saintifik, generalisasi bisa diterima atau ditolak. Disini akan mempermudah kita dalam menemukan jawaban yang betul-betul empirik dan tepat⁴⁰.

Menurut Amir Taat Nasution, memberikan defenisi hipotesa sebagai berikut;

“ Hipotesa adalah perhitungan kira-kira yang belum dapat dibuktikan kenyataannya, tetapi biasanya telah dianggap sebagai sesuatu yang benar dan nyata karena dasar kira-kira tersebut didasarkan dalil-dalil yang berdasarkan kenyataan, sebagai penyelidikan atas suatu fenomena. ”⁴¹

Lebih lanjut, hipotesa ini akan diuji kebenarannya dengan bukti-bukti dan fakta empirik, baik dilakukan dengan observasi maupun penelitian.

Kehadiran gerakan politik hijau dalam bentuk institusi Partai Hijau Bundnis 90/Die Grunen di kancah politik Republik Federal Jerman merupakan gejala baru, partai yang dikenal dengan anti kemapanan ini menyatakan diri sebagai partai yang berusaha menyuarkan kepentingan sosial ekonomi yang tidak tersalurkan oleh partai-partai mapan seperti CDU/CSU, SPD, FDP.

Dari paparan sebelumnya bahwa beberapa kali pemilihan umum, partai ini terus mengalami peningkatan jumlah suara. Maka dalam hal ini hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan ini adalah,

“Bahwa Dinamika Partai Hijau dilatarbelakngi oleh faktor internal dan eksternal Partai, Sehingga Tampil Menjadi Kekuatan Politik Baru di Jerman”

Faktor internal partai berhubungan dengan dua faksi dalam tubuh partai yaitu *fundis* dan *realos* yang cenderung kontra dalm menentukan kebijakan partai. sementara faktor eksternal berhubungan dengan fenomena politik di luar partai

³⁹ Roy C. Macridis, "Sejarah dan Tipologi Partai" dalam *Op cit*, Ichlasul Amal hal.24-25

⁴⁰ Mohtar Mas'oeod, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, IP3ES, Jakarta, 1989, hlm..40

⁴¹ Amir Taat Nasution, *Kamus Politik*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hlm. 105

baik nasional maupun internasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Tulisan ini bersifat studi pustaka (*Library research*), jadi data yang dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung dari sumber data dan merupakan data yang bersifat sekunder data yang dipergunakan antara lain:

1. Buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan tema yang diangkat
2. Dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga resmi yang terkait
3. Surat Kabar, Jurnal Ilmiah, Majalah, makalah hasil seminar, buletin dan lain sebagainya.
4. data-data yang terdapat dalam situs-situs resmi dari lembaga-lembaga pemerintahan, partai, pusat penelitian, pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema skripsi.

Dalam memperoleh data-data tersebut penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan fakultas ISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Kedutaan Republik Federal Jerman--Jakarta
4. Pusat Informasi Center for Strategic of Internatioanl Studies (CSIS)—
Jakarta
5. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri—
Jakarta
6. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI)--Jakarta

1.6.2 Metode Analisa Data

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan⁴². Dalam penulisan ini data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka data tersebut dioalah secara deduktif kualitatif.

Dalam hal ini digunakan metode analisa deduktif mengingat dalam hal ini

⁴² Moh Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 88

yang ditekankan adalah teori dulu baru dilakukannya penelitian.⁴³ Deduksi merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisa deduktif kualitatif ini bertujuan untuk membuat penggambaran atau deskripsi secara sistematis, empirik dan akurat mengenai fakta-fakta dalam kasus yang diteliti.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tapi logik. Penggunaan analisa kualitatif ini selain hasilnya lebih mudah dibaca juga memungkinkan bagi seorang peneliti untuk mengembangkan ide-ide baru.

1.7 Pendekatan

Yang dimaksud pendekatan (*approach*) adalah kriteria untuk memilih masalah yang hendak diteliti dan untuk menentukan data yang diperlukan untuk pembuktian dalam penelitian. Pendekatan yang diterapkan oleh seorang peneliti sangat mempengaruhi hasil penelitian, bukan hanya karena ia menentukan pemilihan dan perumusan masalah dan pengambilan data, tetapi juga karena ia menuntun peneliti dalam merumuskan hipotesis, memilih metode penelitian, serta dalam menafsirkan data.⁴⁴

Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua pendekatan yaitu, *Pendekatan Sejarah politik* dan *pendekatan ekologi*.

Menurut Charles Fisseman, pendekatan sejarah politik diasumsikan:

“ *Political history is, in the last resort, the chronological description of political facts of every kind, whether institutional or non-institutional, in the life of a state (or political society) considered separately (internal policy), or in the relations between several state (ore societies) (foreign policy and international policy)*”.⁴⁵

Di dalam pendekatan sejarah politik terdapat dua aspek yang dapat dipahami, pertama, bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang pasti. Kedua,

⁴³ Mochtar Maso,ed, *Op Cit*, hlm.81

⁴⁴ Mochtar Mas'oe'd, Analisis Sistem dan Struktural-Fungsional: Sebuah Penilaian, dalam Mochtar Mas'oe'd dan Colin M Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, hlm.106

⁴⁵ Tee Liang Gee, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1984, hlm 87

adanya kecenderungan-kecenderungan yang dapat dibaca dengan meneliti proses politik masa lalu, masa sekarang dan kemudian mencoba untuk memproyeksikan kecenderungan tersebut ke masa depan. Dengan kata lain proses sejarah merupakan kejadian yang selalu berubah dan mempunyai proyeksi sendiri menuju masa depan dengan peristiwa yang berbeda.

Dan dalam konteks ini, pendekatan sejarah politik cukup berpretensi untuk melihat fenomena gerakan politik hijau yang termanifestasi dalam Partai hijau, karena jelas fenomena politik hijau sendiri tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan perpolitikan yang ada di Eropa secara umum dan khususnya di Jerman sendiri.

Sementara pendekatan ekologi sangat diperlukan dalam menganalisis gerakan politik hijau, karena objek materialnya jelas permasalahan lingkungan atau krisis ekologi sendiri.

Menurut Fuad Amsyari, pendekatan ekologi diartikan sebagai suatu pola berpikir dalam usaha memecahkan suatu permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan dasar-dasar prinsip ilmu ekologi.⁴⁶ Dengan demikian, tindakan manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip ekologi diharapkan mampu menjamin keberlanjutan daya dukung alam bagi eksistensi manusia di masa mendatang.

⁴⁶Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 64



BAB II

GERAKAN POLITIK HIJAU SEBAGAI POLITIK BARU

2.1 Gambaran Umum Politik Hijau

2.1.1 Lingkungan Hidup (Ekologi) sebagai Isu Global

Akhir abad ke 20, masalah lingkungan hidup menjadi isu yang utama. Ditandai dari hasil penelitian dari beberapa lembaga pemerhati lingkungan hidup yang mengejutkan berbagai lapisan umat di muka bumi. Masyarakat bumi dihadapkan pada serangkaian masalah-masalah global yang membahayakan biosfer dan kehidupan manusia dalam bentuk-bentuk yang sangat mengejutkan yang dalam waktu dekat akan segera menjadi tak dapat dikembalikan lagi (*irreversible*).¹

Krisis lingkungan hidup cukup membahayakan bagi keberlangsungan ekologi di muka bumi. dan sebagian besar permasalahan tersebut bersifat global dan mengancam kehidupan bumi. masalah serius yang bersifat regional adalah hujan asam, dan yang bersifat global adalah pemanasan global, kepunahan jenis, dan kerusakan lapisan ozon.

Lapisan Ozon menipis dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dalam tahun 1985 sebuah tim peneliti Inggris di daerah kutub selatan Antartika menemukan penurunan yang drastis kadar ozon dalam stratosfer pada permulaan musim semi. Kejadian ini kemudian ditemukan pula di daerah kutub utara Afrika. Ada bukti yang kuat yang menunjukkan penurunan itu disebabkan karena rusaknya ozon oleh golongan zat kimia yang disebut *klorofluorokarbon*(KFK). KFK banyak digunakan dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Berkurangnya lapisan ozon ini, akan menyebabkan sinar ultraviolet matahari tidak tersaring lagi, dan langsung menuju permukaan bumi, hal ini berisiko terjangkitnya penyakit kanker kulit, katarak dan melemahnya sistem kekebalan tubuh.²

¹ Salah Satu sumber bisa dilihat pada , *State of The World*, laporan tahunan yang di terbitkan kurang lebh 27 bahasa di dunia, oleh Worldwatch Instituted yang bermarkas di Washington,DC, sebuah lembaga nirlaba yang concern terhadap permasalahan lingkungan hidup.

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm 16

Timbulnya pemanasan global dan kemarau panjang sebagai akibat dari efek rumah kaca(ERK)³. Hal ini menimbulkan dampak pada perubahan curah hujan, naiknya frekuensi dan intensitas badai. Kemudian hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran udara oleh bahan bakar fosil, yaitu gas bumi, minyak bumi dan batu bara. Akibatnya menyebabkan kematian banyak organisme air di sungai dan danau. Beribu danau di Amerika Utara dan Eropa telah mengalami kematian. Di Eropa sekitar 50 juta hektar hutan telah mengalami kerusakan oleh hujan asam.⁴

Krisis Lingkungan hidup diimbangi dengan kenyataan daftar kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, bahwa satu dari tiga anak kekurangan gizi, sekitar 1,2 miliar manusia tidak mendapatkan air bersih yang aman untuk diminum. Hampir 3 juta anak meninggal setiap tahun karena menderita penyakit yang dapat disembuhkan dan dicegah dengan imunisasi. Satu juta wanita meninggal setiap tahunnya karena masalah reproduksi yang dapat dicegah, permasalahan ini lebih banyak melanda negara-negara sedang berkembang.⁵

Permasalahan lingkungan hidup mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan dalam dasawarsa 1950-an, dan 1960-an, dan memuncak dalam dasawarsa 1970-an. Berawal dari tulisan seorang ahli biologi Amerika Serikat, Rachel Carson pada tahun 1962 dalam *Silent Spring*:

Ketika manusia beranjak maju guna mencapai tujuannya yakni menaklukkan alam, ia telah menoreh catatan-catatan mengenai kerusakan mengerikan yang mengarah bukan saja pada bumi tempat ia tinggal, tetapi juga pada sesama makhluk hidup lainnya. Sejarah abad-abad belakangan ini, memiliki lembaran-lembaran gelap –pembantaian bison besar-besaran di wilayah barat Amerika, pembunuhan dalam jumlah besar burung pantai oleh para pemburu lantaran permintaan pasar....., kemudian berlanjut pada jenis burung-burung lain, binatang mamalia, ikan-ikan, dan semua jenis hewan liar dengan penyemprotan

³ ERK, terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas, yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi, gas ini disebut gas rumah kaca. Dengan penyerapan itu sinar panas terperangkap sehingga naiknya suhu permukaan bumi.

⁴ *Op Cit*, Gito Soemarwoto hal. 14-15

⁵ *Op Cit*, Jangan Biarkan Bumi Merana, hlm. 4

bahan kimia secara serampangan pada permukaan tanah....., Pertanyaan kita adalah: apakah ada peradaban yang dapat melancarkan perang semacam itu terhadap kehidupan tanpa menghancurkan dirinya sendiri, dan tanpa kehilangan hak untuk disebut beradab?⁶

Buku ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kesadaran manusia akan lingkungan hidup. Singkatnya isu ini tidak hanya menjadi pembahasan dalam tingkatan lokal ataupun regional tapi sudah menjadi permasalahan dan isu global di dunia, baik secara ekologi, politik maupun ekonomi. Permasalahan lingkungan hidup global tersebut dibutuhkan solusi secara global pula. Dalam artian bahwa dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik ditingkat lokal, regional maupun internasional. Keprihatinan ini tidak terbatas dari kalangan ilmuwan, orang-orang dimana pun risau mengenai kemerosotan planet yang terus berlanjut tersebut.

Bahkan selama tahun 1970-an, ilmu soial pun mengalami perkembangan paradigma yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ilmuwan politik Karl Deutsch misalnya mulai menganalisis tentang *ekopolitik*: yaitu tantangan politik yang diakibatkan oleh meningkatnya hubungan timbal balik antara kegiatan ekonomi manusia dan lingkungan (Deutsch1977). Tantangan ini tidak hanya merupakan keprihatinan negara bangsa. Ketergantungan satu sama lain dalam hal lingkungan melampaui batas politik, karena itu meningkatkan arti penting para pelaku dan lembaga internasional.⁷

Puncaknya, pada 5-16 Juni 1972, untuk pertamakalinya diadakan konferensi lingkungan hidup oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, dihadiri oleh 1200 delegasi dari 114 negara. Konferensi ini menghasilkan tiga poin penting, yaitu, deklarasi Stockholm yang terdiri dari 26 prinsip yang bersifat tidak mengikat negara-negara anggota dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kedua, Rencana Program Kerja (*action-plan*)—terdiri dari 109 rekomendasi yang mencakup penanganan masalah manusia, manajemen sumber daya, pembangunan dan dimensi soial dampaknya terhadap

⁶ *Op Cit*, Revolusi Hijau, hlm 3

⁷ Bjorn Hettre, Teori Pembangunan dan Tiga Dunia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 329

degradasi lingkungan pada lingkungan. Ketiga dibentuknya organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menangani permasalahan lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environemtal Programme*(UNEP), bermarkas di Nairobi, Kenya. Disamping itu juga menetapkan hari pertama konferensi ini, yaitu 5 Juni sebagai hari Lingkungan Hidup Sedunia.⁸

Jadi, ekologi juga memberikan konteks baru bagi hubungan antar bangsa, yang disebut oleh Dennis Pirrages sebagai “ekopolitik global” (Pirages 1978). Kelangkaan baru, atau permasalahan akhir dunia merupakan isu baru dalam politik dunia. Isu ini menggarisbawahi kesatuan dunia dari sudut pandang ekologi. Ini juga mengakibatkan kecenderungan normatif dalam teori Hubungan Internasional: “yang ada” dari politik kekuasaan digantikan oleh ‘yang seharusnya” dari ekopolitik. Selain itu kini ada berbagai macam aktor di luar aktor negara, yang menciptakan substansi politik dunia yang cenderung jauh lebih besar daripada ‘politik tingkat tinggi” keamanan nasional.⁹

Laporan komisi Brundtland tahun 1987 dengan judul *Our common Future* menjadi tolak ukur yang penting dalam diskusi-diskusi internasional tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam laporan *World Commision on Environment and Development*, di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Norwegia, Nyonya Gro Harlem Brundtland, telah diletakan dasar untuk KTT bumi 1992 (earth summit '92). Keharusan untuk mengambil langkah-langkah fundamental ke arah pembangunan berkelanjutan, karena bagi semua negara hal itu satu-satunya metode untuk menjamin baik keamanan ekonomi maupun ekologi.¹⁰

Pada paroh kedua dekade ini memberikan bukti bahwa telah terjadi pergeseran yang fundamental dalam opini umum dunia mengenai isu-isu lingkungan hidup, termasuk munculnya suatu kesadaran baru lingkungan hidup di Uni Soviet. Sebuah dewan Amerika Serikat yang sebelumnya menetapkan standar

⁸ Lorraine Elliott, *The Global Politics of Environment*, Maccmillan Press Ltd, London, 1998, hal.12

⁹ *Op Cit*, Bjorn Hettre, hal 329

¹⁰ Dr. Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan (Tinjauan Antropologis)*,ustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000 hal. 25-26

untuk menolak isu-isu lingkungan hidup, pada tahun 1986 memperkenalkan suatu program pelestarian suaka alam yang menjelang tahun 1987 telah membantu mengurangi hilangnya sebanyak 460 juta pohon setahun.

Bank Dunia, sebagian karena tekanan dari LSM-LSM, mulai memberikan pelayanan yang lebih dari sekedar pemerah bibir terhadap isu-isu lingkungan hidup. Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengumumkan prakarsa baru mengenai lingkungan hidup. Makin banyak LSM di seluruh dunia mulai mengakui dan bertindak berdasarkan kenyataan bahwa kerusakan lingkungan hidup semakin menambah beban yang harus ditanggung golongan miskin yang sudah tanpa harapan sebelumnya.¹¹

Setelah dua dasawarsa konferensi Stockholm, Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil diadakan kembali konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) dikenal dengan KTT Bumi. dihadiri kurang lebih 35.000 orang dan 9000 wartawan baik utusan negara dan pemerintahan maupun Non Governmental Organization (NGO) dan yang dibicarakan adalah masalah keselamatan bumi. pada KTT kali ini, menghasilkan 1) Deklarasi Rio, 2) konvensi tentang perubahan iklim, 3) Konvensi tentang Keanekaan Hayati, 4) Prinsip tentang Hutan dan 5) Agenda 21.

Deklarasi Rio mengandung prinsip-prinsip kesepakatan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa tujuan KTT Bumi adalah untuk mengembangkan kemitraan global baru yang adil antar negara, dengan sektor kunci masyarakat maupun perorangan. Prinsip pertama adalah menyatakan bahwa manusia adalah pusat perhatian pembangunan berkelanjutan, kemudian secara fundamental memusatkan perhatian pada perlindungan ekosistem bumi. ini jelas menunjukkan deklarasi Rio bersifat antroposentris.

Kesinambungan (kelestarian) pada dasarnya adalah prinsip yang juga muncul dalam teori pembangunan sebagai konsekuensi keprihatinan lingkungan sejak awal 1970-an, prinsip ini secara khusus berhubungan erat dari ide-ide

¹¹ David C. Korten, *Memuju Abad 21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Sopor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 44-45

Lester Brown dan *Worldwatch Institute*, pesan utama yang dibawanya adalah bahwa tata ekonomi internasional lama atau pun baru tak satupun akan bertahan jika sistem biologis alam yang menopang ekonomi global tidak dipelihara (Brown 1981, 1991).

Sementara gagasan mengenai *ecodevelopment* yang sekarang lebih populer disebut Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*), sudah lahir dalam konferensi di Stockholm tahun 1972, pencetusnya pada waktu itu adalah Maurice Strong, dan kemudian konsep tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ignacy Sack, yang mengemukakan definisi ini:

Ecodevelopment adalah suatu gaya pembangunan yang setiap kawasan ekologi membutuhkan solusi khusus bagi masalah tertentu di kawasan tersebut berdasarkan data kultural dan data ekologi serta kebutuhan jangka panjang dan mendesak, karena itu pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu dan penyesuaian diri terhadap lingkungan memainkan peranan penting (Sachs 1974:9). Strategi pembangunan menurut perspektif ini harus seefisien mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada di kawasan tersebut, dengan cara yang memelihara sistem ekologis (batas luar). Namun, pemanfaatan yang efisien juga memperbolehkan pertukaran, asalkan prinsip kesinambungan terpenuhi.¹²

Prinsip tentang Hutan mencakup semua jenis hutan, yaitu hutan Boreal (hutan di daerah utara), hutan iklim sedang, hutan tropik, dan hutan Austral (hutan di daerah Selatan). Dalam prinsip diakui fungsi ganda hutan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, kultural dan spiritual generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian walaupun diakui hak setiap negara untuk menggunakan hutan sebagai sumber daya untuk pembangunannya, namun pembangunan itu haruslah dilakukan dengan berkelanjutan dengan mengingat kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam prinsip tentang Hutan diakui perlunya alih teknologi dengan persyaratan yang menguntungkan. Prinsip lainnya ialah perlunya dikembangkan ekonomi dan

¹² Ibid, hlm. 335-336

perdagangan internasional yang terbuka dan dilarangnya tindakan unilateral dengan dalih lingkungan.¹³

Kemudian Agenda 21, yang terdiri dari 40 bab, memuat daftar panjang tentang program kerja yang perlu dilakukan untuk dapat terlaksananya persetujuan yang dicapai di Rio. Walaupun kesepakatan Rio ditandatangani lebih dari seratus negara di dunia, akan tetapi penerapannya cukup mengalami kendala, pertama cukup rasional, karena kesepakatan ini sifatnya tidak mengikat (*non-binding agreement*) negara anggota, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi negara-negara tersebut untuk melanggarnya, karena masing-masing pihak berusaha menginterpretasikan persetujuan tersebut sesuai dengan persepsi kepentingan nasional masing-masing negara. Seperti contoh isu tentang hutan, walaupun yang rusak adalah hutan tropik, tidak lah adil apabila yang dikenakan ekolabel, yaitu sertifikat bahwa sebuah produk kayu berasal dari hutan yang dikelola dengan berkelanjutan (*sustainable management*), hanyalah produk kayu dari hutan tropik, karena di Amerika Serikat, Kanada dan Rusia pembalakan (*logging*) juga banyak dilakukan dengan cara merusak lingkungan. Jadi seharusnya semua produk kayu dikenakan ekolabel, tanpa memilah jenis asal produk tersebut.¹⁴

2.2 Gerakan Aksi Pecinta Lingkungan Hidup

Perhatian masyarakat dunia akan masalah lingkungan hidup terus berkembang dari tahun 1950-an, bentuk keprihatinan ini diwujudkan dalam bentuk solidaritas kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, perusahaan-perusahaan industri, keamanan nasional dan lain sebagainya yang dianggap akan membahayakan keberlangsungan ekologi.

Buku *Silent Spring*, yang ditulis oleh Rachel Carson, ikut mempengaruhi munculnya gerakan-gerakan pecinta lingkungan hidup yang tidak hanya ada di Amerika tapi juga marak di Eropa, Asia dan negara-negara lainnya. Dari sini gerakan lingkungan hidup cukup aktif, vokal, merakyat dan cukup berpengaruh dalam menanggapi permasalahan lingkungan.

¹³ *Op Cit*, Lorraine Elliott hal. 20-25 lihat juga pada *Op Cit*, Lingkungan Hidup dan Pembangunan hlm. 20-21

¹⁴ *Ibid*

Untuk dasawarsa 1960-an, banyak bermunculan generasi-generasi pemrotes yang membentuk organisasi-organisasi gerakan lingkungan. walaupun mereka merupakan kelompok minoritas, akan tetapi generasi ini dapat menggaung dengan sangat kuat menembus masyarakat karena asumsi-asumsinya sendiri begitu menantang, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam beberapa hal merupakan ketakutan dan kecemasan kalangan mayoritas. Gerakan yang mereka lakukan bentuknya bermacam-macam, tergantung dari platform masing-masing gerakan. Apakah itu dilakukan dengan cara melakukan aksi politik, berupa aksi duduk, demonstrasi, pawai protes, bahkan melakukan pemboikotan terhadap objek kebijakan yang mereka protes.

Dalam hal ini berbagai elemen dalam suatu masyarakat memainkan peranan penting, sebut saja peranan dari masyarakat ilmiah dan organisasi non pemerintah—dengan bantuan kaum muda memiliki peran sedari awalnya. Kelompok ini telah membangkitkan kepedulian masyarakat dan berbagai tekanan politis yang mendorong pemerintah untuk bertindak. Bahkan pada KTT Bumi seperti di Stockholm mereka memainkan peran penting. Kelompok-kelompok ini mengidentifikasi resiko, menganalisis dampak lingkungan, dan merancang serta mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

Sebut saja *Green Peace*—kelompok aksi pecinta lingkungan hidup yang dibentuk 1971 sebagai kritik terhadap uji coba nuklir, kemudian melebar dengan kampanye “Selamatkan Ikan Paus”, sampai dasawarsa terakhir tetap intens melakukan kampanye sampai masalah hutan tropis dan masalah limbah industri beracun. Dan terakhir sangat menentang kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan invasi ke Irak. Mereka melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal perang AS, walaupun aksi mereka tidak mampu mencegah keinginan Amerika untuk tetap melakukan penyerangan.

Disamping itu, terdapat suatu jaringan global bagi pertukaran informasi dan tindakan bersama yang diberikan melalui *Environment Liaison Centre* (ELC), yang berpusat di Nairobi. ELC ini beranggotakan lebih dari 230 organisasi non

pemerintah dari negara-negara berkembang, dan berhubungan dengan 7000 organisasi lainnya.¹⁵

Di Kenya ada sebuah gerakan yang menamakan diri, Gerakan Sabuk Hijau (Greenbelt Movement), yang disponsori Dewan Wanita Nasional cukup mampu untuk memobilisasi lebih dari 15 ribu petani dan setengah juta murid sekolah untuk menanam lebih dari 2 juta pohon. Perempuan Afrika lain tengah mengikuti jejak mereka. Nelayan di Negara bagian Kerala di India telah bersatu untuk melindungi sumber daya ikan pantai mereka. Suku asli Amerika di dekat wilayah Willapa Bay, telah membentuk aliansi pecinta lingkungan, penebang kayu, pengusaha lokal, pemerintah, nelayan, dsb untuk meregenerasi ekosistem mereka yang dulunya begitu dinamis dan beragam sebagai landasan ekonomi lokal yang makmur, terdiversifikasi dan berkelanjutan.¹⁶

Bahkan gerakan aksi pecinta lingkungan ini, tidak hanya muncul di negara-negara demokrasi liberal seperti di Eropa, Amerika. Namun di negara sosialis komunis seperti Cina pun marak bermunculan gerakan-gerakan pemrotes terhadap kebijakan lingkungan di negaranya. Wartawan Dai Qing, merupakan penentang yang berani dan terus terang atas pembangunan Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges) di Cina yang mengancam akan menggusur 1,2 juta jiwa, membanjiri 10.000 hektar lahan pertanian yang paling subur di negara ini, membanjiri bentangan lembah yang luas, dan menghancurkan habitat spesies yang terancam kepunahan, pernyataan mereka, "Ungkapan puncak martabat kita dapat diringkaskan dalam satu kata tidak!". Walaupun Cina dikenal sebagai negara otoritarian komunis, keberanian dari para aktivis lingkungan cukup membangkitkan perhatian publik terhadap permasalahan ekologi di negara ini.

Hal yang sama juga terjadi di negara eks Komunis Uni Soviet, kelompok pecinta lingkungan menuntut tanggung jawab pemerintah atas meluasnya degradasi lingkungan dan membangun gerakan yang membantu meletupkan transformasi demokratik keluasaan ini. Kelompok ini kemudian beraliansi di

¹⁵ Hari Depan Kita Bersama: Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development), Gramedia, Jakarta, 1988, hal 447-449

¹⁶ Lester R. Brown, ect, Dunia di Tepi Jurang Kehancuran, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 198

bawah Socio Ecological Union, yang secara politik kuat untuk mewujudkan rencana lingkungan dan Hak Azasi Manusia yang luas.

Di India, Tasmania, Kanada, Thailand, Hongaria, dan sebagainya, mengikuti jejak Dai Qing mengatakan tidak pada proyek bendungan yang mengancam rumah, mata pencarian dan hutan mereka. Perempuan dari gerakan Chipko di India, yang salah satunya di motori oleh ekofeminisme Vandana Shiva, melingkari hutan yang terancam dari perusahaan penebangan kayu.¹⁷

Satu gerakan sosial di Swedia, yang dikenal dengan *Natural Step*, tengah membangun konsensus nasional menyangkut komitmen untuk menjadikan Swedia model kelestarian dengan mencapai 100 % daur ulang logam, meniadakan pembuangan bahan-bahan yang tidak dapat di uraikan secara alamiah ke dalam lingkungan, memelihara keanekaan hayati dan mengurangi penggunaan energi sampai ke tingkat yang mampu di serap lingkungan. Sekitar 10.000 profesional, eksekutif bisnis, petani, mahasiswa, dan pejabat pemerintah aktif dalam enam belas jaringan kerja khusus mengembangkan dan melaksanakan rencana-rencana aksi. Empat puluh sembilan pemerintah lokal, anggota *Swedish Farmer Federation*, dan 22 perusahaan besar Swedia kini bekerja untuk menyelaraskan diri mereka dengan sasaran ini.¹⁸

Untuk di negara-negara Eropa lainnya, seperti Perancis, Jerman, Inggris dan lain-lain, gerakan pecinta lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Non Governmental Organizations). Tapi mereka berusaha masuk dalam ranah-arah politik dan menjadi salah satu *stake holders* dalam menentukan kebijakan di tubuh Pemerintahan.

Eropa terkenal sebagai sentra dari kelompok pecinta lingkungan, bahkan gerakan politik Hijau atau Partai Hijau dalam skala sempit, embrionya berasal di daratan benua ini. Ide-ide untuk penyelamatan nasib ekologi diperjuangkan dengan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk Perancis di kenal dengan kevakalan kelompok Hijau yang menamakan diri dengan Le Verts,

¹⁷ David C. Korten, *When Corporation Rule the World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*, Professional Books, Jakarta, 1997, hal. 430-436

¹⁸ Ibid

menjadi kekuatan penekan bagi partai-partai yang cenderung beretolak belakang dengan ide-ide mereka. Kelompok ini terkenal dengan style mereka yang hippies, radikal bahkan tidak kenal kompromi dengan segala bentuk kebijakan yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologi yang mereka pahami. karena mereka sendiri jelas berasal dari aliran-aliran gerakan sayap kiri sebelumnya seperti anarkis, ataupun sosialis marxisme. Tapi walaupun seperti itu Les Verts tetap tidak di anggap enteng oleh kelompok lainnya, terbukti dengan keterlibatan mereka di tubuh Pemerintahan, dimana jabatan Menteri Lingkungan Hidup di pegang oleh Dominique Voynet yang merupakan salah satu pentolan *ecofeminisme* dari gerakan ini.

2.3 Krisis Kapitalisme dan Sosialisme

Teori kapitalisme maupun komunisme mengakui satu kebenaran dasar yang diungkapkan dengan pepatah populer, “Dia yang memiliki penggaris emas.” Teori komunis secara eksplisit menuntut kepemilikan sarana produksi oleh pekerja. Adam Smith secara implisit membuat asumsi yang sama dalam visinya tentang ekonomi pasar yang ideal yang terdiri dari petani dan tukang kecil—suatu situasi dimana pemilik, manajer, dan pekerja biasanya adalah satu orang yang sama. Baik komunisme maupun kapitalisme telah gagal mewujudkan ideal mereka dalam praktik. Komunis menyerahkan hak kepemilikan ke tangan negara dan mengingkari hak rakyat untuk menuntut tanggung jawab negara dalam menegakkan hak tersebut. Kapitalisme terus menerus mengalihkan hak kepemilikan ke tangan korporasi-korporasi dan institusi-institusi keuangan raksasa yang kebanyakan tidak bertanggung jawab bahkan kepada para pemiliknya.¹⁹

Walhasil, seperti yang bisa dilihat, rejim komunisme seperti Uni Soviet telah menjadi diktator bagi rakyatnya. Sementara kapitalisme semakin merajalela di tangan-tangan para korporat industrialis yang terus bercokol dan meminggirkan

¹⁹ *Op Cit*, David C. Korten, hal. 454

komunitas periperal seperti negara-negara dunia ketiga, yang baru merdeka pasca kekuasaan imperialisme.

Di “Dunia Pertama” kapitalisme industri, pada level efisiensi dan rasionalitas, terjadi krisis manajemen kapitalis (Keynesian), yang telah menimbulkan kebangkitan ideologi fundamentalis, yang berpandangan bahwa seharusnya tidak ada manajemen negara sama sekali: pasar harus mengambil keputusan tentang investasi, produksi dan konsumsi. Ini mengancam sistem kesejahteraan yang sejauh ini merupakan instrumen utama bagi penciptaan legitimasi politik. Di “Dunia Kedua”, dimana proyek sosialisme membangun dilaksanakan, terjadi krisis legitimasi, karena standar hidup menurun, atau paling sedikit, tidak meningkat dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan para konsumeris, yang dengan tidak bijaksana dipilih oleh proyek sosialis sebagai basis legitimasinya. Sementara di “Dunia Ketiga”, aparat negara ada di tangan para elit yang berorientasi Barat, dan pada kebanyakan kasus tidak diciptakan legitimasi apapun, sementara pembangunan yang itu masih berlangsung. Dalam krisis utang, pangan, dan etnis sekarang ini, sulit untuk melihat bagaimana prospek pembangunan bangsa (*nation building*) dapat lebih cerah di masa mendatang.²⁰

Dan dalam konteks ekologi, dua teori besar ini lahir tanpa melihat nasib akan ekologi, sehingga penafisiran yang muncul hanya terfokus pada manusia, sektor produksi, modal tanpa melihat resiko-resiko ekologis yang akan di tanggung, dan hasilnya jelas permasalahan ekologi yang cukup akut dan membahayakan semua elemen yang tidak hanya terdiri dari manusia, tapi semua sistem dalam satu kesatuan ekologi tersebut ikut terancam.

Sosialisme yang awalnya sebagai kumpulan pemikiran yang menentang individualisme. Sebelum memiliki arti yang sangat spesifik dengan bangkitnya Uni Soviet, komunisme bertumpang tindih dengan sosialisme. Dan masing-masing berupaya mempertahankan keyakinan mereka bahwa yang penting dan mestinya di dahulukan adalah perkara-perkara sosial atau komunal, dan bukan perkara individual.

²⁰ *Op Cit*, Bjorn Hettre, hal. 49

Sosialisme pertama-tama merupakan impuls filosofis dan etis .kemudian Mark melengkapi sosialisme dengan teori ekonomi yang rumit dan terperinci.ia juga meneptakan sosialisme dalam konteks yang dilihat dari sudut pandang sejarah secara menyeluruh, posisi dasar Marx ini dipakai oleh penganut paham sosialis, tak peduli betapa tajamnya perbedaan di antara mereka.

Bagi Marx, berdiri atau runtuhnya sosialisme bergantung pada kapasitasnya untuk mewujudkan masyarakat yang akan menghasilkan kekayaan lebih besar daripada yang dihasilkan oleh kapitalisme,dan yang akan menyebarkan kekayaan itu secara lebih merata. Jika sekarang sosialisme mati,itu persis karena klaim-klaim tersebut ambruk. Kita bisa melihat bagaimana Uni Soviet tidak bisa melampui Amerika , tetapi secara dramatis justru ambruk di belakangnya. Teori ekonomi sosialisme tidak memadai serta meremehkan kemampuan kapitalisme untuk berinovasi, beradaptasi,dan mendorong produktifitas. Kelemahan-kelemahan sosialisme ini menjadi semakin terbuka dengan adanya proses globalisasi dan perubahan teknologi yang semakin intens sejak 1970-an.²¹

Aliran marxisme menganggap krisis dalam cara produksi kapitalis sebagai fenomena ekonomi yang berulang kali terjadi dalam pola siklis. Selama krisis kapitalis, akan terjadi penyesuaian struktural dalam sistem yang produktif, yang memuluskan jalan bagi periode pengembangan baru, sampai dinamika otonom dalam kapitalisme kehabisan dayanya. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan krisis yang memuluskan jalan bagi sosialisme. Dalam tradisi ini, fenomena krisis ditempatkan dalam sistem produksi, atau lebih khusus lagi dalam kontradiksi yang tak terelakkan antara tenaga produktif dan relasi sosial(Mattick 1981).²²

Analisis Marx tentang masyarakat dinyatakan dalam penafsiran ekonominya atas sejarah. Marx tidak mengklaim bahwa hanya faktor ekonomi yang menciptakna sejarah, tetapi menyatakan bahwa faktor ini yang terpenting sebagai dasar atau landasan untuk membangun *suprastruktur* kebudayaan. Akhirnya menurut Marx, dalam masyarkat industri modern dua ratus tahun

²¹ *Op Cit*, Anthony Giddens, hal. 4

²² *Op Cit*, Bjorn Hettre, hal. 22

terakhir ini, kepemilikan alat-alat produksi industri menjadi kunci utama. Kaum kapitalis tidak hanya menentukan tujuan ekonomi dari masyarakat, tapi juga secara politis menguasainya serta menetapkan ukuran dan nilai-nilai sosial.²³

Analisis Marx tentang masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang berada di dalamnya adalah suatu komentar terhadap dan pengutukan bagi kapitalisme industri, dalam pengembangan industri banyak keburukan yang inheren. Marx mengasumsikan bahwa kapitalis membayar hanya membayar buruh untuk sekedar mempertahankan hidup saja. Lebih lanjut Marx yakin bahwa keuntungan kapitalis di ambil dari jumlah yang di produksi di atas upah yang dibayarkan pada buruh. Oleh karena itu, kritikan utama Marx tentang ekonomi berkisar pada eksploitasi mayoritas, yaitu kelas proletar atau buruh oleh minoritas, yakni borjuis atau kapitalis.²⁴

Penafisiran ekonomi Marx mengalami cacat yang juga menimpa semua teori yang berlagak dapat menawarkan kunci induk terhadap sejarah. Cacat tersebut adalah generalisasi dan penyederhanaan yang berlebih-lebihan. Kalau suatu masalah dijelaskan dan diterangkan hanya dengan menggunakan satu faktor (apakah itu pahlawan, agama, perang, iklim, dsb). padahal semestinya memerlukan penggunaan banyak faktor, maka bebannya semakin berat. Sepanjang sejarah tidak pernah ada faktor tunggal yang berpengaruh dominan, dan dalam keadaan tertentu untuk mengetahui faktor yang paling penting dibutuhkan suatu penelitian yang empiris.²⁵

Lebih lanjut, menurut Marx, kapitalisme akan diruntuhkan bukan oleh komplotan-komplotan subversif, akan tetapi oleh hukum-hukum perkembangan dan perubahan sosial yang tidak kenal kompromi. Semakin berhasil kapitalisme, maka semakin tinggi pula tingkat pengorganisasian perusahaan kapitalis dalam unit-unit berskala besar. Sebagai akibatnya, para buruh dalam jumlah yang besar merghimpun diri di dalam asosiasi yang tetap dan erat serta saling memperkokoh kedudukannya sebagai kelompok proletar. Sempelnya Marx menambahkan bahwa,

²³ William Ebenstein, etc, *Isme-isme dewasa ini*, Erlangga, Jakarta, 1994, hal 2-4

²⁴ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987

²⁵ *Ibid*

seandainya kelas kapitalis mengendalikan politik, dua musuh kelas buruh—modal dan pemerintahan—akan bergabung menjadi satu.²⁶

Akan tetapi ramalan Marx malah keliru, fakta sejarah memperlihatkan bahwa kapitalisme malah tumbuh dan berkembang tanpa tanding. Marx mengabaikan atau meremehkan peranan kemajuan teknologi. Kapitalisme senantiasa menghasilkan tidak hanya lebih banyak modal tetapi juga modal yang semakin efisien. Sementara inovasi teknologi memperkuat permintaan di pasar modal, karena teknologi baru membutuhkan investasi modal yang besar. Walhasil persepsi Marx semakin jauh dari realita dalam menjawab tantangan kapitalisme yang terus tumbuh pesat.

Disamping itu anggapan Marx bahwa industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan jalan utama menuju pembebasan manusia dari penderitaan dan kebodohan, tetapi pembebasan itu hanya dapat dicapai jika alat-alat produksi dimiliki dan ditangani oleh negara. Marx berpikir bahwa industrialisasi sebagai proses teknologi dan sosial dapat sepenuhnya menguntungkan jika kepemilikan alat-alat produksi secara perorangan diganti menjadi kepemilikan oleh negara melalui revolusi komunis seperti yang di cantumkan dalam karya *Communist Manifesto*.²⁷ Namun anggapan Marx ini harus menerima imbas yang lebih parah, dimana faktor di luar ekonomi tersebut berimbas pada kerusakan-kerusakan lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan industri.

Dalam konteks ekologi ini Marx kembali di Kritik, dimana Marx hidup pada zaman dimana perusahaan industri masih dalam skala kecil. Sehingga masalah lingkungan yang berkaitan dengan masalah konservasi sumber-sumber daya belum dirasakan pentingnya pada zaman Marx. Dan karena itu hanya sedikit pedoman-pedoman yang dapat ditemukan pada tulisan-tulisan Marx. Sampai sekarang, penguasaan dan eksploitasi alam masih dianggap sebagai pertanda kemajuan baik di negara kapitalis maupun komunis. Sementara tuntutan ekologis, yaitu tuntutan manusia terhadap lingkungan alam melalui pengalihan sumber daya dan pemborosanya adalah beberapa kali lebih penting daripada tingkat

²⁶ Jon Elster, *Karl Marx; Marxisme-Analisis Kritis*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2010, hal. 202

²⁷ ibid hal 18-19

pertumbuhan ekonomi. Hasilnya muncul ketidak seimbangan antara dua tuntutan yang dibutuhkan oleh keberlangsungan kehidupan manusia.

2.4 Dari *New Left*, Anarkisme dan Feminisme ke Politik Hijau

Sejalan dengan isu ekologi yang marak pada dasawarsa 60-an, juga diiringi dengan gerakan-gerakan kiri radikal yang mulai jenuh dengan ekspansi Kapitalisme plus Markantilisme di berbagai negara di dunia. Kekecewaan mereka terhadap sistem yang di dominasi oleh liberalisme kapitalisme diiringi dengan ketidak mampuan ideologi kiri seperti Sosialis marxist untuk menjawab tantangan zaman. Disamping itu ditambah dengan munculnya kediktatoran di negara manifesto komunis Uni Soviet. Telah menimbulkan kekecewaan di kalangan aktivis sayap kiri, mulai dari, Neo Marxist, *New left*, feminisme bahkan sampai anarkisme(dalam hal ini bukan anarkisme seperti yang diasumsikan dalam kamus militer).

New Left(Kiri Baru)

Gerakan kiri baru awalnya lahir di Amerika Serikat pada dekade 1960-an dan cepat berkembang ke negara-negara di Barat lainnya. Tidak seperti Hipster/Beatniks²⁸, gerakan ini percaya kepada kebebasan dan demokrasi. Gerakan ini memiliki dampak besar terhadap pemikiran generasi yang berusia belasan dan 20 tahunan pada tahun 1960-an dan 70-an. Istilah ini digunakan pertama kali oleh sekelompok Marxis Liberal yang terpusat sekitar *New Left Review*(Tinjauan Kiri

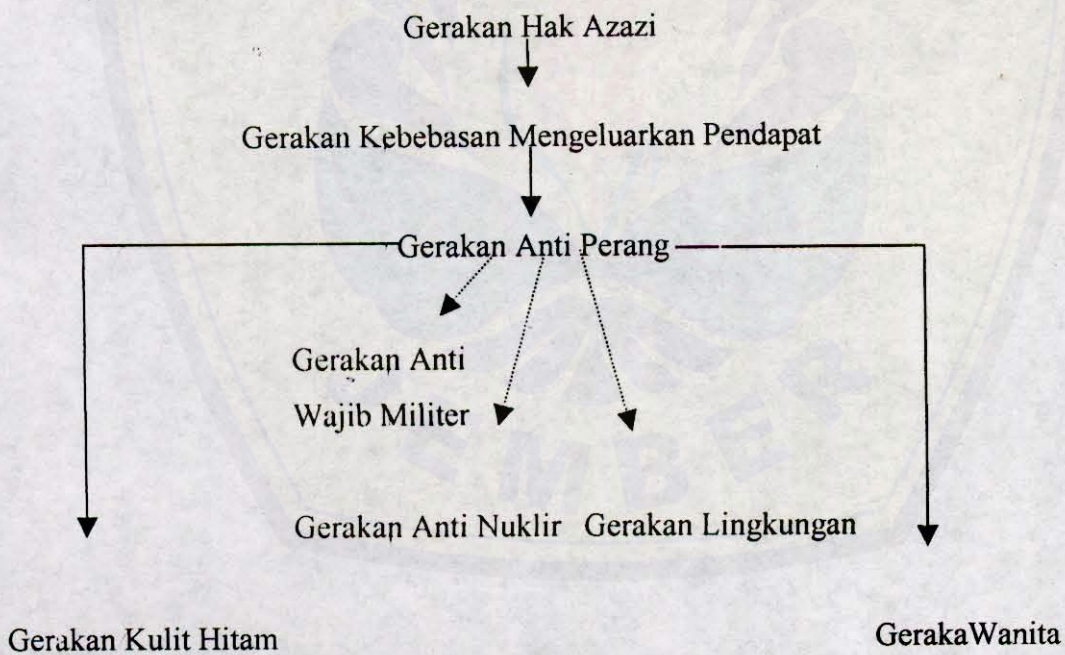
²⁸ Hipster/Beatniks merupakan aliran gerakan radikal yang muncul pada generasi yang terpukul dan frustrasi. Seperti gambaran Massimo Teodori yaitu, " penolakan masyarakat industri beserta banyak penyimpangannya; tanggapan irasional terhadap irasionalisme bawaan dari masyarakat yang bersangkutan; kehidupan atau komunal; penggambaran energi seksual dengan penerimaan alamiah akan perilaku baik homo, bi maupun hetero seksual; desakralisasi nilai kelompok tradisional, kerja, bendera, agama dan penghormatan musik jazz negro dan lagu-lagu rakyat; ganja; kebebasan dalam berdandan penampilan umum. Mereka adalah orang-orang yang memungguni masyarakat. Menolak akal sehat (reason) dan intelektualitas serta lebih menyukai sensasi. Oleh Norman F. Cantor, teralienasi oleh suatu dendam dan terorganisasi ke dalam alienasinya itu dengan seperangkat peraturan, satu mode pakaian, satu sikap, yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk tidak sepakat"terpaku selamanya ke dalam suatu isyarat alienasi diri yang kasar dan romantis murahan, mengasihi diri sendiri (*self pity*), kebingungan akan diri sendiri dan kebingungan dengan penuh kata.

(di kutip dari Massimo Teodori, ed., *The New Left: A Documentary History*, London, Jonathan Cape, 1969, hal.10, dalam SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal.442).

Baru) pada tahun 1959. Istilah ini kemudian digunakan dengan tepat oleh gerakan mahasiswa dunia dan media massa pada pertengahan tahun 1960-an. Kemudian digunakan untuk berbagai jenis gerakan dan individu. Dan pada tahun 1964-an, gerakan ini yang awalnya bermula di kampus-kampus Amerika Serikat menyebar ke seluruh universitas di Jerman, Perancis, Tokyo, Madrid, Roma, Warsawa dan mencapai puncaknya pada pendudukan gedung perpustakaan fakultas hukum Universitas Columbia New York tahun 1968, yang diikuti pemogokan selama dua bulan dan perkelahian antara mahasiswa dengan polisi dan pihak fakultas.²⁹

Figur 2.1

Sejarah Kiri Baru



Sumber: Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies,

Pada gambar 2.1, memperlihatkan latar belakang kiri baru di Amerika. Gerakan-gerakan ini berawal dari gerakan mahasiswa di berbagai universitas. Mereka meminta pihak Universitas lebih terbuka terhadap aktivitas politik di

²⁹ Sp. Varma, *Op Cit*, hlm.. 445

kampus, seperti yang terjadi di *University of California*, Berkeley. Hal ini beriringan dengan gerakan mahasiswa kulit hitam yang mendapat perlakuan rasis dari masyarakat kulit putih, bersamaan dengan hal ini mahasiswa kulit putih dan kulit hitam mengasosiasikan diri dalam gerakan hak azazi manusia. Gerakan ini kemudian berkembang pada gerakan perdamaian atau anti perang sebagai reaksi terhadap keterlibatan Amerika Serikat secara penuh dalam perang Vietnam. Gerakan ini juga memicu munculnya gerakan feminisme, ada beberapa alasan mengapa gerakan ini berkembang. Pertama, terdapat sifat isu tunggal dalam gerakan perdamaian yang digabungkan dengan kesadaran yang semakin meningkat oleh para wanita bahwa mereka ditekan seperti kulit hitam. Kedua, ada tindakan-tindakan pria dalam gerakan ini yang menunjukkan bahwa wanita tidak lebih beruntung daripada pria lainnya. Kemudian gerakan perdamaian terlibat dalam gerakan anti nuklir atau gerakan lingkungan.³⁰

Kiri baru sangat berhati-hati mempersepsikan diri dengan kiri lama. Kiri lama diasosiasikan dengan komunisme atau berbagai bentuk sosialisme dan pada batas tertentu kepada sindikalisme anarkis. Kiri lama, seperti yang terdapat dalam prinsip Demokrasi Sosial Klasik, memiliki prinsip seperti; keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi; Negara mendominasi masyarakat madani; Kolektivisme; Manajemen permintaan Keynesian, plus korporatisme; peran pasar yang dibatasi; ekonomi sosial atau campuran; pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal; Kesadaran ekologis yang rendah; Modernisasi Linear; Internasionalisme; dsb.³¹

Sementara Kiri Baru terkenal dengan kritiknya terhadap masyarakat kontemporer, bukan karena tujuannya. Kritikan yang paling mendasar adalah mengenai kemunafikan—ketidaksesuaian di antara kata dengan perbuatan. Para pemikir Kiri baru yakin bahwa negara Barat telah terlau materialistis, terlalu memikirkan bagaimana memperoleh benda. Orang mengidentifikasi diri dengan benda material yang dimiliki dan yakin bahwa mereka akan mendapatkan

³⁰ *Op Cit*, Lyman Tower Sargent, hal. 127-128

³¹ *Op Cit*, Anthony Giddens, hal. 8

kepuasan jika mereka memperoleh cukup harta kekayaan. Kiri baru memandang ini sebagai suatu kerugian besar, sebagai suatu degradasi.³²

Untuk itu gerakan ini berakar perasaan moral yang tulus dan murni, ditujukan untuk mengembalikan kedudukan keluhuran budi dan kemuliaan kepada pribadi dalam masyarakat. Dengan bermotifkan suatu "kemuakan terhadap kemewahan tanpa keluhuran; keinginan untuk mendapatkan keindahan dan menikmati demokrasi; lebih percaya kepada kreatifitas dari pada konsensus; harapan akan nilai-nilai kepaguyuban dalam suatu masyarakat, dan penolakan hebat terhadap birokrasi yang telah mengalami depersonalisasi; keinginan untuk mendirikan masyarakat tandingan, lembaga-lembaga yang paralel dan tidak hanya untuk diintegrasikan ke dalam lembaga yang dominan, permusuhan terhadap apa yang di bayangkan sebagai dehumanisasi dan alienasi masyarakat yang terbelenggu uang; lebih menyukai gaya interpersonal yang swadaya, terasa intens dan memanusiaikan manusia, termasuk pengungkapan dan percobaan seksual sepenuhnya.³³

Penekanan pada gerakan kiri baru adalah aspek-aspek kemanusiaan dan pembebasan dari perjuangan, kebebasan individual di pandang sebagai lebih penting dari pada struktur ekonomi dan politik. Gerakan ini percaya pada apa yang mereka sebut dengan "demokrasi partisipatif". Salah satu tawaran dari Teori Kritis Masyarakat di bawah payung "Mazhab Frankfurt" (*Die Frankfurter Schule*)-yang berawal dari kritikan Marx Horkheimer dan Theodore Adorno dalam karya mereka '*Dialektika Pencerahan*' terhadap proyek-proyek pencerahan (*enlightenment-aflarunk*), dan bersama dengan Herbert Marcuse mencoba terus menggali ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat modern sebagai produk proyek pencerahan, melontarkan kritik-kritik yang tajam terhadap masyarakat industri maju di tahun 1960-an. Terakhir ide-ide mereka ini dilanjutkan oleh Jurgen Habermas dengan teori masyarakat komunikatifnya menjadi inspirasi bagi

³² *Op Cit*, Lyman Tower Sargent, hal. 130

³³ Alwin W. Gouldner, *The Coming Crisis of western Sociology*, London, Delhi Heinemann, 1970, hal.399, dalam Sp. Varma, *Op Cit*, hal. 444

gerakan kiri baru yang dimotori oleh para mahasiswa di perguruan tinggi pada kampus-kampus di Jerman.³⁴

Gerakan Kiri Baru juga bisa dilihat pada serangkaian nilai dan tujuan-tujuan pokok yang mereka miliki, seperti;

1.) *Tindakan*, asumsi yang disadur dari pandangan eksistensialis adalah tindakan lebih penting daripada pikiran; 2) *Diri yang Otentik*, haluan kiri baru ingin mencari diri yang otentik, dan berharap mendapatkannya dalam paham kemasyarakatan, kelompok dan tindakan; 3) *Komunitas*, salah satu konsep sentral Kiri Baru, berhubungan dengan *kommune-kommune* kaum hippies, yang menunjukkan hubungan dengan cita-cita sosialisme komunal yang dijumpai dalam beberapa ideologi Dunia Ketiga. Paham ini pada dasarnya sama—dalam keduanya keluarga batih adalah yang ideal. Yang mereka inginkan adalah suatu suasana yang mirip keluarga, dimana semua saling menyumbang dan saling bebas, dalam batas-batas sumber-sumber yang ada. 4) *Persamaan*, Kiri Baru memandang persamaan hak ekonomi sebagai suatu mekanisme tunggal yang penting untuk mencapai persamaan kedudukan dalam politik dan hukum. 5) *Kebebasan*, komunitas dan persamaan harus dilihat dalam kaitannya dengan penekanan pada kebebasan individu. Tidak ada paksaan untuk berpartisipasi dalam komunitas. Jika individu tidak merasa terikat untuk bermasyarakat, mereka dapat mencoba untuk mencari masyarakat lainnya yang lebih cocok. 6) *Demokrasi Gotong royong*, merupakan modifikasi bagi demokrasi secara langsung. 7) *Revolusi*, segala ide-ide yang ada seperti tindakan untuk mencari diri yang otentik, seringkali diungkapkan dalam konsep revolusi.³⁵

Gerakan Kiri Baru yang muncul di dunia kampus, merupakan bentuk lain dari reaksi mahasiswa yang resah terhadap fenomena masyarakat modern yang teralienasi dengan produk-produk industrialis dan menjauhkan manusia dari makhluk yang bermartabat. Juga merupakan kecenderungan dari praktek birokrasi yang terstruktur dalam masyarakat modern. Terakhir gerakan ini juga bereaksi

³⁴ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat Politik & Posmodernisme Menurut Jurgen Hebermas*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. xx

³⁵ Lyman Tower Sargent, *Op Cit*, hal. 131-134

terhadap penggunaan energi nuklir, mereka mendesak perlunya pembekuan tenaga nuklir untuk memungkinkan masyarakat lebih terdesentralisasi dan lebih bebas. Aktifis gerakan anti nuklir mengasumsikan tenaga nuklir membutuhkan suatu struktur kekuasaan yang tersentralisasi dan kurang lebih otoriter dan berbagai pilihan non nuklir memberikan alternatif yang lebih besar bagi optimalisasi pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Gerakan-gerakan ini terus berkembang dan semakin kuat. Sama halnya dengan gerakan lingkungan seperti di Amerika dan Eropa Barat, bahkan mereka sudah mulai melirik ke dalam ranah-ranah perpolitikan sebagai bagian dalam penentuan kebijakan.

Anarkisme

Selama ini muncul beberapa asumsi keliru terhadap apa itu anarki, anarkis ataupun anarkisme. Khususnya di Indonesia, selama satu dasawarsa terakhir, terminologi ini identik dengan kekerasan, kekacauan atau asumsi umum dari kamus militer yang menyatakan bahwa anarkisme merupakan gerakan berbahaya dan mengacaukan tataran keamanan publik atau negara. Padahal anarkisme sendiri merupakan sebuah ideologi yang sudah lama tumbuh di ranah gerakan perubahan sosial di Amerika maupun Eropa, misalnya pada gerakan buruh dan petani, dan terakhir gerakan lingkungan hidup (ekologi) dan anti kapitalisme global juga melibatkan gerakan ini.

Gerakan anarkisme bisa dikatakan erat kaitannya dengan gerakan Kiri Baru. Walaupun anarkisme sendiri sebagai ideologi telah mulai muncul dan berubah-ubah sepanjang abad. Kaitan ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa pada tahun yang sama dengan gerakan Kiri Baru, yakni 1960-an dan 1970-an sebagai penanda munculnya kembali gerakan anarkisme. Misalnya pada gerakan-gerakan protes dan demonstrasi mahasiswa di Paris pada tahun 1968, mereka membawa spanduk-spanduk anarkisme yang berwarna hitam bukan komunisme.

Terdapat beberapa pemikir dan tokoh yang mengilhami gerakan-gerakan ini, sebut saja Raja Peter Kropotkin (1842-1921), Mikhail Bakunin (1814-1876),

Pierre Joseph Proudhon (1809-65), William Godwin (1756-1836), Count Leo Tolstoy (1828-1910), Max Stirner (1806-56), dan beberapa pemikir lainnya. Namun ide-ide anarkisme sendiri bisa di temui dalam setiap periode sejarah. Misalnya dalam karya Filsuf Tiongkok; Lau-Tse "Arah dan Jalan yang Benar" dan juga filsuf-filsuf Yunani seperti Hedonis dan Cynic dan orang-orang yang mendukung hukum alam. Kemudian ide-ide ini terus berkembang dalam sejarah perubahan sosial masyarakat.

William Godwin dianggap sebagai peletak dasar yang penting dalam sejarah anarkisme kontemporer. Godwin dalam karyanya "*Pertanyaan Mengenai Keadilan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Moralitas dan Kebahagiaan*," menyatakan bahwa sebab-sebab penyakit sosial dapat ditemukan bukan dalam bentuk negara, tapi karena adanya negara itu sendiri. Ide-ide Godwin tentang masyarakat tanpa negara mengasumsikan hak sosial untuk semua kekayaan alam dan sosial, dan kegiatan ekonomi akan dijalankan berdasarkan 'ko-operasi bebas' di antara produsen-produsen. Dengan idenya ini Godwin menjadi penemu anarkisme komunisme.³⁶

Lebih lanjut anarkisme sendiri memiliki asumsi pokok, bahwa kekuasaan yang dilaksanakan oleh satu orang atau oleh suatu kelompok terhadap orang lainnya adalah penyebab utama dalam permasalahan dunia saat ini. Mereka yakin bahwa manusia mampu mengorganisasikan urusan-urusannya tanpa harus menyerahkan nasib pada orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa tidak akan ada tatanan dalam masyarakat; yang mereka maksudkan adalah bahwa manusia dapat saling bekerjasama untuk menghasilkan suatu sistem yang lebih baik dari yang dihasilkan oleh penguasa. "karena kebutuhan bersama maka sekumpulan manusia, melalui usaha coba-coba, improvisasi dan eksperimen, akan mengembangkan tatanan dari kekacauan—tatanan ini akan lebih bertahan lama dibandingkan tatanan yang dipaksakan dari luar, karena ia bersifat sukarela, fungsional, temporer, dan kecil."³⁷

³⁶ Jurnal Perempuan, edisi 11, Mei-Juli 1999, hlm. 3

³⁷ Lyman Tower Sargent, *Op Cit*, hlm. 113

Sama halnya dengan pengertian yang diberikan oleh Kropotkin tentang anarkisme sebagai:

.....nama yang diberikan pada sebuah prinsip atau teori kehidupan dan prilaku yang memandang masyarakat tanpa pemerintah—harmoni dalam masyarakat semacam itu diperoleh bukan karena ketaatan terhadap hukum atau penguasa, tetapi karena kesepakatan bebas yang dilakukan di antara berbagai kelompok, wilayah dan profesi, yang dibentuk secara bebas demi produksi dan konsumsi, serta juga demi kepuasan berbagai kebutuhan dan aspirasi manusia yang beradab.³⁸

Walaupun dalam perkembangan kontemporer anarkisme sendiri berkembang dan terpecah-pecah secara garis besar ke dalam dua ketegori, yaitu pertama, kolektivis, dengan penekanan pada individu dalam suatu ikatan sukarela antar individu-individu, dan kedua, Individualis, dengan penekanan pada individu yang terpisah dalam suatu asosiasi. Untuk yang pertama kadang dibagi kedalam anarkisme komunis dan anarko-sindikalisme; sedangkan yang kedua dibagi kedalam anarkisme individualis dan anarko-kapitalisme yang juga dinamakan minimalisme atau libertarianisme.³⁹

Akan tetapi, anarkisme adalah tetap sebuah filsafat politik yang mengasumsikan tak satu pun kelompok dalam masyarakat diperkenankan memaksa kelompok lain, masyarakat harus terdiri dari berbagai ragam kelompok yang tersusun untuk mengkoordinasikan fungsi-fungsi sosial. Memang dalam masing-masing kasus persamaan ini lebih penting daripada perbedaan.

Seperti halnya dalam perkembangan anarkisme modern, yang menemukannya dua arus pemikiran besar, yang sebelum dan semenjak Revolusi Perancis menemukan karakter-karakter tertentu dalam kehidupan intelektual di Eropa, yaitu sosialisme dan liberalisme. Anarkisme mempunyai persamaan

³⁸ Peter Kropotkin, "Anarchism," *Encyclopaedia Britannica*, 11th ed., vol. 1, hal. 914 dalam *Op Cit*, Lyman Tower Sargent, hal. 112

³⁹ Ibid.

dengan liberalisme mengenai ide bahwa kebahagiaan dan kemakmuran seseorang haruslah menjadi norma dalam semua urusan sosial, imbasnya harus ada pembatasan fungsi pemerintah seminimal mungkin. Ketika Jefferson menguraikan prinsip dasar liberalisme, bahwa "*pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit mungkin memerintah.*" Sedangkan Thoreau, yang mewakili anarkisme, menyatakan: "*Pemerintah yang paling baik adalah yang tidak memerintah sama sekali.*"

Begitu pula halnya dengan sosialisme, anarkisme juga menuntut penghapusan monopoli ekonomi dalam segala bentuk, dan menuntut hak milik bersama atas tanah serta semua sarana produksi. Dalam gerakan sosialis, kaum anarkis mewakili pandangan bahwa perjuangan melawan kapitalisme harus berjalan seiring dengan perlawanan terhadap semua institusi kekuasaan politik yang koersif, karena sejarah telah membuktikan bahwa eksploitasi ekonomi berjalan seiring dengan penindasan politik sosial. Eksploitasi manusia terhadap manusia lain, adalah suatu keterkaitan yang tak terpisahkan. Eksploitasi merupakan kondisi bagi adanya dominasi, dan demikian pula sebaliknya.⁴⁰

Dalam gerakan lingkungan hidup yang juga berkembang pada dasawarsa 60-an dan 70-an, anarkisme sendiri juga terlibat secara masif, dalam konteks gerakan ini mereka dikenal dengan *Eco-anarchism*, sebuah gabungan antara ide-ide anarkisme dengan ide-ide gerakan ekologis.

Feminisme

Sama halnya dengan anarkisme ataupun gerakan Kiri Baru, feminisme juga mulai tumbuh berkembang pada dasawarsa yang sama. Dan kritikan mereka terhadap masyarakat kontemporer juga berangkat dari isu yang sama pula. Tetapi karena hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan hubungan sosial yang paling pokok, maka kritikan gerakan perempuan lebih luas implikasinya dan

⁴⁰ Rudolf Rocker, *Anarkisme dan Anarko-sindikalisme*, Kolektif Lintas Batas Cultuurstelsel dan SUMBU, Yogyakarta, 2001, hal. 24-27

hubungan sosial, baik dalam politik maupun ekonomi. Pembagian tradisional antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki memproduksi dan perempuan mereproduksi, termasuk mengasuh anak, mengurus rumah tangga, harus ditiadakan. Untuk itu harus ada suatu sistem sosial baru yang memungkinkan antara perempuan dan laki-laki mendapatkan peran yang sama.

Pada sisi inilah para penganjur feminisme melihat adanya masalah bias dan penyimpangan deduksi logis yang terjadi. Yaitu sewaktu proporsi-proporsi disimpulkan dari perspektif yang berasal dari kelompok tertentu yang dominan di masyarakat (laki-laki).

Menurut feminisme, pada kenyataannya tindakan kaum pria atas nama negara tidak memberikan apa-apa atau kesempatan bagi pengembangan peran perempuan atau bagi konstruksi sosial atas gender (maskulin-feminim) dan bagi adanya subjek tertentu.⁴²

Pada dasarnya paham feminim ini berangkat dari tuntutan terhadap persamaan antara perempuan dan laki-laki. Persamaan yang dimaksud pertama adalah sebagai individu-individu yang bebas mereka ini mampu mengarahkan diri mereka pada tujuan-tujuan yang telah mereka pilih sendiri. Kedua dalam mengarahkan dirinya ini, mereka mempunyai persamaan atau kesetaraan yang diperlukan sehingga upaya pencapaian tujuan-tujuannya dapat dioptimalisasi secara penuh tanpa adanya kendala yang tidak adil.⁴³

Setidaknya ada tiga perspektif dalam paham feminis mengenai kebebasan dalam hubungannya dengan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.⁴⁴ Pertama perspektif Sosialis, menafsirkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan itu adalah bilamana terdapat kebebasan untuk mengarahkan dirinya

seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarganya, ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. "Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat—pemerintahan, militer pendidikan, industri, bisnis, perawatan dan lain sebagainya. Lihat, Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Refika Anisa Women's dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 64-65

⁴² Scott Burchill & Andrew Linklater, eds., *Op Cit.* hlm. 210

⁴³ Arie Indra Chandra, *Perspektif Feminisme dalam Studi Hubungan Internasional: Suatu Penjelajahan Konseptual Awal*, dalam Andre H. Pareira, ed., *Perubahan Global dalam Studi Hubungan: Internasional*, PACIS—Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.200-201

⁴⁴ Parafrase Jonh Charvet, *Feminism*, (JM Dent & Sons, London, 1982), *Ibid*, hlm 201-202

sendiri dan kebebasan itu berada dalam tindakan kolektif dari pribadinya sebagai salah satu anggota masyarakat.

Kedua, perspektif individualis menafsirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan kebebasan individu untuk menentukan sendiri pilihan-pilihan yang mungkin atas kehidupannya sendiri dalam kerangka hukum yang menjamin hak kesetaraan kesemua orang yang juga menentukan pilihan-pilihan semacam itu.

Ketiga, perspektif radikal yang menafsirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah hilang karena kebebasan perempuan telah dirampas oleh masyarakat *patriarkhat*. Hal ini kemudian menjadikan perempuan hanya sebagai sub ordinat. Perbedaan jenis kelamin mengimbas kepada perbedaan pola perilaku yang menjadi tolak ukur untuk pembedaan susunan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya menjadi lembaga pendominasi laki-laki atas perempuan.

Dari perbedaan berbagai pandangan tentang feminisme, memunculkan berbagai aliran sekaligus pro dan kontra terhadap pemikiran feminis sendiri. Seperti pengkategorian yang diberikan oleh Naomi Wolf, antara feminisme Korban (*victims feminism*) dengan feminisme Kekuasaan (*Power Feminism*).⁴⁵

Feminisme korban adalah paham yang mengemukakan saat seseorang perempuan mengais kekuasaan lewat jati diri ketidakberdayaan dan memantulkannya ke dalam cermin pencitraan aturan tak tertulis tentang apa itu feminis. Secara seksual bersifat menghakimi bahkan bisa anti seksual. Menyemangati perempuan untuk mengambil identitas ketidakberdayaan, mengidolakan perempuan memelihara anak sebagai bukti bahwa perempuan lebih baik dari laki-laki.

Sedangkan feminisme kekuasaan, mengamati dari dekat kekuatan-kekuatan perempuan, hingga perempuan bisa menggunakan kekuatannya sendiri secara efektif. Mengetahui bahwa pilihan-pilihan yang diambil perempuan bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya dan bisa mengubah dunia.

⁴⁵ Naomi Wolf, *Gegar Gender (Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21)*, Pustaka Gemesta Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 201-202

Menyemangati perempuan agar mengklaim suar individual, ketimbang melebur suaranya ke dalam koordinasi kelompok atau jati diri kolektif. Ideologi yang dijunjungnya lebih luwes dan inklusif bersifat melingkupi dan menyertai lebih banyak perempuan.

Seiring dengan gerakan feminisme dalam menyuarkan hak-hak perempuan dalam politik, ekonomi yang marak dalam tahun 1970-an, juga bersamaan dengan isu-isu lingkungan hidup yang juga menjadi landasan bagi gerakan-gerakan Kiri Baru maupun Anarkisme. Pada dasawarsa tersebut gerakan feminisme terkenal radikal, yang terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Emma Goldman⁴⁶ tentang seksualitas yang menempatkan pengalaman pribadi atas pengalaman politik (*the personal is political*).

Dalam konteks gerakan lingkungan, gerakan feminisme sendiri dikenal dengan *Ecofeminism*, yang merupakan percampuran sinergistik dari pola feminisme tahun 1960-an dengan Ekologi tahun 1980-an, menempatkan tekanan pada keterkaitan antara dominasi dan eksploitasi atas perempuan dan alam. Dominasi dan eksploitasi rangkap dua ini dilihat sebagai akibat dari masyarakat yang di dominasi pria.

Gerakan ini terinspirasi dari buku yang di tulis oleh Susan Griffin, *Women and Nature* (1978), dan buku Carolyn Merchant, *The Death of Nature*(1980). Ekofeminisme berusaha melampui batas dari ideologi feminisme yang telah dicanangkan sebelumnya khususnya dengan mengangkat isu bahwa wanita, tempat wanita dalam suatu konteks tertentu adalah lebih luas daripada hanya sekedar aspek ekonomi. Ekofeminisme juga berupaya melampui apa yang dilihat sebagai keterbatasan-keterbatasan radikalisme yang lain dengan mengajukan pertanyaan tentang “androsentrime”, yakni perspektif yang berpusat pada kaum pria, sebagai inti dari krisis ekologi dan sekaligus gugatan tentang patriarki sebagai instrumen sentral dalam memahami dominasi Barat atas alam.⁴⁷

⁴⁶ Emma Goldman (1869-1940) adalah seorang tokoh Feminisme, anarkis dan seorang orator politik masif yang sangat berpengaruh pada abad 20. Seorang keturunan Rusia-Yahudi yang memulai karirnya dari organisasi buruh wanita. Lihat Jurnal Perempuan, edisi 11, Mei-Juli 1999, dan <http://sunsite.berkeley.edu/cgibin/imagemap/emma.html>

⁴⁷ Kirk Patrick Sale, *Op Cit*, hlm. 84

Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori Ekofeminisme adalah teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungan.

Munculnya gerakan Ekofeminisme juga sejalan dengan perkembangan baru dalam filsafat etika yang berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial di seluruh dunia. Penghujung abad 20 merupakan era berubahnya paradigma berpikir sebagai cerminan reaksi problem yang di hadapi oleh masyarakat modern. *Ecophilosophy* atau *deep ecology* yang berkembang pesat di Barat adalah salah satu paradigma berpikir yang mengkritik peradaban modern yang telah merusak ekosistem manusia. *Deep ecology*, ingin membangkitkan kesadaran manusia kesadaran manusia bagaimana manusia dapat melihat dirinya sebagai makhluk yang menyatu dengan alam. Proses ini dimulai dari penghapusan kesadaran akan ke-diri-an manusia sebagai ego yang terpisah dan bersaing dengan ego-ego yang lainnya kemudian pengidentifikasian dirinya dengan keluarga, komunitas, seluruh manusia, dan akhirnya seluruh alam semesta.⁴⁸

Para Ekofeminisme yang dipengaruhi oleh pola pikir ini berpendapat bahwa perempuan secara alami dianugrahi kapasitas merasakan kesadaran dan keterikatan dirinya dengan alam. Mereka melukiskan betapa perempuan dianugrahi pengalaman bersatu dengan 'yang lain'. Misalkan berkembangnya janin dalam tubuh, proses melahirkan, rasa kesatuan baik fisik maupun emosional dalam aktifitas penyusuan.⁴⁹

Pemikiran ini berkembang menjadi sebuah gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminim dalam masyarakat. Banyak feminis yang semakin sadar bahwa pengadopsian kualitas maskulin adalah sama saja dengan memisahkan perempuan

⁴⁸ Ratna Megawangi, *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*, dalam Yayah Khisbiah, ect., *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 37-88

⁴⁹ Ibid

dengan alam, dan ini yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam peradaban modern. Terbukti dengan banyaknya pengikut Ekofeminisme di berbagai kampus-kampus perguruan tinggi. Khususnya fakultas filsafat serta pusat studi tentang wanita, dan memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan perempuan dan penulisan-penulisan akademik pada akhir abad 20 ini.

2.5 Politik Hijau sebagai Politik Baru

Baik Kiri Baru, Anarkisme maupun feminisme, merupakan gerakan-gerakan radikal yang marak pada dasawarsa 60-an, dan mengalami puncaknya pada tahun 1970-an, sama-sama memiliki *subject matter* terhadap produk masyarakat modern/kontemporer yang mereka anggap mengalami ketimpangan berdasarkan latar belakang atau paradigma dari masing-masing idealisme yang mereka miliki.

Dan dalam waktu yang bersamaan lingkungan pun menjadi permasalahan yang *inheren* dengan kondisi masyarakat modern, dan ketiga gerakan radikal ini pun memiliki perhatian yang senada akan permasalahan krisis ekologi tersebut. Wallhasil berangkat dari perspektif inilah, mereka berusaha mengartikulasikan serta menyatukan kepentingan mereka dengan menggunakan isu ekologis sebagai sandaran perlawanan mereka terhadap sistem modernisasi yang didominasi oleh sistem kapitalis yang telah menjadi kritikan mereka dari awal.

Dan dari sinilah Gerakan Politik Hijau mulai muncul ke permukaan wacana publik, disamping alasan bahwa lingkungan merupakan isu yang sangat universal tanpa mempertimbangkan kepentingan dan ideologi dari berbagai macam aliran. Dan isu inipun sangat mudah di terima oleh kalangan publik. Selain itu munculnya isu ini sekaligus juga bentuk lain dari kesadaran yang muncul pada masyarakat pasca industri atau masyarakat pasca materialis.

Berangkat dari ide-ide besar tersebut, mereka membentuk sebuah organik baru yang kita kenal dengan lembaga swadaya masyarakat atau NGO (Non-Governmental Organizations) yang terus tumbuh dan berkembang. LSM pada dasarnya adalah kelompok nonprofit yang bergerak dalam upaya mengimplementasikan berbagai ide menjadi sebuah realitas tanpa melalui jalur

kekasaan. Melalui LSM ini, para aktivis dari berbagai aliran tersebut bergerak dengan gigih, umumnya radikal dan kritis. LSM penuh dengan hiruk pikuk dan jauh dari kata tertib, demokrasi merupakan praktek sehari-hari, perbedaan merupakan suatu kewajiban, dan dari sini mereka menganggap pentingnya pluralisme.

Hubungan diantara gerakan-gerakan tersebut dan berbagai LSM itu akhirnya membuat berbagai ide besar tersebut melebur. Seorang Ekologis, tidak lengkap bila ia bukan seorang feminis yang demokratis dan menghormati hak azasi manusia begitu pula sebaliknya. Bahkan berbagai ide besar tersebut saling melengkapi dan jadilah ideologi campuran yang saling melengkapi antar yang satu dengan yang lain.⁵⁰

Terminologi 'politik baru' telah mendapatkan perhatian dari banyak sarjana, jurnalis, dan politisi dari berbagai aliran. Selain berangkat dari ideologi diatas, fenomena politik hijau juga dilihat karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran pada masyarakat industri Barat. Beberapa sarjana menggambarkan, hal ini merupakan sebuah proses transisi dari nilai-nilai 'politik lama' yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan publik, keamanan nasional, dan gaya hidup tradisional menuju nilai-nilai 'politik baru' yaitu kualitas lingkungan, keadilan sosial, gaya hidup alternatif, hak-hak minoritas dan partisipasi.⁵¹

Menurut Baker, Politik baru berangkat dari pertanyaan bersama terhadap dampak pertumbuhan masyarakat industrialisasi yang cukup tinggi, seperti polusi lingkungan, bahaya energi nuklir, pertanyaan bagi kesetaraan gender, hak azasi manusia, dan kebutuhan untuk hidup damai berdampingan dan membantu masyarakat dunia ketiga.....dan segera mengakhiri siapa yang jadi *sang juara*. Politik baru memfokuskan pada pentingnya dibuka akses terhadap sumber-sumber dan instrumen politik, kebebasan berbicara bagi kelompok minoritas, akses terhadap mesin pengambil kebijakan negara, kesempatan berpartisipasi dalam

⁵⁰ Forum Keadilan, *Op Cit*

⁵¹ Ferdinand Muller-Rommel, *Green Parties and Alternative Lists under Cross-National Perspective*, dalam Ferdinand Muller-Rommel, ed., *New Politics in Western Europe, The Rise and Success of Green Parties and Alternative List*, Westview Press, Colorado, 1989, h. 5

politik, dan jika diperlukan, terdapat sebuah ruang bagi demonstrasi dan pola lainnya bagi perilaku elit.⁵²

Dalam hal ini bisa disederhanakan, bahwa *politik lama* dicirikan yakni, sebuah peran sentral sebagai generator politik dimaknai dengan partai politik dan berbagai organisasi lainnya yang berfungsi sebagai mediasi kepentingan; Orientasi politik bisa, melalui mediasi partai pilihan, mengikuti pemilahan pada struktur masyarakat tradisional, yaitu dimensi konflik agama dan kelas sosial. Sementara 'politik Baru' dicirikan, dengan adanya penurunan organisasi penengah tradisional, seperti partai politik yang mapan, dan peningkatan dalam pola pengorganisasian diri dengan mobilisasi; Berkurangnya generasi pasca perang, pendidikan lebih tinggi, kelas menengah baru dan sekuleris dengan orientasi politik baru⁵³

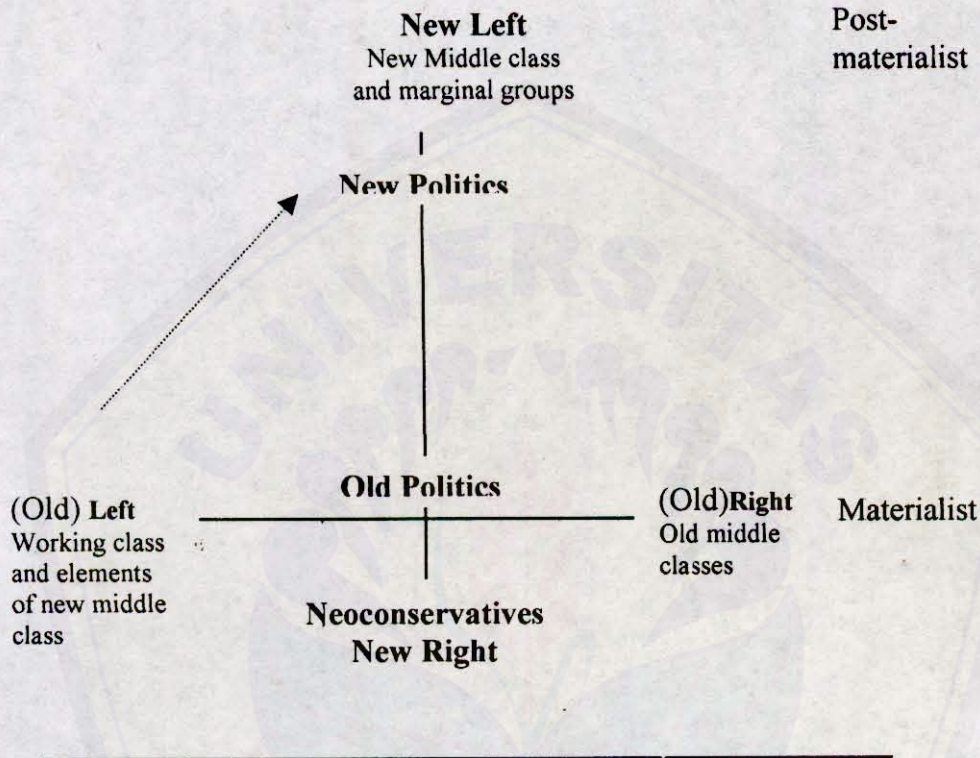
Sama halnya dengan apa yang di sebut oleh Ronald Inglehart transisi dari masyarakat materialis menuju masyarakat pasca materialis. Dimana telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat pasca materialis, yang tidak menjadikan lagi materi sebagai tujuan hidup, karena itu semua telah terjawab dengan keberhasilan industri. Dan mereka lebih melihat isu-isu diluar konteks itu, seperti keberlangsungan ekologi, partisipasi yang sama dalam politik dan keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Mobilisasi opini publik mereka lakukan melalui perilaku politik yang berbeda dari biasanya, seperti yang dilakukan oleh gerakan aksi mahasiswa dalam bentuk demonstrasi, pemboikotan dan pendudukan lembaga, kampanye informasi dan berbagai taktik lainnya. Dan kelompok-kelompok aksi yang tergabung dalam berbagai LSM ini cukup berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan nasional. Misalkan *The Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz* (BBU) yang didirikan di Jerman tahun 1972, *the Amis de la Terre* yang berada di Perancis berdiri tahun 1971, *the Swedish Miljvardsgruppernas Riförbund* (MIGRI)

⁵² Rüdiger Schmitt, *From 'Old Politics' to 'New Politics': Three Decades of Peace Protest in West Germany*, dalam Jhon R. Gibbins, ed., *Contemporary Political Culture; Politics in a Postmodern Age*, SAGE Publications, London, 1990, hlm. 176

⁵³ *Ibid*, hlm.177

kelompok aksi gerakan lingkungan Swedia yang berdiri tahun 1971, dan berbagai LSM dan kelompok aksi lainnya.⁵⁴



Figur 2.2 Model segitiga spektrum politik: pemilahan dan kekuatan
 Sumber: Clause Offe, 1985:858⁵⁵

Pada gambar 2.2, bisa dilihat lebih jelas bagaimana penyusunan kembali ruang politik yang menggambarkan kemajuan masyarakat demokrasi industri. Pada ‘politik lama’ berbagai konflik dipolarisasikan dengan kiri dan kanan tatanan pada ekonomi dan kelas sosial, kelas pekerja—diasumsikan dengan aliran kiri yang memasukan kelas menengah baru oposisi terhadap konservatif dan kelas menengah lama. Dengan pemilahan ini, kiri baru dikomposisikan sebagai kelas menengah baru pasca materialis dan kelompok yang tidak terintegrasi pada pasar kerja (mahasiswa, pengangguran,dll.) yang memisahkan diri dari gerakan kiri

⁵⁴ Ferdinand Muller-Rommel, *Op Cit* hlm. 6

⁵⁵ Michael Minkenberg and Ronald Inglehart, *Neoconservatism and Value Change in the USA: Tencencies in the Mass public of a Post Industrial Society*, dalam Jhon R. Gibbins, *Op Cit*, hlm. 90

lama dan menjadi kekuatan ketiga pada spektrum. Pada masyarakat pasca materialis, kelas pekerja dan kelas menengah lama secara bersamaan lebih dekat pada aliansi neokonservatif yang berlawanan dengan kiri baru pada dimensi politik baru. Dalam hal ini politik baru dipahami sebagai istilah porosnya konflik baru dan tidak hanya pada terminologi isu pasca materialis.⁵⁶

Jadi, jelas bahwa gerakan politik baru dalam terminologi politik hijau berangkat dari berbagai kelompok kritis pada masyarakat pasca industri. Secara bersamaan kelompok-kelompok tersebut mengintegrasikan diri dengan mengusung lingkungan sebagai isu utama dalam terminologi politik baru yang mereka tawarkan.



⁵⁶ Ibid



BAB III

SEJARAH POLITIK JERMAN DAN POLITIK HIJAU (PARTAI HIJAU)

3.1 Gambaran Umum Jerman sebelum Perang Dunia Kedua.

Sejarah Jerman diperkirakan dimulai pada tahun 9 Masehi, ketika Arminus seorang pangeran suku Jerman dengan sebutan Cherusci, menaklukkan pasukan-pasukan Roman di Hutan Teutoburg sehingga dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Jerman pertama. Untuk mengenangnya, telah dibangun suatu memorial dekat Detmold pada tahun 1838-1875. Istilah "Deutsch" atau Jerman sendiri kemungkinan baru dipakai pada abad ke 8, untuk menunjuk kepada bahasa dan budaya pada bagian timur kerajaan Francocian. Baru kemudian setelah meninggalnya Charlemagne (814), mulai berangsur ditujukan kepada masyarakatnya, dan akhirnya menunjuk pada wilayah tempat mereka tinggal, dengan menyebut Deutschland.¹

Dalam perkembangannya, bangsa Jerman terbagi dalam negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang berbahasa Jerman, dimana masing-masing mempunyai kedaulatan penuh. Ide untuk pembentukan Jerman Raya, berkembang sejak berhasilnya negara-negara dan kerajaan-kerajaan kecil yang berbahasa Jerman, serta taklukkannya berhimpun dalam suatu serikat negara-negara di bawah pimpinan Austria, pada tahun 1815, timbulnya revolusi Perancis 1848, juga mendapat gemanya di beberapa negara Eropa lainnya termasuk di beberapa kerajaan Jerman telah menimbulkan solidaritas antar bangsa Jerman. Terutama dari pihak Austria sebagai negara terbesar dalam lingkungan negara-negara Jerman. Dan akhirnya menimbulkan keinginan bangsa Jerman untuk bersatu.

Hal ini bermula dari Otto Van Bismarck sebagai orang pertama yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut. Dan akhirnya terbentuklah kekaisaran Jerman Raya (*Deutsches Reich*) pada tahun 1871. sejak itulah Jerman Raya yang walaupun mempraktekkan bentuk negara yang federalistis, namun tetap tersentralisasi dengan baik. Pengaruh Bismarck cukup kuat dalam membentuk karakter negara Jerman. Berbagai aliran baik secara kultural maupun sosial keagamaan berusaha untuk disatukan dalam suatu semangat nasionalisme

¹ Karl Romer, Facts about Germany—The Federal Republic of Germany, Bertelsmann Lexikon Verlag, Federal Republic of Germany, 1987, hlm. 45

bangsa Jerman. Dalam hal ekonomi juga menghasilkan Jerman menjadi negara dengan ekonomi yang cukup kuat.²

Jerman adalah penyebab Perang Dunia I tetapi kalah, kekalahan Jerman pada perang dunia pertama membuat mereka harus menanggung beban berat, mereka harus mempertanggung-jawabkan kekalahan perang, kehilangan wilayah seluas 14%, kehilangan daerah koloni, dilarang memiliki angkatan perang kecuali kepolisian, dan ditempati tentara pendudukan (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) serta membiayai tentara pendudukan tersebut.

Dengan demikian, kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama ini telah meletakkan dasar bagi suatu perubahan politik yang radikal yang mencekam tuntutan Sekutu yang menang dan sebagian kecil saja dari kelompok elit politik dan warga negara Jerman. Konstitusi pertama yang demokratis di Jerman, berlaku di Weimar tahun 1919, mengintroduksikan konsep hak pilih universal (termasuk wanita dalam badan pemilihan untuk pertama kali) dan sistem pemilihan yang mementingkan proporsional dalam perwakilan. Mendadak seluruh rakyat Jerman diajak untuk ikut serta dalam proses politik—dan sudah ditunjukkan bahwa demokrasi stabil sebagian merupakan hasil perluasan tahap demi tahap partisipasi dalam politik. Lembaga-lembaga pemilihan Perwakilan Rakyat memperkuat kecenderungan multipartai Jerman di Weimar, dan momok faksi-faksi pengikut partai yang selalu berselisih makin mengurangi keabsahan suatu pemerintahan yang telah dipaksa menerima penyelesaian yang diatur oleh sekutu yang menang di Versailles.³

Khususnya sesudah resesi yang membawa kerusakan (mulai 1929), pemerintahan-pemerintahan koalisi dari SPD dan KPD (Partai Komunis Jerman) yang tidak stabil dari republik yang muda terbukti tidak mampu menghadapi krisis atau menanamkan dalam diri para pemilih Jerman rasa hormat terhadap lembaga-lembaga Weimar. Mereka yang berhak memilih semakin diperdebatkan antara parati ekstrim kiri dan partai ekstrim kanan, dan hal ini memungkinkan parati Nazi (*National Sozialismus*) dengan cepat menjadi partai yang berkuasa di

² Christopher S. Allen, Germany, dalam Mark Kesselman, etc., *European Politics in Transition* (Third ed.), Houghton Mifflin Company, Boston, 1997 hlm. 244

³ Carlton Clymer Rodee, etc., *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 514

Reichstag. Meskipun didirikan pada 1919, partai Nazi hanya mempunyai 12 kursi di Reichstag pada tahun 1928, tetapi dengan adanya depresi perwakilannya bertambah menjadi 107 kursi pada 1930 dan 230 kursi sesudah pemilihan Juli 1932. Hal ini tidak lain Nazi mengusung semangat ultra nasionalismenya untuk melawan dua partai sayap kiri yang berkoalisi sebelumnya, yaitu SPD dan KPD.⁴

Presiden sebelumnya, Jendral Hindenburg yakin bahwa ia bertindak demi kepentingan dalam negeri dan undang-undang dasar, menunjuk Adolf Hitler sebagai Kanselir Januari 1933. didukung oleh strategi teror kesatuan-kesatuan para Nazi, Hitler bertindak maju mencapai kemenangan dalam pemilihan dan mayoritas dalam parlemen memberikan kepadanya kekuasaan diktator. Kematian Republik Weimar sama mendadaknyanya dengan kelahirannya. Hal ini ditandai dengan pengumuman Undang-Undang Darurat yang mencabut hak-hak asasi manusia demi kepentingan perlindungan negara dan bangsa Jerman dari maksud jahat yang datang, baik dari luar maupun dalam negeri.⁵

Dengan bermodal legitimasi kekuasaan absolut serta semangat nasionalismenya, Hitler dengan motor politik Nazi, kembali mengulangi sejarah Jerman mengagresi negara-negara di sekitarnya. Kemudian dengan hanya sekejap Jerman telah menguasai Eropa, mencaplok Austria Maret 1938, merobohkan benteng Cekoslowakia, menundukkan Polandia, dan 16 hari setelah itu menyerang Uni Soviet, melabrak Denmark dan Norwegia bulan April 1940. setelah itu bulan Mei tahun itu juga menerjang Belanda, Belgia, Luxemburg, sedangkan bulan Juni-nya Perancis bertekuk lutut. Pasukan Jerman menaklukan Yunani dan Yugoslavia April 1941, serta menjelang Natal Desember 1941 Hitler memaklumkan perang terhadap Amerika Serikat.⁶ Akhirnya, Jerman di bawah kekuasaan Hitler kembali menuai kegagalan, pada 08 Mei 1945 takluk di bawah sekutu yang terdiri dari AS, Inggris, Perancis, dan USSR. Ditandai dengan penandatanganan penyerahan tanpa syarat oleh penanggungjawab Nazi, di Karl Shor daerah pinggiran Berlin.

⁴ Ibid, lihat juga pada Christopher S. Allen, *Op Cit*, hlm. 252

⁵ Drs. Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 193

⁶ Ibid, hlm. 194

3.2 Republik Federal Jerman Paska Perang Dunia Kedua

Setelah pasukan Jerman menyerah tanpa syarat sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Pemerintahan Jerman terakhir di bawah pemerintahan Admiral Dönitz hanya dapat bertahan selama 23 hari. Sesuai dengan persetujuan Postdam⁷ tanggal 2 Agustus 1945, Jerman di bagi dalam empat daerah kekuasaan sekutu. Setelah perundingan-perundingan untuk mempersatukan Jerman di bawah satu pemerintahan oleh Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet (pada waktu itu) mengalami kegagalan, maka ketiga wilayah yang dikuasai oleh tiga negara sekutu Barat diintegrasikan secara ekonomis dalam tahun 1948.

Undang-undang dasar sementara yang disebut *Grundgesetz*, mulai berlaku diketiga wilayah (kecuali Saarland) tanggal 22 Mei 1949, dimana Partai CDU (Partai Persatuan Demokrasi Kristen) bersama-sama dengan CSU (Partai Persatuan Sosialis Kristen) parati SPD (Partai Sosial Demokrasi Jerman) keluar sebagai dua Partai besar. Kemudian ketiga negara sekutu Barat secara politis menyatukan wilayah yang dikuasai menjadi Republik Federal Jerman (RFJ) pada tanggal 21 September 1949 dengan Bonn sebagai Ibukota sementara, meskipun kedaulatannya masih dibatasi oleh penguasa sekutu Barat.⁸

Pada tanggal 8 Oktober 1949, daerah yang diduduki Uni Soviet menyatakan diri sebagai “*Deutsche Demokratische Republik*”(DDR) – “Republik Demokrasi Jerman” (RDJ) dengan Berlin Timur sebagai ibukota. Dengan demikian bagian Barat kota Berlin yang dikuasai Sekutu Barat menjadi semacam pulau (*Enclave*) RFJ dalam wilayah RDJ. Dengan terbentuknya Pemerintahan Federal, maka penguasa militer Sekutu mengubah hubungan menjadi suatu hubungan pertahanan atas dasar persetujuan.⁹ Pendeklarasian *duo* Jerman ini

⁷ Isi perjanjian Postdam antara lain sebagai berikut: 1) Jerman dibagi menjadi daerah pendudukan Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet dengan pengawasan dewan pengurus empat besar negara sekutu. 2). Berlin dibagi menjadi empat daerah pendudukan dibawah komando bersama. 3). Kekuasaan militer dan politik Nazi dihapuskan. 4). Mengadakan peradilan terhadap penjahat-penjahat perang. 5). Mengadakan pengawasan terhadap produksi dan ekonomi Jerman. 6). Menggalakkan demokrasi. 7). Sekutu menyetujui menyerahkan daerah di sebelah Timur sungai Oder dan Neisse kepada Polandia dan Rusia sambil menunggu perjanjian yang menentukan.. Lihat dalam Drs. Cheppy H.C. dan Drs. Suparlan A., ensiklopedi Politika, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.264

⁸ Keterangan Dasar Republik Federal Jerman, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Berlin, 2002, hlm. 4

⁹ Ibid

sekaligus penanda diawalinya perang dingin antara blok Barat dibawah Komando Amerika serikat dengan mengusung ideologi liberal kapitalisme dengan Blok Timur di bawah komando USSR di bawah payung ideologi sosialisme komunisme.

Persetujuan Paris tahun 1954 memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada RFJ sejak tanggal 5 Mei 1955 dan memberikan keanggotaan dalam NATO. Dalam tahun 1957 Bundstag (Parlemen Federal) menyatakan Berlin sebagai ibukota Jerman dan tetap menginginkan Jerman untuk bersatu. Sebelum hal ini terlaksana maka kedudukan pemerintah RFJ berada di Bonn. Saarland, yang sebelumnya diduduki Perancis, dalam bulan Februari 1957 seseuai dengan pasal 23 konstitusi Jerman secara administratif dan ekonomis bergabung dengan RFJ – suatu “novum” dan contoh untuk proses penyatuan kembali Jerman tahun 1990.¹⁰

3.3 Kehidupan Politik (1949-1990)

Paska Perang Dunia Kedua, Jerman Barat di bawah kontrol sekutu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis memulai kembali membangun kembali bangsanya dari kehancuran akibat ulah Hitler. Kanselir di Jerman Barat adalah pemegang kekuasaan eksekutif utama. Partai-partai di Jerman Barat adalah pemasok tunggal kanselir (kecuali untuk kasus tertentu dan istimewa). Partai memilih kanselir dan memberikan padanya kekuasaan eksekutif relatif besar dan menjadikan parlemen Jerman Barat tergantung dalam beberapa hal pada kabinet Jerman.

Kemudian, selama 12 tahun, dari tahun 1949-1961 Kristen Demokrat dapat mempertahankan mayoritas di Parlemen dan karena itu mereka dapat memerintah dengan tenang sekaligus dengan rejim yang cukup stabil. Karena elit di parlemen yang didominasi oleh CDU dan sekutunya CSU inilah, maka kanselir Konrad Adenauer benar-benar memegang posisi yang melancarkan pemerintahannya selama dua belas tahun, mengikuti periode yang sama dari Reich ketiganya Hittler.

Sesungguhnya, pemerintahan yang cukup lama di bawah kanselir Adenauer dan Kristen Demokrat, dan pemusatan pengambilan kebijakan di tangan

¹⁰ Ibid.

pemerintah dan golongan elit yang mempunyai kepentingan, telah menjadi perhatian banyak pengamat yang risau karena tidak adanya oposisi politik yang mengesankan. Prasyarat bagi tegaknya sebuah pemerintahan demokrat yang bertanggung jawab tergantung pada pertumbuhan Partai Sosial Demokrat Jerman Barat (SPD). Akan tetapi pada tahun 1950-an kelihantannya SPD dipimpin oleh sebuah faksi doktriner yang tidak berwarna yang terikat pada anakronisme Marxis Sosialis. Baik citra maupun arah SPD mulai berubah sesudah tahun 1959, sewaktu kongres nasional partai itu (diadakan di Gad Godesberg) meninggalkan ciri Marxis dan menerapkan program yang moderat yang lebih cocok dengan masalah-masalah masyarakat industri modern. Dan pada 1960, walikota Willy Brandt dari Berlin Barat dicalonkan SPD untuk calon kanselir.¹¹

Lebih lanjut, sejak tahun 1961, tidak satupun dari partai-partai besar tersebut memperoleh mayoritas di *Bundestag*. Dari 1961-1969 suatu pemerintahan koalisi mempersatukan Kristen Demokrat dengan partai Liberal (FDP). Partai liberal mempunyai posisi yang sama, partai ini telah menimbulkan perasaan nasionalistis dengan mempertahankan sangat teguh untuk tidak mau mengakui garis-garis batas Oder Niese, dan menuntut dikembalikannya batas-batas Jerman tahun 1937, dan menyerukan penyatuan kembali Jerman dan dilain pihak mereka juga menyerukan untuk mengembangkan kontak dengan Uni Soviet dan Republik Demokrasi Jerman (Jerman Timur).¹²

Persekutuan antara Kristen Demokrat dan Liberal pecah pada tahun 1966, dan kemudian Kristen Demokrat melakukan koalisi dengan Sosialis Demokrat (SPD) yang merupakan *grand coalition* (koalisi besar) dalam sejarah perpolitikan Jerman. Namun koalisi dua partai besar ini tidak bertahan lama, karena perbedaan-perbedaan mendasar dari prinsip partai yang dimiliki. Kemudian sesudah pemilihan 1969, SPD mampu membentuk pemerintahan koalisi dengan FDP, yang sejak 1948, telah bergeser dari ideologi kanan ke kiri-tengah, dibawah pimpinan kanselir Willy Brandt Jerman Barat semakin menampakkan kesuksesannya membangun perekonomian menjadi lebih bagus. Imbasnya pamor SPD menjadi naik, terbukti pada pemilihan tahun 1972, SPD merupakan partai terbesar di Parlemen.

¹¹ Carlton Clymer Rodee, etc., *Op Cit*, hlm. 521

¹² Maurice Duverger, *Op Cit*, hlm.95

Walaupun SPD, telah memiliki suara terbesar di parlemen Jerman Barat, mereka tetap menggalang pemerintahan koalisi dengan FDP, koalisi ini berjalan selama empat periode pemilihan, yakni sampai pemilihan tahun 1980 dibawah kanselir Helmut Schmidt dari SPD. Pada pemilihan parlemen 1976 sampai 1980, sewaktu SPD dibawah Schmidt partai ini memenangkan mayoritas suara rakyat (kira-kira 43% dalam kedua pemilihan), isu-isu yang digalang oleh pemerintahan koalisi Schmidt, seperti perlucutan senjata nuklir, perlindungan lingkungan telah memberikan dukungan besar bagi sayap kiri SPD dari kelompok-kelompok pemuda.

Sementara Kristen Demokrat yang terus berusaha menggalang kekuatan dengan Kristen Sosialis (CSU), terus membayangi pemerintahan koalisi SPD-FDP. Walaupun pengikut CSU adalah semata-mata orang Bavaria, dan Bavaria adalah landasan tradisional bagi politikus Jerman sayap kanan (termasuk Nazi), kekuatan dari gabungan dua konservatif ini tetap membahayakan posisi SPD di parlemen. ini terbukti pada pemilu tahun 1983, CDU/CSU kembali memenangkan suara mayoritas di Parlemen. Dan FDP yang cukup fleksibel sebagai partai kanan-tengah juga memperoleh kesempatan untuk dijadikan mitra koalisi di tubuh pemerintahan. Koalisi ini pun bertahan selama empat periode sampai pada pemilihan 1994, dibawah kanselir Helmut Kohl.

Menurunnya pamor SPD, diindikasikan karena permasalahan politik yang dipicu dari masalah inflasi ekonomi dari 1970-an sampai 1980-an, seringkali inflasi sampai dua angka dibarengi dengan angka pertumbuhan yang sangat lamban, atau sama sekali tidak ada pertumbuhan. Walhasil, pemerintahan tidak mampu untuk mengendalikannya. Mengendalikan inflasi berarti mengurangi pengeluaran pemerintah (biasanya dalam program sosial) dan menaikkan tarif suku bunga bagi uang pinjamn. Sebaliknya, kemunduran pertumbuhan ekonomi yang diakibatkannya berarti menaikkan angka pengangguran—dan kegagalan ini khususnya memberi pukulan keras kepada pemerintah untuk mempertahankan pemerintahannya.¹³

Dalam penelitian, sekitar 72.000 suara yang semula bagi SPD, beralih ke Partai Hijau Jerman pada pemilihan nasional tahun 1983 di RFJ, dan sekitar

¹³ Carlton Clymer Rodee, etc., *Op Cit*, hlm. 528

75.000 pindah ke CDU/CSU, jika dilihat dari akar permasalahannya, berarti kemunduran SPD, diindikasikan bahwa partai ini kurang mampu menjalankan fungsinya sebagai agregasi kepentingan dari masyarakat atau partisipannya.

3.4 Kajian Historis Politik Hijau di Jerman

Embrio gerakan Politik Hijau dalam konteks Jerman sendiri awalnya muncul di RFJ (Jerman Barat), seperti penelitian yang dilakukan oleh analis sosial politik Ronald Inglehart atau pun Daniel Bell, tentang masyarakat paska Industri dan masyarakat paska materialisme. Dimana RFJ merupakan salah satu negara industri yang cukup sukses membawa negaranya menjadi salah satu *icon* negara industri maju.

Kesuksesan ini merupakan usaha pemulihan ekonomi yang awalnya dibantu oleh sumber-sumber Jerman Barat yang memadai, termasuk massa pekerja terampil yang besar jumlahnya dan berdisiplin, dan didorong oleh pembatasan oleh sekutu pada pengeluaran militer Jerman Barat. Produktivitas Jerman Barat berkembang cepat sekali melebihi Inggris Raya, padahal taraf kerusakan yang diderita Inggris akibat Perang Dunia Kedua jauh lebih keil. Disamping itu Amerika Serikat juga menyediakan bantuan ekonomi yang besar kepada Jerman Barat, karena berangkat dari asumsi bahwa ekonomi Jerman Barat membaik merupakan kubu pertahanan terhadap komunisme di Eropa. Jadi, selama 1950-an dan 1960-an, pemulihan ekonomi di Republik Federal Jerman cukup mengesankan.

Setiap informasi mengenai kemajuan ekonomi ini tidak bisa lepas dari sistem politik dan stabilitas politik yang mampu diciptakan oleh pemerintah yang berkuasa. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua budaya politik Jerman mengalami perubahan yang cukup berarti. Dewasa ini politik Jerman di dominasi oleh masyarakat yang cenderung melihat politik sebagai kegiatan praktis. Politik dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai warga negara.

Perubahan-perubahan pada tingkat kesadaran politik tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan politik ekstrim. Anti-Komunisme sangat luas berkembang dalam masyarakat Jerman Barat. Bahkan pada tahun 1956 pemerintah secara resmi melarang partai komunis di Jerman. Di pihak lain,

kenangan-kenangan akan zaman Nazi, dan kekalahan yang dialami pada tahun 1945 telah pula melenyapkan partai kanan yang ekstrim. Tambahan pula keberhasilan dari Kristen Demokrat telah mulai menarik perhatian unsur-unsur konservatif yang pada awalnya agak ragu-ragu untuk mendukung partai tersebut. Dengan sendirinya, RFJ ini terdiri atas tiga partai besar yang tidak seimbang, yaitu CDU yang bergabung dengan CSU, SPD dan Partai Liberal (FDP).¹⁴ Hilangnya pengaruh dan kekuasaan kelompok ekstrim kanan maupun kiri dalam sistem politik Jerman Barat paska perang dunia kedua menempatkan Jerman Barat pada posisi negara demokratis. Dan ketiga partai di atas yang memainkan peran sebagai penyalur elit dan penjaga stabilitas politik, serta penggerak dinamika politik Jerman paska perang.

Imbas dari kesuksesan negara maju seperti Jerman Barat adalah menciptakan tingkat kemakmuran yang cukup, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi adanya iklim demokratis yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam ranah-ranah perpolitikan dan pengambilan kebijakan publik oleh negara. Disamping itu munculnya kelompok-kelompok kelas menengah dengan latar belakang pendidikan tinggi serta berbagai gerakan mahasiswa sebagai manifestasi dari kesadaran yang mereka miliki terhadap fenomena modernisasi dengan berbagai proyek industrialisasi. Asumsi mereka bahwa proyek modernitas seperti industri dan teknologi telah menimbulkan efek yang tidak hanya membahayakan kehidupan sosial budaya manusia, akan tetapi juga berdampak pada keberlangsungan lingkungan dan manusia itu sendiri sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari serangkaian sistem ekologi.

Berangkat dari asumsi tersebutlah, berbagai gerakan-gerakan kesadaran yang dimotori oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan kelas menengah, gerakan mahasiswa dan kaum muda, isu lingkunganpun muncul di Jerman Barat bersamaan dengan gerakan-gerakan radikal seperti Feminisme, Kiri Baru dan anarkisme.

Praksis, selama paska perang dunia kedua partai sayap kiri tidak mendapatkan tempat di Jerman Barat. Jadi munculnya gerakan-gerakan radikal

¹⁴ Maurice Duverger, *Op Cit*, hlm. 96

dengan berbagai latar belakang ideologi dan isu mencoba memberikan alternatif dengan membentuk partai yang cukup bisa menyalurkan aspirasi dan idealisme yang mereka miliki.

3.4.1. Masyarakat Pasca Industrialis dan Pasca Materialis

Perkembangan masyarakat modern di Eropa ditandai dengan semakin majunya dunia industri, teknologi, bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah mapan. Kondisi ini sekaligus mempengaruhi pola kehidupan sosial sekaligus nilai-nilai yang ada dalam tatanan masyarakat tersebut. Perubahan-perubahan dapat dilihat dalam konteks kultural maupun struktural.

Dalam konteks struktural, terdapat beberapa kecenderungan dasar dalam masyarakat industri maju, antara lain; Tertatanya birokrasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik dan administrasi; Munculnya pemisahan antar pemilikan sumber-sumber pada satu pihak, dan pengawasan terhadap posisi pekerjaan dan kekuasaan ekonomi pada pihak lain, maupun perluasan hak-hak politik dan pengawasan secara aktual terhadap sumber daya ekonomi dan politik; Perluasan sistem pendidikan menyebabkan munculnya perubahan dalam struktur kelas dan struktur pekerjaan, terutama dengan meningkatnya kekuatan kelompok-kelompok baru, seperti buruh pelayanan, pegawai-pegawai kantoran, teknisi-teknisi, birokrat dan kaum intelektual.¹⁵

Menurut Darmott, dampak perubahan struktural tersebut, akan menimbulkan beberapa kontradiksi, pertama, bahwa kemajuan teknologi menuntut peningkatan terus-menerus dalam kecakapan tenaga kerja, dan membutuhkan pendidikan teknik dan saintifik yang lebih. Hal ini menimbulkan situasi dimana, tenaga kerja dalam sistem teknologi maju harus terlatih (*over-trained*) dan siap pakai (*under-utilized*). Kedua dalam bidang ekonomi terdapat proses yang sejajar dalam bekerja. Upah dan gaji bertambah dan barang-barang yang mereka beli kehilangan maknanya, setelah segala kebutuhan dan kenikmatan hidup dan suplai kemewahan terpenuhi.¹⁶

¹⁵ S.N. Eisentadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 387

¹⁶ J.M.L. Darmott, "Technology: The Opiate of Intellectuals," *New York Review of Books*, 13, no.2, 1969, hlm.28, dalam Ibid, hlm.388

Dampak dari kontradiksi dalam perubahan struktural ini berimplikasi pada sosial kultural, dimana munculnya kecenderungan-kecenderungan baru dalam nilai-nilai masyarakat industri ke masyarakat pasca industri atau dari masyarakat materialis ke masyarakat pasca materialis.

Daniell Bell mengasumsikan bahwa, "Masyarakat Industri Merupakan pengkoordinasian mesin-mesin dan manusia untuk menghasilkan produk yang lebih bagus, sementara masyarakat pasca industri, diorganisir dengan ilmu pengetahuan, akses terhadap kontrol sosial, dan keragaman inovasi dan perubahan; Dan hal ini akan memberikan dampak bagi munculnya hubungan dan struktur sosial baru dan memiliki akses terhadap penentuan kebijakan politik."¹⁷

Lebih lanjut menurut Bell, ada lima aspek dalam perkembangan masyarakat pasca industri, antara lain;

1. Adanya perubahan dalam sektor ekonomi dari memproduksi barang-barang ekonomi bagus menjadi pelayanan ekonomi yang lebih baik
2. Pendistribusian tenaga kerja yang didasarkan pada profesional dan kelas teknik
3. Teori-teori ilmu pengetahuan menjadi kritis sebagai sumber inovasi dan formasi kebijakan.
4. Perencanaan masa depan bagi perubahan teknologi menjadi penting.
5. Bukan masalah teknologi mesin tapi 'teknologi' dengan pengaturan organisasional yang kompleks atau permasalahan ekologi menjadi lebih krusial.¹⁸

Jadi dalam masyarakat industri maju akhir, seperti yang terdapat di negara-negara Eropa dan Amerika, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan ke arah masyarakat yang lebih memperhatikan pelayanan atau dampak industri dari sekedar produk-produk industri itu sendiri. Kesadaran-kesadaran tersebut sekaligus imbas dengan munculnya kelompok-kelompok sosial baru, seperti kelas menengah, intelektual, dan lain sebagainya.

Periode sejarah industri dan urbanisasi masyarakat Jerman (khususnya Jerman Barat, secara intens dimulai dari tahun 1949-1990. Dalam periode ini terjadi penurunan secara gradual sektor-sektor pertanian tradisional dengan tenaga

¹⁷ E. Gene Frankland and Donald Schoemaker, *Op cit*, hlm. 43

¹⁸ *Ibid*

kerja manusia, peningkatan yang cukup pesat dalam kesejahteraan masyarakat dengan semakin meningkatnya pelayanan publik, demokrasi dan sekaligus ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, tingkat pendidikan, mobilitas sosial, dan lebih lanjut dalam hal akses ke ranah politik.

Sementara lebih lengkap, Ronald Inglehart, melihat perubahan sosial yang ada pada masyarakat industri menjadi pasca industri, merupakan perubahan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat modern yang lebih memperhatikan nilai materi (masyarakat materialis) sebagai sumber kesejahteraan, dan berubah ke arah nilai-nilai masyarakat Pasca materialis, yang lebih memperhatikan standar kehidupan dari partisipasi, kebebasan berekspresi, dan kualitas lingkungan.

Dari munculnya gerakan politik hijau Jerman merupakan manifestasi dari masyarakat pasca materialis, yang juga sejalan dengan politik kiri baru atau politik baru, yang menurut isitilahnya Inglehart, "*Politik Pasca Materialis*". Dan yang paling penting dari politik pasca materialis, adalah mereka tidak memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pada perbedaan wewenang hirarki tradisional. Akan tetapi lebih memperhatikan akan keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput dan perjuangan bagi hak-hak minoritas.¹⁹

Inglehart menambahkan, bahwa pertumbuhan masyarakat industri awal seperti di Jerman Barat, mengalami penurunan perhatian terhadap apa yang namanya pamrih individu yang merupakan tujuan masyarakat tradisional—seperti, tingkat perekonomian, jaminan hukum dan ketentraman, nilai-nilai keagamaan, keamanan nasional—seperti yang digambarkan oleh nilai-nilai "materialis" atau "politik lama". Di pihak lain, muncul proporsi pertumbuhan perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai "pasca materialis" atau nilai-nilai "Politik Baru", yang memiliki tujuan seperti kualitas hidup, pengekspresian diri, dan kebebasan individu.²⁰

¹⁹ Ibid hlm. 53-54

²⁰ Russel J. Dalton, *Change in the West German Electorate: Old and New Politics*, dalam Ursula Hoffman-Lange, *Social and Political Structures in West Germany : from Authoritarianism to Postindustrial Democracy*, Westview Press, Colorado, 1991, hlm. 67

Tabel 3.1 The Attitudes of Youth Toward Old Politics and New Politics Issues (in Percentages)

	Too Much	Just Right	Difference
Old Politics Goals			
Money and material possessions	85	4	81
Soscial and profesioanal status	63	18	45
Accumulating wealth and property	58	16	42
Dress and manners	56	15	42
Hard work	48	20	28
Personal achievment	45	25	20
Respect for authority	46	26	20
Sense of duty	33	33	0
Law and order	29	32	-3
Patriotism	25	41	-16
New Politics Goals			
Personal fredoom	20	35	-15
Developing new life-style	13	57	-44
Regard for minority interests	12	65	-53
Social justice	9	66	-57
Equality of opportuniy	7	70	-63
Citizen participation in politics	7	72	-65

Sumber : Data base studi generasi muda Jerman tahun 1979, oleh *United States Information Agency*, dalam Russel J. Dalton (1991)

Subtansi dari nilai *Politik Lama* dan *Politik Baru* bisa diilustrasikan dengan sebuah studi pada prioritas nilai generasi muda di Jerman Barat. Survey tersebut menanyakan generasi muda (berusia 15 sampai 34 tahun), dimana mereka memberikan penilaian pada masyarakat dengan penekanan pada "cukup" atau "kurang" terhadap perbedaan tipe nilai (tabel 3.1). dengan analisa faktor yang mewakili dua pertanyaan umum pada prioritas nilai, seperti yang diidentifikasi pada tabel, yakni nilai *Politik Lama* dan nilai *Politik Baru*. Dari dua bentuk sasaran ini, terlihat adanya perbedaan agenda sosial pada pemikiran generasi muda.

Nilai politik lama mencakup tujuan sosial yang secara umum diidentifikasi dengan memperhatikan tradisional politik Jerman paska perang, seperti kesejahteraan ekonomi, keamanan, status, dan ketertiban umum. Tabel 3.1

menggambarkan bahwa generasi muda merasa masyarakat Jerman Barat terlalu mengagungkan tujuan nilai yang mereka yakini. Misalnya, 85% anak muda berpikir bahwa mereka cukup dengan uang dan meteri yang mereka miliki; hanya 4% yang mengatakan mengalami kekurangan. Hampir 63% mengatakan status sosial dan profesional cukup memberikan tekanan, dan 18 persen mengatakan kurang. Hal ini tidak banyak merefleksikan pada aspek negatif masyarakat Jerman, tapi kenyataan bahwa generasi muda mengalami perubahan standar referensi diri mereka.

Generasi muda Jerman Barat menekankan sebuah agenda sosial, yakni agenda politik Baru. Nilai politik baru mencakup tujuan-tujuan seperti kebebasan personal, pengembangan gaya hidup baru, penghargaan terhadap kepentingan minoritas, keadilan sosial, kesempatan yang sama, dan partisipasi warga negara dalam politik. Generasi muda melihat tujuan-tujuan politik lama cukup menerima perhatian yang ada, dan mereka merasa adanya kurang perhatian terhadap sasaran-sasaran politik baru, misalkan Republik Federal Jerman cukup terbuka terhadap demokrasi, akan tetapi, generasi muda berpikir dibutuhkan sebuah partisipasi dan peran yang lebih besar serta tanggung jawab bagi warga negara untuk memberikan masukan. Hanya 7 persen generasi muda berpikir bahwa cukup banyak kesempatan partisipasi, dan 72 persen mengatakan adanya kekuarangan. Hanya 7 persen yang berpikir cukup adanya keseimbangan dan 70 persen mengatakan kurang sama sekali.²¹

Konflik antara, politik lama dan politik baru ini, merepresentasikan babak baru dalam perkembangan politik Jerman. Kondisi ini kembali memunculkan ketidakstabilan dan ketidakyakinan terhadap sistem politik di Jerman Barat. Berbagai tuntutan akan perubahan sosial dan politik menjadi substansi di Jerman Barat, dan munculnya kontra antara tuntutan politik baru dengan politik yang mapan bisa diharapkan terus berlanjut dan membawa perubahan yang cukup signifikan. Beberapa bentuk perlawanan ini bisa dilihat dari demonstrasi publik di jalan-jalan terhadap isu pengembangan energi nuklir dan persenjataan NATO. Disamping itu, mereka juga mengambil tempat dan masuk ke dalam sistem kepartaian. Meskipun sistem politik di Jerman Barat termasuk salah satu sistem

²¹ Ibid hlm. 68-69

yang cukup stabil, munculnya gerakan politik baru ini tidak akan mengurangi kestabilan sistem politik itu sendiri.²²

Jadi, pembaharuan politik yang menjadi tuntutan sebagian besar generasi muda paska perang dunia kedua di Jerman Barat dapat diidentikan dengan ketidakpuasan terhadap sistem partai yang ada. Masyarakat merasakan adanya kebutuhan untuk menyalurkan berbagai kepentingan baru dan mendesak. Namun dalam konteks itu, sistem partai yang telah mapan dirasa kurang siap melakukan kehendak tersebut. Akibatnya masyarakat mencoba menerobos masuk ke dalam sistem partai yang ada. Sebaliknya sistem-sistem partai juga tidak ketinggalan memberikan tanggapan sesuai dengan tradisi masing-masing partai.

Seperti kita lihat di Inggris, Partai Konservatif di bawah Margaret Thatcher, mencoba melakukan perubahan-perubahan dalam tradisi partainya dengan konsep neo liberalnya, kemudian terakhir juga dilanjutkan oleh penerusnya Tony Blair, yang mencoba tawaran "Jalan Ketiga" dari Anthony Giddes, pun di Jerman, Sosial Demokrat yang awalnya meneruskan tradisi sayap kiri turunan sosialis Marxis, mulai melirik dan kompromis terhadap ide-ide liberal kapitalis, dan partai ini lebih bersifat kiri-tengah. Pembaruan ini, tidak lebih sebagai respon terhadap dinamika perubahan sosial politik yang begitu signifikan, khususnya di negara-negara industri maju di Eropa,

3.4.2. Gerakan Aksi Mahasiswa dan Kelas Menengah Radikal Baru

Dampak Industrialisasi terhadap lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang telah menghambakan manusia kepada materi, menjadi keresahan generasi muda, mahasiswa dan kalangan kelas menengah. Ini bisa dilihat dari munculnya gerakan sosial baru pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Gerakan-gerakan aksi yang terjadi mengagendakan bagi perubahan dalam kebijakan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial politik.

Munculnya gerakan ini diasumsikan sebagai reaksi dari ketidakpuasan orang-orang tersebut terhadap lembaga sosial dan politik yang mendasari masyarakat kapitalis. Menurut Habermas, munculnya gerakan ini juga merupakan reaksi protes terhadap masyarakat modern, dimana keterlibatan negara dalam

²² Ibid hlm.75

pengembangan ekonomi, sosial dan kehidupan keluarga, telah menimbulkan 'pengkolonisasian terhadap kehidupan dunia', dalam areal kehidupan yang lebih luas oleh subjek negara dan penentuan pasar (Habermas, 1981).²³ Gerakan sosial baru ini mencakup gerakan lingkungan, perdamaian, gay dan lesbian, gerakan mahasiswa dan gerakan kelas menengah..

Gerakan-gerakan mahasiswa ini terkenal vokal dan kritis, universitas menjadi suatu hal yang krusial dalam penyaluran aspirasi mereka. Universitas dianggap sebagai tempat dan simbol tentang ketidak sesuaian antara realitas sosial dan kebudayaan modern, dan sebagai satu-satunya tempat yang mampu melembagakan masalah-masalah bagi kreativitas dan partisipasi yang inheren dalam pandangan modern. Selain itu, Universitas Sebagai institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai sumber dasar bagi keabsahan bagi tatanan sosial modern.

Dampak lain dari munculnya perhatian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat modern, adalah karena pengaruh lingkungan sosialnya, mereka bukan lagi suatu lingkungan kecil yang tertutup dan terisolir. Mereka merupakan suatu kelompok yang berasal dari kolektivitas yang lebih luas dari aspirasi-aspirasi status intelektual mereka, yang merupakan satu segmen besar dari masyarakat yang terdidik. Karenanya kelompok-kelompok semacam ini memiliki persinggungan dengan pusat-pusat kreativitas intelektual dan transmisi kebudayaan dan merupakan bagian yang terpadu daripadanya. Kedekatannya dengan pusat-pusat itu sendiri menjamin bahwa gerakan mahasiswa akan sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat.²⁴

Kreativitas intelektual mereka terbangun bersamaan dengan idealisme radikal kiri baru, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi masyarakat modern, baik berangkat dari asumsi kapitalisme maupun sosialisme komunisme. Gerakan-gerakan hak-hak sipil dan perdamaian tahun 1960-an misalnya, merupakan gerakan yang memiliki kerangka pemikiran dari mahasiswa kiri baru.

Gerakan kiri baru pada awal tahun 1960-an, jelas memiliki perbedaan dengan tradisi kiri lama. Kiri lama sendiri termanifestasi dalam partai komunis, organisasi kiri yang dominan pada dekade 1930-an, tapi juga termasuk sosial

²³ Abigail Halcli, *Social Movement*, dalam *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present*, Gary Browning, ect., SAGE Publications, London, 2000, hlm. 469

²⁴ S.N. Eisentadt, *Op Cit*, hlm 397-398

demokratik. Gerakan ini juga anti terhadap kebijakan komunis Stalinisme. Yang mereka anggap telah menyengsarakan rakyat dengan rejim otoriter dan sangat jauh dari asumsi humanismenya Marxist.²⁵ Idealisme Kiri Baru telah menjadi *trade mark* gerakan-gerakan sosial mahasiswa pada dasawarsa tersebut. Suara-suara protes yang mereka lakukan dengan berbagai aksi demonstrasi, pemboikotan pendudukan gedung memperoleh perhatian dan dukungan publik.

Dan gerakan sampai pada dasawarsa tahun 1980-an, bisa dipahami sebagai bentuk revolusi partisipasi dan menempatkan pada konteks munculnya politik baru. Pada masyarakat Jerman Barat, reaksi nya juga pada kompetensi elit politik, melalui isu perdamaian mereka menggunakan mobilisasi masa.

Partisipasi politik masyarakat Jerman mengalami perubahan yang bagus selama tiga dekade terakhir. Sebelumnya, studi klasik Almond dan Verba, pada tahun 1963 (1950-an) terhadap budaya politik masyarakat Jerman cukup pasif, dan pada waktu yang sama partisipasi aktif masyarakat sangat rendah dalam proses politik. Namun pada dasawarsa 1980-an, menurut David Conredt(1980), mengalami peningkatan positif, dimana meningkatnya partisipasi masyarakat yang cukup mengagumkan, masyarakat Jerman Barat sudah mulai mengadopsi secara normal apa yang disebut demokrasi Barat.²⁶

Gerakan partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk keikutsertaanya berperan dalam proses politik seperti pemilu yang bersifat konvensional. Bahkan mereka berani memperjuangkan hak-hak mereka dengan berpartisipasi dalam perancangan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintahan. Pola-pola *unconventional* partisipasi politik ini bisa dilakukan dengan berbagai taktik seperti, demonstrasi, pemboikotan, perlawanan pajak, pemogokan industri, pendudukan gedung, pemblokiran jalan raya, dan lain sebagainya.²⁷

Gerakan sosial baru ini, juga dimobilisasi dengan adanya partisipasi kelas menengah baru. Mereka berasal dari berbagai kelompok profesional terpelajar, pekerja dari berbagai sektor publik, yang memiliki perhatian dan dukungan sangat tinggi terhadap gerakan sosial baru yang ada. Partisipan tidak direkrut berdasarkan

²⁵ Barbara Eipstein, *Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action in The 1970s and 1980s*, University of California Press, Oxford, 1991. hlm.34

²⁶ Rüdiger Schmitt, *Op Cit*, hlm. 175

²⁷ *Ibid*

pada kedudukan kelas, tapi lebih didasarkan pada karakteristik dasar seperti ras, etnisitas, jenis kelamin, yang bisa bergabung dan memperjuangkan apa yang mereka protes. Dan hal ini sangat membantu pada penempatan mereka pada pusat-pusat gerakan sosial baru.²⁸

Menurut Robinson, untuk mendefinisikan “kelas menengah” dalam pengertian politik yang manapun merupakan proporsi yang sulit, karena walaupun digunakan secara umum, istilah tersebut bisa juga menimbulkan bias. Dalam tingkat yang lebih luas dan populer istilah itu biasanya diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang, yang dianggap berada di antara buruh dan petani, atau kelas bawah satu pihak dan kelas yang berkuasa, apakah itu feodal, atau kapitalis di pihak lain.²⁹ Masyarakat kelas menengah menurut pandangan/pemikiran ini memiliki ketrampilan, relatif kaya, dan memilih nilai-nilai individualisme, skularisme, dan rasionalisme.

Johnson dkk, lebih memilih menggunakan “kelompok menengah” (*intermediate group*), sebuah kumpulan dinamis yang tumbuh dalam ruang diantara dua kelas yang terpolarisasi. Menempati strata wiraswastawan komersial, finansial, dan profesional dalam ekonomi. Sebagaimana banyak di negara-negara maju, mereka bukanlah kaum borjuis dalam arti bermakna, mengingat mereka tidak memiliki dan tidak mengendalikan pemilikan alat-alat produksi.³⁰

Hampir sama dengan Johnson, Samuel P. Huntington melihat kelas menengah dengan menunjuk pada kelompok masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai pengusaha, kaum profesional, guru, pegawai sosial, manajer, teknisi dan pekerja dalam bidang penjualan. Keadaan kelas ini dipandang semakin besar sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi global yang semakin pesat.³¹

Kelompok-kelompok kelas menengah yang tumbuh di Eropa pada umumnya atau Jerman Barat Khususnya, ini tidak memiliki afiliasi terhadap partai-partai politik yang ada baik itu dari partai sayap kiri maupun sayap kanan, sehingga ketika muncul gerakan-gerakan sosial yang cenderung sesuai dengan apa

²⁸ Abigail Halcli, *Op Cit*, hlm. 470

²⁹ Sudijino Sastroatmodjo, Drs., *Prilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang 1995, hlm. 140

³⁰ Ibid, hlm. 125

³¹ Samuel P. Huntington, *Demokrasi Gelombang Ketiga*, Gramedia, 1995, hlm.81

yang menjadi tuntutan mereka, langsung mendapat respon dan dukungan yang cukup tinggi.

Kelompok-kelompok tersebut berkolaborasi dan menjadi agen perubahan yang sangat penting. Kelompok kelas menengah ini juga terdiri kalangan muda, berpendidikan dan intelektual sekuler, dan mereka menjadikan ide-ide kiri baru sebagai pusat gerakan. Dan kelompok inilah yang disebut Kiri Baru, Pasca materialis atau kelompok libertarian Kiri. Yang secara personal tergabung dalam gerakan-gerakan kelompok perdamaian, feminis, ekologis dan membentuk partai baru dalam masyarakat pasca industri.³²

3.4.3 Dari Gerakan Aksi ke Partai

Dalam memperjuangkan dunia yang lebih baik, sebagian aktivis ekologi, feminsime, atau lebih luas Kiri Baru lalu melihat politik sebagai salah satu jalan yang harus diambil. Kekuasaan dan lembaga negara harus bisa direbut, meski nanti perannya akan dikurangi. Walaupun ada sebagian yang masih bertahan berjuang dengan gerakan aksi, Maka lahirlah apa yang dinamakan Partai Hijau.

Dengan mengusung ekologi sebagai payung gerakan, kelompok radikal kiri dan kelompok reformis lainnya mengkolaborasikan diri untuk membentuk Partai Hijau pada tingkat negara Federal, negara bagian dan lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Detlef Murphy dan Roland Roth, penawaran ekologi bersifat universal dan merupakan konsep yang cukup fleksibel dan bisa di terima oleh semua kalangan.³³

Seperti yang tertuang dalam prinsip Partai Hijau Jerman, "kita disatukan oleh beberapa prinsip dasar, bukan karena ideologi. *Alliance90/The Greens* tumbuh bersama dari berbagai akar. Sebagai partai ekologi kita mengadopsi tradisi kiri, nilai dan prinsip tradisional liberalisme. Kita mengkombinasikan ekologi, *self-determination*, perluasan keadilan, dan pengembangan demokrasi, dan komitmen terhadap anti-kekerasan, serta hak azazi manusia.³⁴

³² E. Gene Frankland and Donald Schoemaker, *Op cit*, hlm. 43

³³ *Ibid*, hlm 34

³⁴ *The Future is Green : Alliance90/The Greens (Party Program and Principles)*, hlm. 5, diakses dari situs resmi partai hijau Jerman *Alliance90/The Greens* <http://www.archiv.gruene-partei.de/dokumente/grundsatzprogramm-english.pdf> pada tanggal 23 Maret 2003

Dan kehadiran partai ini menjadi tantangan bagi partai-partai tradisional. Fokus mereka sekaligus terhadap alam dan manusia. Sistem birokrasi yang mereka terapkan bersifat *bottom up* dan memberikan kesempatan pada komunitas lokal untuk menentukan kebijakan. Karena partai hijau sepakat bahwa mereka berbeda dengan partai lainnya, dan mereka antipati terhadap hirarki, birokrasi, dan sentralisasi kekuasaan dan untuk itu mereka menerapkan desentralisasi struktur partai sebagai manifestasi demokrasi akar rumput yang merupakan salah satu prinsip partai tersebut.³⁵

Disamping kevakuman partai sayap kiri di Jerman Barat, sebagai akibat pelarangan keberadaannya di negara ini, ditambah dengan berpindahnya haluan Partai Sosial demokrat menjadi kiri-tengah, dan cenderung kompromi dengan kebijakan kapitalis, praksis mereka yang masih percaya dengan ideologi sosialis, tidak menemukan tempat sebagai penampung aspirasi politik mereka. Dan kehadiran partai Hijau yang tidak jauh berbeda dengan tradisi sayap kiri, cukup memberikan angin segar sebagai mediator keinginan politik mereka.

Munculnya partai-partai Hijau di Eropa Barat, dan khususnya di Jerman kurang lebih mirip dengan penyebab munculnya kelompok-kelompok kepentingan khusus atau *single issue interest group* di Amerika. Partai Hijau di Eropa muncul juga diakibatkan karena partai-partai yang telah mapan baik yang sedang berkuasa maupun yang sedang berposisi dianggap kurang berhasil menanggapi tuntutan mereka. Partai-partai tradisional yang *established* (mapan) biasanya sibuk dengan urusan pemilihan dan kampanye. Partai-partai di hampir semua negara industri maju kurang tanggap terhadap kebutuhan untuk melakukan pembaharuan program partai. Mereka kurang berminat dengan urusan lingkungan hidup dan gaya hidup yang lebih sehat dan alamiah serta hubungan dengan negara-negara miskin di dunia ketiga. Kelompok-kelompok kepentingan yang menganggap partai-partai lama kurang simpatik terhadap akhirnya meleburkan diri dan membentuk partai yang dinamakan Partai Hijau.³⁶

³⁵ E. Gene Frankland and Donald Schoomaker, *Op cit*, hlm. 35

³⁶ Drs. Eambang Cipto, M.A, *Op Cit*, hlm. 130

3.4.4. Partai Hijau Jerman (*The Grunen -The Green*)

Partai Hijau di Jerman, sejauh ini tetap merupakan kelompok terkuat di antara partai-partai Hijau Eropa Barat. Kemunculannya secara struktural dimulai didirikannya Aliansi Politik Alternatif (SPV) pada Maret 1979, untuk mengikuti pemilihan di tingkat parlemen Eropa pada tahun yang sama. Kemudian diikuti kesuksesan mereka dengan memperoleh 3,2 persen suara, mereka mulai melakukan usaha serius membuat format partai di tingkat nasional (federal), setelah mengalami berbagai perdebatan panjang dari berbagai kelompok dalam kerangka isu yang sama, akhirnya pada 12 dan 13 Januari 1980, didirikan Partai Hijau (*Die Grunen*) Jerman. Partisipasi pada pemilihan federal tahun 1980 menghasilkan sedikit kekecewaan hanya mencapai 1,5 persen jumlah suara. Dalam kekecewaan akibat pemilu 1980, Partai Hijau antara 1979 dan 1982 cukup sukses pada pemilu di tingkat lokal dan negara bagian (*Länder*). Pada Maret 1983 Partai Hijau mampu meningkatkan jumlah pendukung, dengan memperoleh 5,6 persen jumlah suara pada pemilihan nasional, dan mendapatkan sebanyak 27 kursi di *Bundestag*. Kemudian pada pemilihan di tingkat parlemen Eropa, Partai Hijau memenangkan sebanyak 8,2 persen suara dengan memperoleh 7 kursi di parlemen Eropa tersebut³⁷. Kondisi ini merupakan suatu prestasi yang cukup mengagumkan bagi Partai Hijau Jerman sebagai partai pendatang baru, yang mampu menyaingi keberadaan partai-partai mapan yang sudah ada.

Untuk periode pemilihan tahun 1983 ini, juga ditandai dengan menurunnya pamor partai berkuasa, yakni SPD. Dimana SPD mengalami penurunan jumlah suara dari 43 persen tahun 1976, menjadi 38,2 persen suara tahun 1983 di parlemen, partai ini mengalami penurunan jumlah suara yang cukup signifikan, karena ketidakmampuan menangani krisis pada akhir 70-an, dengan kehilangan 750.000 suara yang beralih ke Partai Hijau, dan lebih dari dua juta suara ke Kristian Demokrat. Secara umum dikatakan bahwa Partai Hijau merupakan produk dari fragmentasi nya SPD, dimana mereka yang kecewa dan tidak puas di dalam pemerintahan SPD keluar dan mencari alternatif partai yang sesuai, dan Partai Hijau merupakan alternatif yang menjadi pilihan mereka.

³⁷ Ferdinan Müller-Rommel. Green Parties and Alternative Lists under Cross-National Perspective, dalam Ferdinan Müller-Rommel, *Op Cit*, hlm. 11

Jumlah mayoritas pendukung Partai Hijau adalah mereka yang kecewa terhadap SPD tersebut.³⁸

Bahkan, dengan Jelas Kanselir Willy Brandt's menyatakan bahwa Partai Hijau merupakan anak-anak SPD yang hilang, sebagai akibat dari buruknya penampilan pemerintahan selama tahun 1970-an. Krisis ekonomi membawa partai memilih menjalankan pemerintahan sendiri daripada menggunakan unsur pokok demokrasi akar rumput, yang ikut melibatakan lapisan masyarakat dalam menangani krisis.³⁹

Tabel 3.2 Suara untuk Partai Hijau Jerman: Pemilu Nasional 1980-1990

	Persentase Suara (%)	Jumlah Kursi	Suara rata-rata
1980	1,5	Tanpa kursi	1,5
1983	5,6	27 kursi	5,6
1987	8,3	42 kursi	8,3
1990	4,8 (West Germany)	Tanpa Kursi (W)	-
	6,0 (East Germany)	8 Kursi (E)	5,1

Sumber : E. Gene Frankland and Donald Schoomaker (1992; 69)

Menurut E. Gene Frankland, disamping asumsinya Ronald Inglehart tentang perubahan orientasi nilai masyarakat materialis ke paska materialis, untuk menjelaskan munculnya Partai Hijau Jerman, diperlukan juga untuk melihat konteks sejarah perubahan sistem partai di Jerman Barat. Salah satunya bisa diidentifikasi dengan lima fase perubahan pada tiga dekade pertama, yakni 1950-an sampai 1970-an. Pertama, adanya penghilangan Sistem Weimar—seperti partai-partai minoritas dan munculnya “Sistem Bonn” yang mencakup tiga partai besar yaitu Kristen Demokrat (CDU/CSU), Sosial Demokrat (SPD) dan Demokrat Bebas (FDP). Sampai tahun 1961 seluruh partai minoritas sudah keluar dari *Bundestag* dan juga banyak juga di tingkat *Landtage* (parlemen di tingkat lokal atau negara bagian). Kedua, didorong oleh susksenya Kristen Demokrat dengan strategi “*Catch-all*”, SPD sendiri mengalami transformasi dari ideologi partai

³⁸ Stephen J. Silvia, ‘Loosely Coupled Anarchy’ : the Fragmentation of the Left, dalam Stephen Padgett, ed., *Parties and Party Systems in the New Germany*, Dartmouth, Brookfield USA, 1993, hlm. 171-176

³⁹ Sheri Berman, *The Life of Party*, *Comparative Politica*, October 1997, vol. 30, Number 1, hlm109

kelas pekerja menjadi pragmatis *Volksparteis* (Partai Rakyat) selama akhir 1950-an sampai awal dasawarsa 1960-an. Tidak hanya dalam program-program yang lebih moderat dua partai ini bersaing, tetapi juga di tingkat profil sosial wakil-wakil mereka yang diutus ke parlemen menjadi lebih meningkat. Ketiga, pada akhir 1960-an diikuti sebuah periode transisi dari koalisi besar antara CDU/CSU dengan SPD, ditambah menguatnya partai sayap kanan Nasional Demokrat (NPD) pada pemilihan lokal, dan protes keras oleh APO (Extra-parliamentary Opposition) yang beraliran kiri—ini merupakan pengalaman pertama kali Republik Federal mengalami perubahan kekuasaan pemerintahan di Bonn, dari tradisi kanan-tengah (*center-right*) menjadi kiri-tengah (*center-left*). Kemudian CDU datang mengontrol kekuasaan di bawah pemerintahan koalisi SPD-FDP, agenda reformasi yang menjadi program mereka mengalami perkembangan yang cukup sulit. Empat, pada awal dan pertengahan 1970-an kelompok ekstra parlemen mengalami perkembangan, kelompok non partisan *Bürgerinitiativen* (kelompok aksi masyarakat) memfokuskan pada permasalahan lokal dan regional yang diabaikan oleh partai-partai mayoritas yang sudah mapan. Hasil polling mengindikasikan bahwa lebih banyak masyarakat Jerman yang terlibat aktif di *Bürgerinitiativen* daripada menjadi anggota partai-partai mayoritas. Lima, selama akhir tahun 1970-an di tengah-tengah berkembangnya kenyataan bahwa hilangnya kepercayaan terhadap partai-partai mapan, ini ditunjukkan dengan peluncuran tipe “partai” baru mulai dari tingkatan lokal sampai ke tingkat negara bagian.⁴⁰

Di samping beberapa poin di atas, beberapa asumsi lain mengatakan bahwa munculnya Partai Hijau Jerman dilatar belakangi oleh kondisi sosial masyarakat Jerman sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Herbert Hoenigsberger, bahwa munculnya partai Hijau ini, dikarenakan FRG memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan industri otomobil yang banyak, dengan penggunaan energi yang cukup tinggi, memiliki sumber dan daerah permukaan tinggi, dan negara ini mengalami bahaya yang cukup mengkhawatirkan akibat berbagai limbah dan khususnya dari limbah industri. Selain itu Jerman sendiri memiliki latar belakang sejarah yang memiliki berbagai

⁴⁰ E. Gene Frankland, Federal Republic of Germany: “Die Grünen”, dalam Ferdinand Müller-Rommel, *Op Cit*, hlm. 61-62

masalah, seperti: kemiskinan, kelaparan, penderitaan, perang sipil dan konflik luar negeri. Sehingga di Jerman tidak hanya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan akan standar hidup lainnya.⁴¹

Jadi dari beberapa paparan di atas, tentang berbagai faktor yang menggambarkan munculnya Partai Hijau Jerman yang semula hanya merupakan kelompok-kelompok gerakan sosial, merupakan respon atas ketidakpuasan dari sistem-sistem partai mapan (baik itu konservatif maupun non-konservatif) yang sudah ada. Dalam konteks ini, salah satu pertanyaan dari akar permasalahan yang penulis ajukan pada bab sebelumnya, cukup bisa terjawab dengan beberapa asumsi (kerangka pemikiran) tentang kepartaian. Seperti yang diungkapkan oleh Sigmund Neuman, dalam hal ini partai-partai mapan yang sudah ada tidak mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat di Jerman Barat yang mengalami perubahan yang cukup signifikan dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai baru. Hal ini yang tidak mampu di respon oleh partai-partai mapan, sehingga ada kecenderungan dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas, untuk mencari alternatif-alternatif lain.

Dan dalam kondisi seperti ini, kehadiran partai Hijau di Jerman, cukup memiliki *greget* sebagai mediator dari kepentingan-kepentingan dan aspirasi politik yang ada. Karena Partai Hijau memiliki karakteristik dan tawaran-tawaran yang cukup menjanjikan dan cenderung sesuai dengan apa yang berkembang dalam referensi masyarakat paska industri maju seperti Jerman. Tawaran-tawaran partai Hijau ini, bisa tercermin dalam prinsip, nilai serta proyek-proyek yang meletakkan kepentingan ekologi sebagai patokan utama.

Akan tetapi, beberapa kerangka pemikiran dan konsep yang berusaha menjelaskan keberadaan suatu partai dalam sistem politik demokratis, cenderung berangkat dari tradisi politik dengan dikotomi kiri dan kanan. Sementara, kehadiran partai Hijau berangkat dari isu yang berbeda, jadi untuk menjelaskan mengapa partai Hijau Jerman lebih berkembang di banding partai Hijau di negara-negara industri lainnya, dibutuhkan pisau analisa lain yang lebih komprehensif untuk bisa menjelaskan fenomena tersebut.

⁴¹ Herbert Hoenigsberger, *The Green in Federal Republic of Germany*, Pakistan Horizon, Volume 43, no. 4, Oktober 1990, The Pakistan Institute of International Affairs, Karachi, Pakistan, hlm. 53-54

Jika berangkat dari asumsi-asumsi dari teoritis yang ada tersebut, tidaklah cukup, karena munculnya partai Hijau sangat berbeda dengan munculnya partai-partai tradisional lainnya, seperti dalam tahapan-tahapan terbentuknya partai yang dikemukakan oleh Almond, yang penulis gambarkan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini perlu adanya pemikiran ulang dalam sistem partai yang memiliki korelasi kuat dengan perubahan-perubahan dalam sistem masyarakat paska industri atau paska materialis, seperti bahasanya Inglehart.

Thus, munculnya politik Hijau yang menyatukan kepentingan dari berbagai latar belakang ideologi, prinsip dan kepentingan dalam sebuah wadah partai (Partai Hijau), dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Herbert Kitschelt's *The Logic of Party Formation*. Kitschelt sudah berhasil dalam mengkombinasikan sebuah teori pertumbuhan partai dengan sebuah gambaran yang kaya dari formasi partai Hijau di Jerman Barat, dan Belgia.⁴²

Menurut Kitschelt, fungsionalis konvensional dan model aktor rasional partai politik tidak bisa untuk menjelaskan perubahan pola format dari formasi partai seperti yang ditampilkan oleh Partai Libertarian kiri (partai Hijau). Dalam model ini, usaha untuk memperoleh kursi dalam pemilu merupakan tujuan utama dari formasi partai yang ada. Partai-partai biasanya mengadopsi strategi yang paling efisien dan format organisasi untuk mencapai tujuan objektif partai tersebut. Namun, ideologi dan keyakinan tetap penting dan bisa mempengaruhi organisasi dan strategi partai.⁴³

Sementara, Menurut Kitschelt, yang diterapkan partai Hijau, tidak murni logika dari kompetisi partai, tapi lebih kurang sebuah "representasi logika konstitusi". Dengan demikian, menurut pandangannya partai Hijau merepresentasikan secara fundamental pola baru dari partai politik yang merupakan kumpulan tersendiri dan terpisah dari partai-partai tradisional di Eropa Barat.

Representasi logika konstitusi merupakan variabel dalam kelompok aktivis partai yang dilihat dari: *ideologis*, *Lobi-lobi*, dan *pragmatis*. tiga kondisi inilah yang dalam partai Hijau menentukan kekuatan partai. Tiap bagian memiliki

⁴² Mathias Kaelberer, *The Emergence of Green Parties in Western Europe*, *Comparative Politics*, Vol.25, January 1993, hlm. 234

⁴³ *Ibid.*

tingkat mobilisasi, responsivitas dan keterbukaan bagi tuntutan baru. Tiga variabel tersebut merupakan kunci variabel independen dalam teori Kitschelt yang menjelaskan strategi dan pilihan organisasi partai Hijau. Dengan kata lain bisa dikatakan, tingkatan tertinggi dari pemilahan mobilisasi dan perilaku elit dikombinasikan dengan rendahnya posisi kompetisi partai Hijau yang diadopsi oleh kelompok fundamentalis dari *logic of constituency representation*, sementara realis sebaliknya berusaha menempatkan posisi partai pada tingkat kompetitif dengan partai-partai lainnya. Di antara dua kelompok inilah yang akan menentukan strategi dan pilihan organisasi.

Jadi secara teoritis, Kitschelt melihat dinamika pertumbuhan partai dalam kasus partai Hijau lebih ke internal partai, dimana dengan konsep *representasi logika konstitusi* partai Hijau berkembang dengan logika yang ada dalam tubuh partai, dan hal ini sekaligus merepresentasikan identitas partai yang berbeda dengan partai-partai lainnya.

3.6 Reunifikasi Duo Jerman

Reformasi demokrasi besar-besaran Michael Gorbachev dengan Glasnost dan Perestroikanya, tidak hanya berpengaruh dalam konteks USSR sendiri, akan tetapi juga berimbas terhadap stabilitas sosial politik di negara-negara Eropa lainnya. Rezim komunis Jerman Timur Erich Honecker yang anti reformasi akhirnya tidak dapat membendung arus reformasi tersebut dan akhirnya tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. Runtuhnya tembok Berlin tanggal 9 November 1989 membawa era baru hubungan RFJ-RDJ. Gagasan penyatuan Jerman yang sebelumnya dianggap mustahil, telah menjadi topik yang tidak hanya dalam Jerman saja, akan tetapi ikut menjadi masalah internasional.⁴⁴

Usul 10 butir Kanselir Helmut Kohl tanggal 28 November 1989 yang berintikan proses penyatuan melalui tahapan komisi bersama, konfederasi dan federasi terpaksa harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat, antara lain pertemuan "2+4" antara para Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan kedua Jerman dalam rangka pertemuan "Open Sky" di Ottawa pada awal Februari 1990. Pertemuan "2+4" ini

⁴⁴ Berlarinya Menyongsong Kebebasan, Scaia, Majalah Republik Federal Jerman, 1/1990, hlm. 10-11

kembali di Lanjutkan di Bonn, Berlin, Paris dan terakhir pada bulan Septemebr 1990 di Moskow, dimana ditandatangani perjanjian antara Sekutu dan Jerman yang mengatur aspek luar negeri Jerman yakni, mengenai kekuatan angkatan bersenjata RFJ, keanggotaan Jerman dalam NATO dan juga perbatasan RFJ-Polandia.⁴⁵

Aspek dalam negeri diatur melalui dua perjanjian yaitu perjanjian penyatuan ekonomi keuangan dan sosial yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1990, dan penyatuan politik, pemerintahan dan Hukum yang mulai berlaku tanggal 3 Oktober 1990. pemilu bersama yang pertama sejak tahun 1933 dilaksanakan tanggal 2 Desember 1990.

3.6.1 Neo Jerman dan Sistem Politik

Setelah Reunifikasi Jerman yang menyatakan diri dalam bentuk Republik Federal Jerman, otomatis sistem politik dan pemerintahan negara ini mengadopsi sistem yang digunakan sebelumnya oleh RFJ (Jerman Barat). Undang-undang Dasar RFJ (*Grundgesetz*) yang mulai diberlakukan secara resmi 3 Oktober 1990 untuk seluruh Jerman (RFJ setelah reunifikasi) merupakan pembaharuan dari UUD tahun 1949, dengan perubahan pada mukadimah dan pasal penutup setelah tercapainya perjanjian penyatuan Jerman.⁴⁶

Pada Artikel pembukaan konstitusi yang baru ini, jelas mencerminkan konstitusi yang cukup liberal dan demokratis. Dimana artikel tersebut menjamin harkat dan martabat sesama manusia, kebebasan dalam pengembangan pribadi, persamaan untuk setiap orang di depan hukum dan kebebasan dalam kpercayaan dan keyakinan. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama dan tidak seorangpun dibedakan baik dari segi sex, keturunan, ras, bahasa, asal, keyakinan dan agama maupun keyakinan politiknya. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat dan pikirannya, baik melauai ucapan, tulisan, maupun gmabar-gambar.⁴⁷

Beberapa prinsip dalam *Grundgesetz* yang tidak dapat diubah adalah bentuk negara Jerman yaitu bentuk negara federasi, pembagian kekuasaan,

⁴⁵ Keterangan Dasar Republik Federal Jerman, *Op Cit*, hlm. 5-6, lihat juga usul 10 butir Helmut Khol pada *Suatu Pembagian yang teratasi Secara Damai*, Scala, Majalah Republik Federal Jerman, 1/1990, hlm. 15-17

⁴⁶ Dr. Arno Kappler, ed., *Political System, Constitution and Law: An excerpt from "Facts About Germany"*, Press of the Federal Goyernment, Bonn, 1996, hlm. 2

⁴⁷ *Ibid*, 3-5, lihat juga Keterangan Dasar Republik Federal Jerman, *Op Cit*, hlm. 4

prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan negara sosial, hak-hak asasi martabat manusia, kesamaan derajat dan kebebasan. Kemudian dalam perkembangannya, khususnya pada pasal 23, yang semula berisi “kehendak penyatuan Jerman” setelah penandatanganan Perjanjian Maastricht diubah “Kehendak RFJ untuk mencapai Eropa bersatu dengan struktur demokratis, bertata negara hukum, sosial dan federalistis.”⁴⁸

Jerman yang terdiri dari 16 negara bagian, menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Para pemilih Jerman memilih wakil-wakilnya untuk duduk di legislatif (Bundestag) yang akan memilih kepala pemerintahan (kanselir). Kanselir Jerman merupakan pemegang kekuasaan eksekutif utama, partai-partai di Jerman adalah pemasok tunggal calon kanselir (kecuali untuk kasus-kasus tertentu dan istimewa).⁴⁹ Dalam sistem demokrasi parlemen modern, partai politik memiliki fungsi yang cukup krusial, baik bagi rakyat maupun bagi birokrasi pemerintahan. Personalitas dan program partai memainkan peran yang cukup penting dalam penentuan kebijakan politik suatu negara, dan mereka yang mayoritas duduk di parlemen akan banyak menentukan kebijakan-kebijakan suatu negara.

Sebagai negara yang demokratis, Jerman sangat menjamin kebebasan berpartisipasi dan berekspresi dalam politik bagi warga negaranya. Dalam hal ini partai sangat berperan untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat tersebut, seperti tertuang dalam *Grundgesetz* RFJ, artikel 21 menyatakan : “*The parties shall participate in the forming of the political will of the people.*” dengan demikian, rakyat Jerman diberikan jaminan secara konstitusi untuk memilih dan mendirikan partai sesuai dengan keyakinan politik mereka. Partai-partai politik Jerman aktif dalam parlemen nasional (*Bundestag*), lembaga legislatif negara bagian (*landtage*) dan di tingkat distrik dan dewan kota (*Kreistage* dan *Gemenderäte*). Walaupun pada tiap level memiliki jumlah suara yang berbeda, akan tetapi mereka tetap merepresentasikan nilai-nilai dasar yang menjadi orientasi bersama dalam suatu partai.⁵⁰

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Susan Steiner, ed., *Federal election in Germany*, German Information Center, New York, 1998, hlm. 2

⁵⁰ *The Political Parties in the German Bundestag*, Inter Nationes, Bonn, 1999, hlm. 1-4

Walaupun konstitusi Jerman memberikan kebebasan yang cukup luas bagi masyarakatnya, namun tetap ada batasan-batasan, dimana partai-partai yang bertujuan menyingkirkan azas-azas demokrasi bebas, keberadaannya dapat dilarang. Larangan tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh Pengadilan tertinggi, yakni Majelis Konstitusi Federal. Untuk dapat terwakili di *Bundestag* setiap partai harus dapat memperoleh paling sedikit 5% dari seluruh suara yang masuk dalam pemilu nasional (*electoral treshold*), atau sekurang-kurangnya sanggup memenangkan 3 kursi langsung. Ketentuan ini yang merupakan halangan bagi partai-partai kecil untuk dapat terwakili ke dalam *Bundestag*.⁵¹

Walupun Jerman menggunakan sistem multi partai, dan memiliki kurang lebih 36 partai pada pemilu pertama tahun 1949, dan pada tahun 1980 terdaftar 29 partai besar dan kecil, akan tetapi sejauh ini, hanya terdapat lima partai besar yang terwakili dalam parlemen Republik Federal Jerman. Yaitu partai-partai, CDU/CSU, SPD, FDP, Hijau (Bundnis 90/die Grunen) dan PDS.

Di alam demokrasi Jerman, partai politik merupakan elemen yang hidup. Melalui partai berbagai pendapat dan gagasan yang muncul di tengah-tengah masyarakat di tampung dan disalurkan. Peran partai sangat besar dalam pembangunan RFJ. Dalam menghadapi pemilu, partai sendiri yang menentukan dan memilih para calonnya. Dalam konstitusi Jerman, partai harus bereperan aktif dalam pembentukan berbagai aspirasi masyarakat. Kewajibannya antara lain adalah memberikan motivasi dan ikut meningkatkan pendidikan politik masyarakat, berperan dalam aspek kehidupan dan kepentingan umum dan memberi dorongan kepada masyarakat untuk secara aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan kehidupan politik. Fungsi partai demikian pentingnya sehingga pemilu nasional maupun negara bagian tidak akan terlaksana tanpa partai. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah, partai pula yang akan menentukan mereka yang akan duduk menjalani pemerintahan. Kemenangan partai dalam pemilu nasional akan dapat menentukan politik RFJ untuk masa empat tahun kedepan.

Dan setelah reunifikasi, partai-partai di Jerman cukup mengalami tantangan, karena responsibilitas masyarakat terhadap politik semakin tinggi.

⁵¹ Keterangan Dasar Republik Federal Jerman, *Op Cit*, hlm. 10



Untuk itu mereka harus bisa menarik perhatian masyarakat dengan berbagai perubahan-perubahan baik itu program ,bahkan prinsip partai sekalipun. Sebut saja apa yang telah di lakukan oleh SPD, yang beralih dari Sosialis kiri ke kiri tengah yang cenderung liberal dan bukan hanya sekedar partai bagi rakyat kecil, akan tetapi bagi semua kalangan. Semenjak tahun 1949, partai-partai yang berkuasa di Jerman tidak terlepas dari peran dua partai besar Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat. Bahkan sampai Jerman bersatu kembali dua partai ini, tetap menjadi pesaing dalam mencapai kursi pemerinthana, akan tetapi mereka tetap membutuhkan partai-partai kecil untuk diajak berkoalisi. Dalam konteks inilah menarik untuk melihat peran yang dimainkan oleh partai-partai kecil lainnya, seperti partai Hijau tentunya.

3.6.2 Bundnis90/The Grunen (Alliance90/The Green)

Setelah reunifikasi dua Jerman , Partai Hijau yang awalnya hanya ada di Jerman Barat, melebarkan sayapnya ke Jerman Timur, pada tanggal 26 November 1989 didirikan oleh kurang lebih 150 orang kelompok pecinta lingkungan di Jerman Timur. Sama dengan Partai Hijau di Jerman Barat, mereka juga menggalang isu ekologi, perdamaian, hak azazi dan demokrasi akar rumput. Pada pemilu pertama kali setelah tahun 1990, Partai Hijau di Jerman Timur memperoleh 6,0 % suara dengan memperoleh 8 kursi di parlemen (*Bundestag*).⁵²

Kemudian, seiring dengan perkembangan reunifikasi Jerman, Partai Hijau yang awalnya terpisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur, akhirnya mendeklarasikan Partai Hijau Bundnis90/Die Grunen pada Mei 1993 sebagai gabungan dari Partai Hijau (*Die Grunen*) Jerman Barat dan Timur dengan *Bundnis90* , sebuah aliansi gerakan-gerakan pembela hak-hak sipil di wilayah eks Jerman Timur. Di dalamnya juga tergabung kelompok-kelompok dan partai-partai politik lainnya yang relatif sama dengan ideologi Partai Hijau, yaitu Forum Baru, Demokrasi Kini, Kelompok Wanita Merdeka, dan Insisatif untuk Kemerdekaan dan Hak Azasi Manusia.⁵³

⁵² E. Gene Frankland and Donald Schoemaker, *Op cit*, hlm. 140

⁵³ Laporan Tahunan KBRI – Bonn 1994 – 1995, Buku II, hlm. 16

Mayoritas partisipan dan pengurus Partai Hijau Jerman merupakan mereka yang lahir antara tahun 1945-1965, jadi bisa dilihat bahwa pendukung mayoritas partai ini adalah para muda yang merupakan generasi paska perang. Dan partai Hijau Jerman satu-satunya partai yang tumbuh diluar kondisi pergolakan FRG, sementara partai-partai lainnya seperti Sosial Demokrat dan Liberal memiliki pengalaman di bawah Nazi. Lebih lanjut Partai Hijau merupakan partai paska Fasis dan merupakan generasi anti fasis, dan anti-nasionalis, ini bisa dilihat dari prinsip perluasan Eropa yang merupakan campuran kekuatan ekologi dan komitmen sosial di tingkat Eropa.⁵⁴

Keanggotaan mereka juga datang dari kelompok kelas menengah dan kelas menengah ke atas, yang mencakup mahasiswa, guru, jurnalis, pengacara, agen marketing, spesialis komputer, pelayan publik atau pekerja pelayan keturunan kulit putih. Hanya sedikit pekerja kulit hitam yang menjadi anggota atau simpatisan partai ini. Peran sosial dari kelompok kelas menengah ini tumbuh secara bersamaan, akan tetapi mereka tidak memiliki partai politik yang spesifik. Dengan demikian pada awalnya suara mereka tersebar ke berbagai partai mapan yang ada, dan munculnya partai Hijau merupakan partai yang sesuai dengan tipikal mereka.⁵⁵

Pada umumnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang memilih Partai Hijau, dimana kurang lebih 10 persen perempuan Jerman memilih partai Hijau dalam pemilu di tingkat Federal Jerman.⁵⁶ Dalam hal ini, bisa dipahami, bahwa banyaknya wanita yang tergabung dalam Partai Hijau, karena jelas berhubungan dengan prinsip dan nilai-nilai partai ini yang memberikan perhatian yang lebih terhadap nasib kaum matriarki. Ini juga bisa dilihat dalam tatanan praksisnya, dalam tubuh pemerintahan koalisi mereka menempatkan wakil perempuannya di kabinet pemerintahan koalisi merah-hijau (SPD-Partai Hijau) periode 1998-2002 lalu yaitu Renate Kunast sebagai menteri perlindungan konsumen, makanan dan pertanian. Dan bahkan untuk utusan di *Bundestag*, Partai Hijau menempatkan 26 politisi perempuan (lebih dari 50%) dari 46 kursi yang di peroleh di parlemen pada pemilu nasional tahun 1998 lalu. Sebuah perjuangan

⁵⁴ Herbert Hoenigsberger, *Op Cit*, hlm. 55

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Stephen J. Silvia, *Op Cit*, hlm. 176-177

gender yang dalam partai-partai mapan kurang di perhatikan, dan poin ini pula yang merupakan salah satu kekhasan partai Hijau di antara partai-partai mapan lainnya.

Tabel 3,3 Perempuan dalam Partai Politik: Pertumbuhan Keanggotaan 1980-1992 (%)

Tahun	SPD	CDU	CSU	FDP	P. Hijau
1980	23	21	13	23	30
1983	25	22	14	24	33
1987	25	22	14	23	33
1990	27	23	15	24	33
1991a	27	23	17	30	33
1991b	20	39	0	n.a.	40

Catatan: 1991a, mencakup untuk seluruh Jerman, 1991b berlaku bagi Jerman (eks) Timur

Sumber: Eva Kolinsky, Party Change and Women's Representation in Unified Germany, dalam Joni Lovenduski and Pipa Norris, ed., *Gender and Party Politics*, SAGE Publication, London, 1993, hlm. 127

Sejauh ini, Bundnis90/Die Grunen memiliki sekitar 46 ribu anggota yang tersebar di seluruh Republik Federal Jerman, pusat partai ini ada di Berlin, dan memiliki 16 organisasi partai di tingkat negara bagian (mengikuti jumlah negara bagian di Jerman paska reunifikasi 1990). Di tingkat komunal partai ini sekarang mempunyai 480 cabang di tingkat kota dan 2.500 cabang lokal. Dan yang menarik sebagai bentuk manifestasi *grass root democracy* yang mereka dengungkan, partai ini memiliki banyak kelompok-kelompok kerja baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional (federal) yang memainkan peran aktif dalam perkembangan kebijakan partai. Dan sebagai tanggung jawab terhadap keberlangsungan regenerasi perjuangan politik hijau, mereka juga memiliki organisasi kepemudaan (Kelompok Hijau Muda-*Grüne Jugend*) yang beranggotakan kurang lebih 4.000 orang, yang berusia antara 14 sampai 28 tahun. Mereka independen terhadap partai hijau sendiri, akan tetapi bergabung secara kolektif dalam pengembangan kerjasama dan pengaruh kebijakan politik hijau.⁵⁷

Sebagai partai dengan slogan '*a party anty party*' seperti yang di gambarkan oleh Petra Kelly salah seorang pendiri Partai Hijau Jerman, mereka

⁵⁷*Bundnis90/Die Grunen of Germany, Op Cit*

menyatakan bahwa mereka tidak sekedar sebuah wadah atau institusi partai, akan tetapi mereka sekaligus sebuah gerakan.⁵⁸ Pada awalnya partai Hijau adalah sebagai kelompok protes atau partai yang menyusahkan bagi kelompok penguasa (*nuisance party*). Sebelumnya jelas partai Hijau mengikuti defenisi klasik dari konsep-konsep partai, yaitu suatu kelompok yang ikut berusaha dalam proses pemilihan pemerintahan untuk bisa menjadi salah satu *stake holder*. Kemudian setelah satu dekade kelahiran partai ini, Rudolf van Hullen menggambarkan partai Hijau sebagai “sebuah partai yang legal, secara struktural merupakan sebuah aliansi, dan minimal mengacu pada pandangan mereka yang menyatakan diri sebagai gerakan (movement). Meskipun CDU/CSU, SPD dan FDP juga merupakan partai yang legal dan memiliki aliansi yang lebih kuat dibandingkan partai Hijau, namun mereka tidak melihat diri mereka sebagai sebuah gerakan.”⁵⁹

Lebih jelasnya, sebagai partai politik gerakan mereka memiliki organisasi yang longgar namun memiliki komitmen yang kuat terhadap pemerintahan rakyat dan proses demokrasi. Dengan longgarnya organisasi menimbulkan faksionalisme, kelompok-kelompok kecil yang memusatkan pada seorang individu, atau kelompok-kelompok kecil yang keluar dari partai karena masih mempercayai gerakan masih mampu mempengaruhi kebijakan tanpa terlibat secara langsung dalam kekuasaan.⁶⁰ Dalam hal ini, secara jelas terdapat dua faksi dalam partai Hijau Jerman, yaitu *realis (Realos)* dan *fundamental (Fundis)* yang merupakan menjiwa partai Hijau Jerman. *Realos*, bisa menerima tanggung jawab politik (bahkan terlibat dalam pemerintahan) dan kerjasama dengan kelompok-kelompok lain, seperti SPD dalam usaha mencapai target-target politik Hijau. Sementara *Fundis*, melihat cara-cara seperti kelompok realis akan mengurangi tujuan-tujuan dasar dari politik Hijau sendiri. Namun melihat keberhasilan dari metode *Realos* yang mampu menang di tingkat pemerintahan, telah mengurangi ketegangan dalam tubuh partai Hijau Jerman, dan meningkatnya pemerintahan koalisi di tingkat lokal antara partai Hijau dengan SPD (*red green coalition*).⁶¹

⁵⁸ Stephen J. Silvia, *Op Cit*, hlm. 176

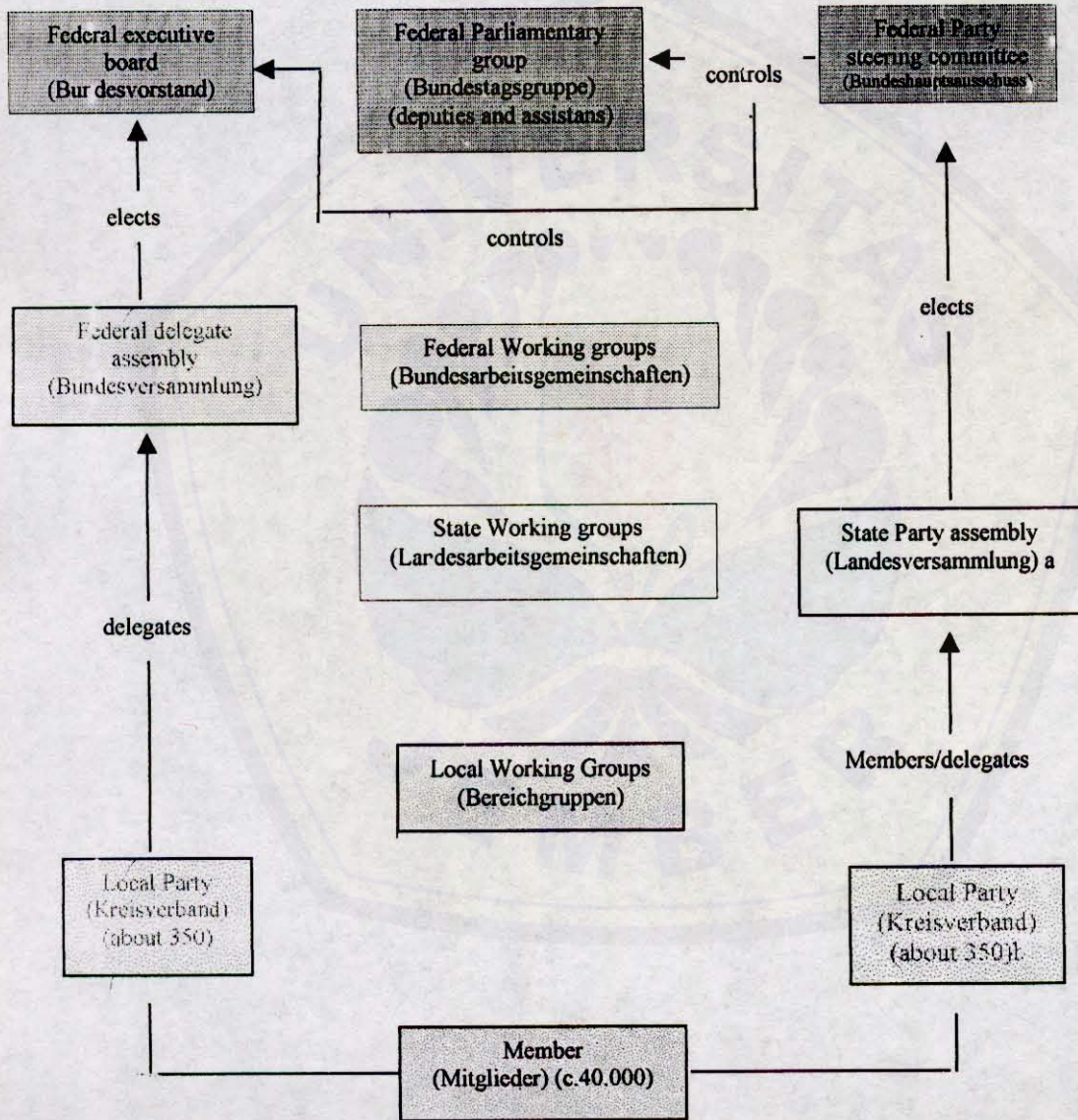
⁵⁹ E. Gene Frankland and Donald Schoomaker, *Op cit*, hlm. 105

⁶⁰ Jonh A. Dobson, *An Introduction to Political Science*, Wodsworth Publishing Company, Belmont, CA, 1998, hlm.

⁶¹ Sheri Berman, *Op Cit*, hlm. 114

Dalam pemahaman umum, organisasi Partai Hijau Jerman memiliki karakter partai modern, seperti contoh setiap anggota formal memiliki hak yang sama, dengan kelompok-kelompok lainnya, baik di tingkat lokal, regional, pada kongres nasional yang merumuskan kebijakan-kebijakan partai (lihat figur. 3.2)

Figure 3.1 The National Chart of the Greens



Catatan: Organ lain, seperti pengadilan arbitrase, tidak dimasukkan

- a) Juga pemilihan dewan pengurus negara (Landesvorstände)
- b) Juga pengiriman delegasi pada steering committees di tingkat negara bagian (Landesausschüsse), (dimana keberadaannya) yang mengawasi kelompok parlemen di tingkat negara bagian. (Landtagsgruppe)

Dalam hal kualitas, anggota partai hijau juga berbeda dengan partai-partai mapan lainnya, sebab secara implisit salah satu aturan tak tertulis dari partai ini menolak kharismatik pemimpin 'individu'. Dalam konteks ini, Menurut Robert Harne!, partai Hijau merupakan sebuah partai "tipe baru" (yang dalam hal ini tidak diantisipasi oleh konsep Michels tentang dinamika partai politik). Ini dikarenakan mereka memiliki desentralisasi dalam struktur kekuasaan atau program-program yang radikal, jadi elit-elit mereka yang tampil memiliki tantangan yang kuat, pendidikan yang memadai, penilaian partisipasi sebagai anggota partai.⁶²

Sementara, dalam studi klasik Robert Michels, dia menempatkan kepemimpinan (*leadership*) sebagai titik sentral dari perkembangan partai politik, dia melihat terbaginya masyarakat ke dalam kelompok elit dan pengikut mendorongnya menerima gagasan bahwa pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan elitis di bawah pemimpin kharismatik. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa "*Organisasi yang besar cenderung menyerahkan monopoli kekuasaan kepada para pemimpinnya*".⁶³

Michles juga menekankan, bahwa kebutuhan akan kepemimpinan dalam setiap kehidupan berkelompok dan sifat superioritas dari pemimpin adalah suatu hal yang alami, dengan demikian pemimpin akan memiliki posisi yang unggul, keunggulan ini dimungkinkan oleh faktor-faktor teknis-administratif, psikologis dan intelektual. Dalam hal ini Michels mengkombinasikan perspektif struktural dengan psikologis. Interaksi struktur dan proses psikologis diamati dalam pergulatan antara elit dengan masa atau pemimpin dengan kalangan yang dipimpin. Mekanisme hubungan kedua kelas yang membangun setiap organisasi politik seperti partai politik, berada pada organisasi partai yang memanifestasikan faktor structural dan psikologis dari kedua unsur utama partai tersebut, karena itu watak partai akan ditentukan oleh peranan pemimpin.⁶⁴

Akan tetapi untuk kasus partai Hijau seperti yang terdapat di Jerman, konsepsi Michels, menjadi suatu hal yang terbantahkan, karena jelas beberapa

⁶⁰ E. Gene Frankland and Donald Schoomaker, *Op cit*, hlm. 110

⁶¹ Seymour Martin Lipset, Pengantar (edisi Inggris), dalam Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. xxix dan

⁶⁴ Arbi Sanit, Pengantar (edisi Indonesia), dalam Robert Michels, *Op Cit*, hlm. xii-xiii

satu prinsip partai Hijau yang anti hirarki, demokrasi akar rumput dan juga struktur organisasi kepartaian, jelas menggambarkan bahwa tumbuh berkembangnya partai ini bukan mayoritas ditentukan oleh kepemimpinan partai seperti asumsinya Michels.

Dan sejauh ini, dalam perkembangan partai Hijau Jerman, para elit yang ada eksistensinya bukan dilihat dari faktor individu oleh partisipan partai, akan tetapi dari program dan karakter partai yang menjadi patokan bagi mereka untuk memilih partai Hijau sebagai pilihan alternatif. Akan tetapi bukan, berarti keberadaan elit tidak mendukung perkembangan organisasi kepartaian, Joschka Fischer, yang merupakan salah satu wakil partai Hijau yang duduk di kursi pemerintahan koalisi merah-hijau, cukup terkenal di mata masyarakat Jerman karena gayanya yang sederhana dan bersahaja, hippies dan tampil apa adanya, tidak elitis dan familiar. Namun elit disini bukan *core* dalam menentukan perkembangan partai seperti asumsi klasik Mitchel.

3.6.3 Prinsip dan Program Partai Hijau Jerman

Pada dasarnya, program partai seharusnya memiliki dua peran sekaligus yaitu eksternal dan internal. Dari pandangan pragmatis program harus berusaha memperoleh suara-suara baru dan mempertahankan suara-suara lama dalam pemilu. Program yang bagus harus memiliki sinyal dan kredibilitas potensial untuk melakukan koalisi, opini pemimpin di media, dan menarik perhatian publik. Secara internal program partai harus bisa membantu untuk merekrut anggota baru dan memobilisasi anggota lama dan juga menetapkan kebijakan bagi anggota maupun pemimpinnya. Di Jerman mayoritas partai memiliki program yang cukup kuat di banding Amerika Serikat, seperti SPD dan CDU lebih menekankan pada peran eksternal dalam program partai mereka.⁶⁵

Berbeda dengan program partai Hijau Jerman, dimana lebih mengutamakan pengaruh ke dalam secara langsung (*inner-directed*). Formulasi dari program yang dimiliki harus mampu mengintegrasikan tuntutan dan identitas dari dalam partai yang cukup heterogen. Jadi mereka lebih merefleksikan

⁶⁵ E. Gene Frankland and Donald Schoemaker, *Op cit*, hlm.126

yang cukup heterogen. Jadi mereka lebih merefleksikan keseimbangan kekuatan dalam tubuh partai, daripada perkembangan yang terdapat di luar partai.⁶⁶

Partai Hijau merupakan variasi dari gerakan kiri baru memiliki agenda yang cukup komprehensif dan menggambarkan dukungan dari berbagai jaringan gerakan sosial baru.⁶⁷ Dan untuk partai hijau di Jerman sendiri, jelas mereka menyatakan diri mereka mengadopsi tradisi kiri yang dicantumkan dalam prinsip dan program partai mereka. Karena perhatian mereka yang utama adalah permasalahan lingkungan hidup dan gerakan mereka sangat memperhatikan prinsip-prinsip ekologi maka partai hijau di sebut juga sebagai partai ekologi.⁶⁸ Warna hijau merupakan warna yang digunakan untuk lambang partai, dan pertama kali digunakan oleh partai Hijau Jerman.⁶⁹

Mereka juga merupakan partai dengan kebijakan agenda kiri baru. Partai Hijau dalam hal ini dimaknai sebagai pemikiran kiri, karena mereka meneruskan kritik sosialis terhadap sistem kapitalis dan secara umum memberikan advokasi terhadap reformasi yang radikal dalam masyarakat modern. Dan hal ini juga bisa dilihat dari simpatisan partai Hijau yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota politik kiri. Meskipun ini merupakan orientasi tradisi kiri secara general, akan tetapi mereka menolak alternatif sosialis terhadap sistem kapitalis. Korporatisme, yang menjadi jawaban bagi sosial demokrat terhadap sistem kapitalis, justru kontra dengan nilai-nilai dasar partai Hijau. Karena partai Hijau jelas menolak birokrasi, hierarki, penggunaan sumber secara besar-besaran, dan ini merupakan gaya pembuatan kebijakan korporatis.⁷⁰ Jadi secara objektif gerakan politik hijau secara objektif merupakan ketidakpuasan terhadap sistem kapitalis, sementara beberapa ide-ide sosialis yang ada tidak sesuai dengan tuntutan utama mereka, dan mereka berusaha untuk melakukan perubahan

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Matthias Kaelberer, *The Emergence of Green Parties internasional Western Europe*, Comparative Politics, Vol. 25, Number, 2, Januari 1993, The City University of New York, hlm. 230

⁶⁸ Herbert Hoenigsberger, *Op Cit*, hlm. 56

⁶⁹ Green Parties, Microsoft Encarta, Reference Library 2003, 1993-2002 Microsoft Corporation

⁷⁰ Ibid, hlm. 231

dengan menemukan sebuah alternatif isu lingkungan diantara segmen-segemen dalam negara industri kapitalis.⁷¹

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab 1, bahwa nilai-nilai politik hijau yang dimanifestasikan dalam bentuk partai hijau, salah satunya dikemukakan oleh Jonh Barry, bahwa tiga prinsip utama dari politik hijau ini, adalah adanya distribusi keadilan dalam masyarakat, komitmen terhadap proses demokrasi dan yang menjadi agenda utamanya adalah usaha untuk keberlangsungan ekologi. Disamping itu berbagai nilai-nilai yang mereka cantumkan dalam prinsip partai hijau Jerman sendiri, seperti demokrasi akar rumput, kesadaran ekologi, anti kekerasan dan lain sebagainya. Ini semua bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat program dan kebijakan yang dimiliki oleh partai Hijau Jerman.

Partai hijau melihat gejala dari krisis lingkungan dan eksploitasi manusia, berasal dari kompetisi dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dan memandang pertumbuhan ekonomi dari segi kuantitas semata. Dalam program di tingkat nasional (*Bundes Program*), partai hijau mencantumkan, bahwa tujuan ekonomi seharusnya disesuaikan dengan kerangka kerja kepentingan ekologis, hal ini bisa mempengaruhi keputusan orang-orang tentang apa, bagaimana dan dimana sebuah produksi akan dihasilkan.⁷² Jadi hal ini merupakan tujuan utama dari partai hijau Jerman yang ingin menciptakan tatanan ekonomi yang berorientasi pada ekologi. Pelestarian dan perlindungan ekonomi harus diperhatikan. Dalam masalah ini, partai Hijau Jerman menggunakan konsep Pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip bagi tindakan yang akan diperjuangkan dalam sistem ekonomi.

Sebagai bentuk dari manifestasi prinsip anti kekerasan, partai Hijau Jerman sangat gigih, menuntut Jerman untuk keluar dari NATO dan pengurangan persenjataan militer di negara Jerman sendiri. Menurut mereka pengurangan senjata yang lebih dahulu dilakukan di negara sendiri akan menarik negara lain untuk melakukan hal yang sama. Bahkan partai ini juga sangat menentang pengiriman tentara Jerman, terutama ke wilayah yang dianggap bergolak dan

⁷¹ E.M. Primakov and A.I. Vlasov, ed., *What's what internasional World Politics*, Progress Publishers, Moscow, 1987, hlm. 188

⁷² E. Gene Frankland, *Op Cit*, hlm. 75

melancarkan propaganda di kalangan militer untuk membangkang terhadap pemerintah tersebut. Mereka juga menolak penggunaan energi nuklir yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Untuk dalam negeri, partai ini menginginkan pelaksanaan politik secara desentralisasi dan menuntut dilaksanakannya demokrasi secara langsung. Sistem demokrasi perwakilan sekarang hanya merupakan penghalang dalam proses demokratisasi dalam masyarakat, karenanya diperlukan lebih banyak lagi penerapan unsur-unsur plebisit.⁷³

Dukungan yang besar dalam perjuangan akan hak-hak perempuan, yang juga ditandai mayoritas pemilih partai ini adalah kaum matriarki, partai Hijau di Jerman dikenal dengan partai feminis. Wanita dalam partai ini diberikan hak veto dalam menentukan kebijakan, ini pertama kali dilakukan dengan mengutus mayoritas kandidat legislatif perempuan di parlemen negara bagian Hamburg pada tahun 1986-1987.⁷⁴ lebih lanjut partai Hijau menggunakan sistem kuota, bagi keterlibatan perempuan baik dalam dunia kerja dan pelatihan untuk menjamin perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki.⁷⁵ Dalam bentuk praksisnya bisa dilihat dimana partai Hijau menempatkan perempuan di pos-pos penting pengambilan kebijakan. Sebut saja, Ny. Krestin Mueller yang menjabat ketua fraksi *Grüne* di parlemen, Ny. Renate Kuenast yang menjabat sebagai menteri perlindungan konsumen, makanan dan pertanian pada pemerintahan koalisi merah-hijau.

Program partai Hijau yang juga mendapat mayoritas dukungan publik adalah masalah imigran. Selama ini masyarakat Jerman dikenal anti imigran, khususnya tenaga kerja murah yang berasal dari Turki. Melalui jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan bisnis, pemerintah Jerman kini tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang Imigrasi yang bersifat lebih fleksibel. Para imigran juga memiliki hak yang sama dengan pribumi, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial dan budaya sebagai cerminan masyarakat terbuka (*open society*).⁷⁶

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid. hlm 76-77

⁷⁵ The Political Parties in the German Bundestag, *Op Cit*, hlm. 12

⁷⁶ Joachim Windt, ed., *Election Special: 22 September 2002 is Polling Day internasional Germany*, Goethe Institut Inter Nation, Bonn, 2002, hlm. 48

Dan yang lebih menarik adalah, menyangkut kebebasan dalam berekspresi sebagai manifestasi “sipil libertarian” dalam perkembangan program partai, mereka juga mempromosikan hak-hak komunitas pinggiran, tenaga kerja asing, *gypsies*, homoseksual, narapidana, dan para manula.

Pada tanggal 7-8 Maret 1998 dilangsungkan Kongres Nasional partai Hijau Jerman di Magdeburg, dimana berhasil diputuskan program untuk pemilihan pada september 1998, antara lain sebgai berikut:

- 1) Tujuan partai Hijau dalam pemilu mendatang adalah membentuk pemerintahan koalisi dengan SPD guna melaksanakan perubahan politik di Jerman. Program utama partai adalah “perjuangan melawan pengangguran massal”. Salah satu cara untuk memerangi pengangguran massal adalah reformasi sistem pajak yang harus bersifat “ekologis dan social”. Dengan pengangguran tersebut, biaya tenaga kerja di Jerman akan turun sehingga, biaya tenaga kerja di Jerman akan turun sehingga akan diciptakan lapangan kerja baru. Kenaikan pajak konsumsi energi terutama mencakup kenaikan harga bensin secara bertahap-tahap menjadi DM 5 perliter dalam sepuluh tahun mendatang. Selain itu partai Hijau merencanakan penghematan pengeluaran pemerintah, antara lain sehubungan dengan proyek kereta api magnetic *Transrapid*, pesawat tempur *Eurofighter*, serta riset di bidang tenaga nuklir.
- 2) Di bidang politik luar negeri, Hijau mendukung “demiliterisasi politik internasional” dan menegaskan universalitas Hak Azasi Manusia (HAM). Mengenai pengerahan *Bundeswehr* (Angkatan Bersenjata) diputuskan bahwa “Hijau menolak mengusahakan perdamaian dengan menggunakan paksaan militer serta pengerahan *Bundeswehr* dengan tujuan bertempur”. Diusulkan pula agar diperluas instrumentarium diplomatik untuk menghindari konflik dan mencari penyelesaian secara non-militer. Selain itu diputuskan bahwa tujuan jangka panjang adalah penghapusan aliansi pertahanan (NATO), namun ditegaskan bahwa segala keputusan akan diambil dengan cara dialog antar negara-negara anggota. Namun walaupun seperti itu, realistis ala partai Hijau ini

terlihat, bahwa mereka juga mempertimbangkan aspek keamanan kawasan, dimana mereka menolak Jerman keluar dari NATO secara sepihak, namun mendukung bahwa NATO akan dihapus dan diganti oleh suatu sistem keamanan Eropa. Hijau juga mendukung penghapusan wajib militer.⁷⁷

Menjelang pemilu federal 1998, partai Hijau cukup optimis akan dibentuknya pemerintahan koalisi merah-hijau (SPD-Partai Hijau), dan partai hijau menawarkan program untuk 100 hari pertama pemerintahan koalisi nantinya. Seperti, mengadakan kerjasama antara pemerintah, Usahawan dan Serikat Buruh untuk menciptakan lapangan kerja baru, reformasi perpajakan di bidang ekologi dan sosial. Peningkatan tunjangan anak dari DM 250 per bulan menjadi DM 300 tiap seorang anak. Diusahakan agar penggunaan reactor nuklir dihapuskan. Syarat-syarat studi di Perguruan Tinggi harus lebih diperbaiki dan seluruh biaya studi dihapuskan. Terakhir tawaran mereka bagi pengurangan angkatan perang dari 340.000 menjadi 20.000, seperti pernyataan ahli pertahanan Partai Hijau Ny. Angelika Beer, dia menambahkan bahwa usulan di atas merupakan hal yang realistis, meskipun mendapat kritikan tajam dari fraksi CDU di parlemen.⁷⁸

Disamping program-program klasik yang terus diperjuangkan sejak didirikannya partai Hijau Jerman ini, juga muncul program-program lain sebagai perbaikan dan tambahan dari program-program sebelumnya, dan yang jelas program tersebut tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh partai Hijau Jerman.

Program-program terbaru ini bisa dilihat dalam prinsip dan program partai yang telah direvisi, dengan slogan "*something totally new*" program-program yang ditawarkan lebih berusaha mengakomodir tuntutan yang muncul di kalangan publik Jerman. Dan partai Hijau menganggap mereka bukan sekedar partai yang anti partai lagi akan tetapi alternatif dalam sistem partai yang ada. Reformasi yang dilakukan dalam strategi dan program partai inilah yang menguntungkan partai

⁷⁷ Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia – Bonn 1997– 1998, Buku II, hlm. 26

⁷⁸ Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia – Bonn 1998– 1999, Buku II, hlm. 19

Hijau, karena mampu menarik perhatian publik dalam pemilu nasional tahun semenjak 1994.⁷⁹

Dalam program terbaru, yang tercantum disamping masih melanjutkan program yang lama, antara lain mencakup pengembangan energi matahari sebagai isu pengganti energi nuklir sebagai jawaban atas tantangan ekologi saat ini. Secara Ekologi giat memperjuangkan tujuan dasar gerakan politik hijau dengan agenda pengembangan keberlanjutan. Adanya transparansi bagi hak-hak konsumen yang merupakan bagian dari pembaharuan terhadap sistem ekonomi pasar. Pola baru bagi industri pertanian dengan menciptakan keseimbangan antara petani dan konsumen dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Adanya standar dasar bagi kehidupan yang layak, dan berbagai program lainnya yang relevan dengan nilai dan prinsip yang dianut.⁸⁰

Salah satu isu yang cukup penting dalam program terbaru tersebut adalah, permasalahan globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan bagi dunia. Dunia digambarkan seperti kampung global, dimana elemen di dalamnya saling berhubungan tanpa di pengaruhi oleh batasan teritorial konvensional suatu negara. Partai hijau Jerman sebagai gerakan politik, muncul sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan di level negara. Namun dalam masalah sekarang (globalisasi) partai Hijau tidak bisa dan tidak ingin membatasi kebijakan mereka terhadap kerangka program politik dalam satu negara bangsa. Mereka memandang globalisasi sebagai sebuah tantangan, mereka menyerukan sebuah dunia tanpa kelaparan, kemiskinan, dan peperangan, sebuah dunia yang mengaplikasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi, kebebasan, solidaritas. Dan hal ini bisa dilihat dari partisipasi aktif mereka dalam membangun jaringan global dalam aspek sosial dan politik untuk mewujudkan tujuan tersebut.⁸¹

Keterlibatan partai Hijau Jerman bisa dilihat dari konferensi-konferensi lingkungan Hidup seperti pada KTT Bumi yang terakhir diadakan di Nusa Dua, Jaringan Kerjasama Partai Hijau sedunia yang tahun 2001 lalu melakukan Konferensi tingkat Tinggi di Canberra, dan juga dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang *concern* terhadap permasalahan ekologi.

⁷⁹ The Future is Green : Alliance90/The Greens (Party Program and Principles), *Op Cit*, hlm. 14,

⁸⁰ Ibid. 11

⁸¹ Ibid. hlm. 8

4.5 Partai Hijau sebagai Kekuatan Baru

Setelah dua dasawarsa lebih berdirinya partai Hijau Jerman, sedikit banyaknya bisa dilihat bahwa partai ini memberikan nuansa baru dalam peta politik Jerman. Sebelumnya hanya ada tiga partai yaitu CDU/CSU, SPD dan FDP yang bersaing tidak seimbang dalam merebut kursi pemerintahan. Dengan hadirnya partai Hijau dengan kemampuan merebut jumlah suara di setiap pemilu menjadikan dia sebagai partai dengan nilai tawar baru bagi partai-partai lainnya. Bahkan dengan tergesurnya FDP sebagai partai ketiga terbesar semakin memperjelas bahwa partai Hijau tidak bisa dianggap main-main oleh partai Besar lainnya.

Seperti dalam berbagai kampanye partai CDU/CSU dan FDP yang juga merupakan oposan utama partai Hijau sering menyerukan bahwa program-program yang ditawarkan oleh kelompok Hijau merupakan suatu yang tidak realistis dan akan membatasi orang dalam berkeaktivitas.⁸²

Jika dilihat dari asumsinya Huntington⁸³ bahwa kekuatan suatu partai bisa dilihat dari tiga faktor pendukung yaitu, pertama, ukuran kekokohan partai bisa dinilai dari kemampuannya untuk mempertahankan pendirinya atau para pimpinan karismatik yang pertama kali membawanya ke puncak ke kuasaan. Kedua, kompleksitas dan kedalaman organisasional, hal semacam ini bisa dilihat dari keakraban hubungan antara partai politik dengan sejumlah organisasi social ekonomi, seperti serikat buruh, dan paguyuban-paguyuban lainnya. Ketiga, berkaitan dengan sejauh mana aktifitas politik dan pendamba kekuasaan identik dan larut bersama dengan partai; serta sejauh mana mereka mampu memandang partai sebagai sebuah wahana guna mencapai berbagai tujuan.

Dalam konteks ini sedikit banyaknya reformasi internal partai Hijau yang dilakukan lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa walaupun mereka melakukan perubahan akan tetapi tetap komitmen terhadap semula bahwa partai Hijau merupakan instrumen bagi mereka untuk menggolkan tujuan-tujuan politis mereka yang tidak terakomodir oleh partai-partai mapan lainnya.

⁸² Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia – Bonn 1997– 1998, Buku II, hlm. 25

⁸³ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Buku II, Rajawali.CV, Jakarta 1983, hlm. 632-634

Lebih lanjut, sistem partai yang kokoh, mempunyai kapasitas pertamanya, melancarkan perluasan peran serta politik melalui jalur partai, dan dengan demikian menguasai ataupun mengalihkan segala aktifitas politik anomic dan revolusioner. Kedua, ia mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisir, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh system politik. Sistem partai yang kuat, dengan demikian menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik. Dan proses ini biasanya juga melalui tahapan faksionalisasi, polarisasi, ekspansi dan institusionalisasi.

Sebagai kekuatan baru dalam peta politik Jerman, partai Hijau sudah melakukan hal yang tidak jauh berbeda seperti asumsi di atas. Bahkan kemauan partai ini untuk melakukan reformasi internal merupakan indikasi yang jelas. Dengan slogan baru *something totally new*, partai Hijau akhirnya bisa meningkatkan jumlah suara dalam pemilihan 2002 lalu dan kembali terlibat di kursi pemerintahan koalisi.

BAB V KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya Partai Hijau menjadi salah satu Kekuatan politik dalam Kehidupan Politik di Jerman memiliki dinamika yang cukup Kompleks. Hal ini berawal dari munculnya krisis lingkungan sebagai dampak dari industrialisasi dan saat bersamaan disertai dengan munculnya kelompok kelas menengah baru (kaum profesional, ilmuwan, dan mahasiswa) yang memiliki kesadaran terhadap fenomena tersebut, adanya kekecewaan terhadap sistem baik itu di bawah sosialis maupun kapitalis yang tidak mampu menampung tuntutan dari isu baru tersebut. Dengan kata lain, berbagai tuntutan tersebut dibahasakan oleh Ronald Inglehart sebagai bentuk perubahan orientasi nilai dari masyarakat materialis ke masyarakat paska materialis.

Kemudian beberapa kelompok di atas menyatukan diri dalam satu isu dan kepentingan yang dimanifestasikan dalam bentuk partai politik. Asumsinya partai merupakan motor untuk bisa terlibat dalam menentukan kebijakan-kebijakan di tubuh pemerintahan. Dengan slogan awal partai Hijau, sebagai partai anti partai menjadi sebuah partai alternatif di Jerman.

Setelah dua dasawarsa lebih berdirinya partai Hijau Jerman, partai ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus di antara partai-partai Hijau di Eropa lainnya, bahkan salah satu indikasinya adalah keterlibatannya di tubuh pemerintahan koalisi selama dua periode terakhir. Keberhasilan partai Hijau Jerman secara general diindikasikan oleh dua aspek, yaitu internal dan eksternal partai.

Aspek internal, pertama menyangkut komitmen partai terhadap keberlangsungan ekologi yang sekaligus merupakan platform utama partai. kedua, komitmen terhadap kesetaraan gender, bahkan partai ini di kenal sebagai partai feminis, karena mayoritas partisipannya adalah kaum perempuan. Ketiga, merupakan yang paling penting, dimana partai Hijau telah mengalami transformasi dan evolusi di tubuh partai selama sepuluh tahun terakhir, Partai Hijau mengalami tranformasi dari



partai alternatif yang radikal dan seksi menjadi partai yang pragmatis dan terlibat di pemerintahan, tanpa kehilangan identitas politis dan sikap radikalnya. Keempat, adanya sosialisasi dan pendekatan partai yang lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok yang oposan selama ini, seperti pebisnis dan industriawan.

Aspek eksternal, mencakup beberapa hal, pertama, di Jerman selama paska perang dunia kedua tidak ada partai sayap kiri, sementara kehadiran partai Hijau cukup memiliki kedekatan secara ideologis. Kedua, adanya kekecewaan pada pemerintah berkuasa, karena tidak mampu menampung tuntutan-tuntutan isu baru dalam masyarakat paska industri. Ketiga, adanya krisis kepercayaan pada partai-partai mapan. Keempat, adanya isu-isu diluar baik domestik maupun internasional yang ikut menguntungkan keberadaan partai Hijau, seperti isu terakhir adanya skandal keuangan partai-partai Jerman khususnya yang melanda CDU, kemudian internasional penolakan besar-besaran dari Partai Hijau atas tindakan invasi AS ke Irak yang mendapat dukungan publik. Kelima, untuk satu periode keterlibatan Hijau di tubuh pemerintahan koalisi, cukup berhasil menggolkan kebijakan partai dalam kebijakn pemerintahan.

Jadi, Dinamika partai Hijau Jerman yang membawa kesuksesan diantara partai-partai Hijau lainnya, ditandai dengan meningkatnya jumlah suara dalam pemilu 2002 lalu, dan merupakan perolehan suara tertinggi selama dua puluh dua tahun berdirinya partai. Dan juga keterlibatan di tubuh pemerintahan koalisi menggambarkan bahwa partai Hijau Jerman mendapat tempat di partisipannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adorno, Theodore dan Max Horkheimer , *Dialektika Pencerahan*, Penterjemah, Ahmad Sahidah, IRCISOD , Yogyakarta, 2002

Amir Taat Nasution, *Kamus Politik*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981

Andre H. Pareira, ed., *Perubahan Global dalam Studi Hubungan Internasional*, PACIS—Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.200-201

Bambang Cipto, M.A, Drs, *Prospek dan Tantangan partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

-----, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, Pustaka Pelajar, 2000

Burchill, Scoot and Andrew Linklater ed., *International Relation Theory*, , St.Martin's Press. Inc, New york, 1996

Brownig, Gary, etc, ed., *Understanding Contemporary Society (Theories end The Present)*, SAGE Publication, London, 2000

Brown, Lester R., ect., *Dunia di Tepi Jurang Kehancuran*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990

-----, Ed., *Jangan Biarkan Bumi Merana*, Laporan Worlwatch Institute, Yayasan Obor Indonesia, 1992

Dobson, Jonh A., *An Introduction to Political Science*, Wodsworth Publishing Company, Belmont, 1998

Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Daeng, Hans J., *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan (Tinjauan Antropologis)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Elliott, Lorraine, *The Global Politics of Envirotnment*, Maccmillan Press Ltd, London, 1998

Eipstein, Barbara, *Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action in The 1970s and 1980s*, University of California Press, Oxford, 1991

- Ebenstein, William, etc., *Isme-isme dewasa ini*, Erlangga, Jakarta, 1994
- Elster, Jon, *Karl Marx; Marxisme-Analisis Kritis*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2000
- Eisentadt, S.N., *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Frankland, E.Gene Frankland and Donald Schoonmaker, *Between Protes and Power : The Green Party in Geermany*, Westview Press, Boulder, San Fransisco, Oxford, 1992
- F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat Politik & Posmodernisme Menurut Jurgen Hebermas*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1986
- Gary, Browning, ect., *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present*, SAGE Publications, London, 2000
- Gee, Tee Liang, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1984
- Giddens, Anthony, *The Third Way; Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Gibbins, Jhon R., ed., *Contemporary Political Culture; Politics in a Postmodern Age*, SAGE Publications, London, 1990
- Hari Depan Kita Bersama; Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The World Commision on Environment and Development), Gramedia, Jakarta, 1988
- Hettre, Bjorn, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Hutington, Samuel P., *Tertib politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Rajawali, 1983
- , *Demokrasi Gelombang Ketiga*, Gramedia, 1995
- Inu Kencana Syafiie, Drs., *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ichlasul Amal, DR., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988



Kappler, Arno, ed., *Political System, Constitution and Law: An excerpt from "Facts About Germany"*, Press of the Federal Government, Bonn, 1996

Kesselman, Mark, etc., *European Politics in Transition (Third ed.)*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1997

Korten, David C., *Menuju Abad 21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, 2001

Korten, David C., *When Corporation Rule the World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*, Professional Books, Jakarta, 1997

Lovenduski, Joni and Pipa Norris, ed., *Gender and Party Politics*, SAGE Publication, London, 1993

Mohtar Mas' oed dan Colin M Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2000

Miriam Budiardjo, ed., *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998

Michels, Robert, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984

Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1989

Moh Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Refika Anisa Women's dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997

Padgett, Stephen, ed., *Parties and Party Systems in the New Germany*, Dartmouth, Brookfield USA, 1993

Primakov, E.M. and A.I. Vlasov, ed., *What's what internasional World Politics*, Progress Publishers, Moscow, 1987

Rommel, Ferdinand Muller, ed., *New Politics in Western Europe; The Rise and Success of Green Parties and Alternative List*, Westview Press, Colorado, 1989

Romer, Karl, *Facts about Germany—The Federal Republic of Germany*, BertelsmenLexikonVerlag. Federal Republic of Germany, 1987

Rocker, Rudolf, *Anarkisme dan Anarko-sindikalisme*, Kolektif Lintas Batas Cultuurstelsel dan SUMBU, Yogyakarta, 2001

Rodee, Carlton Clymer, etç., *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995

Sale, Kirk Patrick, *Revolusi Hijau : Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996

Stares, Paul B., *The New Germany and the New Europe*, The Brooking Institution, Washington, D.C, 1992

Steiner, Susan, ed., *Federal election in Germany*, German Information Center, New York, 1998

Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 1987

Sudijino Sastroatmodjo, Drs., *Prilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang 1995

The Political Parties in the German Bundestag, Inter Nationes, Bonn, 1999

Varma, SP., *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Windt, Joachim, ed., *Eleçtion Special: 22 September 2002 is Polling Day internasional Germany*, Goethe Institut Inter Nation, Bonn, 2002

Wolf, Naomi, *Gegar Gender (Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21)*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, 1999

Yayah Khisbiah, ect., *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Penerbitan Lembaga Pemerintah :

Departemen Luar Negeri Indonesia, *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia—Bonn*, Buku II, 1994/1995

-----, *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia—Bonn*, Buku II, 1997-1998

- , *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia*—Bonn,
Buku I, 1998-1999
- , *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia*—Bonn,
Buku II, 1998-1999
- , *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia*—Berlin,
Buku II, 1999-2000
- , *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Laporan Inti
Kepala Perwakilan)*—Berlin, 2000
- , *Laporan Tahunan Kedutaan Besar Republik Indonesia*—Berlin,
Buku II, Maret-Desember 20002
- , *Keterangan Dasar Republik Federal Jerman*—Berlin, Buku
II, 1997-1998

Jurnal:

- Jurnal Perempuan, edisi 11, Mei-Juli 1999
- Comparative Politics, October 1997, vol. 30, Number 1
- , January 1993, vol. 25, Number 2
- Pakistan Horizon, October 1990, Vol. 43, Number 4
- The Washington Quarterly, Volume 22, Number 3 Summer, 1999

Surat Kabar dan Majalah :

- Deutschland, no.6, December/January 1998
- , no.6, 1994,
- Forum Keadilan, 16 juni 2002
- , 27 Oktober 2002
- Gatra, 5 Oktober 2002

Harian Merdeka, 29 Juli 1997

-----, 23 Maret 1998

Kompas, 14 November 1997

-----, 18 November 1997

-----, 29 Oktober 1998

-----, 12 Januari 2000

-----, 21 September 2002

-----, 22 September 2002

-----, 24 September 2002

-----, 25 September 2002

Media Indonesia, 24 September 1998

-----, 12 Januari 2000

Newsweek, September 23, 2002

-----, September 30, 2002

-----, October 7, 2002

Scala, Majalah Republik Federal Jerman, 1/1990

Suara Pembaharuan, 8 Oktober 1998

Suara Karya, 21 Oktober 1998

The Jakarta Post, 14 December 1998

-----, 30 September 1998

-----, 12 Maret 2001

Time, September 2, 2002

Situs-situs Internet :

Situs Partai Hijau (Bundnis 90/Die Grunen) Jerman

Alliance 90/The Greens Call for Participation in the Demonstration in Berlin on,
http://www.gruene-partei.de/rsvgn/rs_dok/0,,20128,00.htm

Resolution of the Party Council of Bundnis90/Die Grune on the Iraq Crisis,
http://www.gruene-partei.de/rsvgn/rs_dok/0,,18641,00.htm

The Future is Green : Alliance90/The Greens (Party Program and Principles),
<http://www.archiv.gruene-partei.de/dokumente/grundsatzprogramm-english.pdf>

Renewal, Justice, Sustainability: For an Ecocomically Strong, Social and Ecological Germany For a Lively Democracy, Red-Green Coalition Agreement 2002-2006, http://www.gruene-partei.de/rsvgn/rs_datei/0,,1173,00pdf

"Superstar": German Green Party and the Election 2002,
http://www.gruene-partei.de/rsvgn/rs_dok/0,,16567,00.htm

Situs The American Institute for Contemporary German Studies(AICGS)— The Johns Hopkins University

Super Election Year 1994 Reports,
<http://www.aicgs.org/wahlen/ptag94/shtml.htm>

Election 1998; Germany in the Year of Decision,
<http://www.aicgs.org/wahlen/elect98/shtml.htm>

Prof.Dr.Norbert Walter, *Election 2002 – What Needs to be Done,*
<http://www.aicgs.wahlen.nwalter.shtml.html>

Bundestag Election in Germany; September 22, 2002,
<http://www.aicgs.org/wahlen/ptag02/shtml.htm>

Dr. Jakson Janes, *Benchmarking the Red-Green Coalition: An American Perspective,* diakses dari <http://www.aicgs.org/benchmarking/shtml.htm>

European parliament Election 1999, diakses dari <http://www.aicgs.org/wahlen/eparliament1999/shtml.htm>

Situs Lainnya

<http://www.europeangreens.org/peopleandparties/member/germany/html>

Tim Hayward, *Green Political Theory*, University of Edinburg,
<http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf>

John Barry, *Green Political Theory and The State "Discursive Sustainability ;
The State (and citizen) of Green Political Theory*,
<http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf>

Ten Key Value, di akses dari situs resmi Green Party USA ;
<http://www.greenparty.org/tenkeyvalue/html>

Emma Thurman, <http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/imagemap/emma.html>

<http://www.electionworld.com/election%20in%20Germany.htm>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/23/teropong/lainnya03.htm>

http://www.dwelle.de/indonesia/sari_pers/320205.html

<http://www.kompas.com/internasional/news/0209/23/173110.htm>

<http://www.green.org/germanygreen-elect/shtm/html>

<http://www.europeangreens.org/elect99/shtml>

Lampiran. 1

NATIONAL ELECTION RESULTS
(Member Parties of the European Federation of Green Parties)

Country/party	Year	Minist.	%	Seats
Austria/Die Grünen	1986	-	4,8	8
	1990	-	4,8	10
	1994	-	7,3	13
	1995	-	4,8	9
	1999	-	7,4	14
	2002	-	9	17
Belgium/Agalev	1978	-	0,3	0
	1981	-	2,4	2
	1985	-	3,7	4
	1987	-	4,5	6
	1991	-	4,9	7
	1995	-	4,4	5
	1999	1	7,1	9
Belgium/Ecolo	1978	-	1,2	0
	1981	-	2,6	2
	1985	-	2,5	5
	1987	-	2,6	3
	1991	-	5,1	10
	1995	-	4	6
	1999	1	7,4	11
Bulgaria/Bulgarian GP	1991	-	3,2	0
	1994	-	3,8	0

	1997	-	**	2
	2001	-	0,5**	-
Cyprus/Cyprus G.P.	1996	-	1	0
	2001	-	2	1
Czech R./Str.Zelenych	1990	-	4,1	0
	1992	-	-	0
	1998	-	1,1	0
	2002	-	2,4	0
Denmark/De Gronne	1998	-	0,3	0
	2001	-	-	0
Estonia/Estonian GP	1998	-	-	0
Finland/Vihreä Liitto	1983	-	1,4	2
	1987	-	4,0	4
	1991	-	6,8	10
	1995	1	6,5	9
	1999	1,5	7,3	11
France/Les Verts	1978	-	2,1	0
	1981	-	1,1	0
	1986	-	1,2	0
	1988	-	0,4	0
	1993	-	4,0	0
	1997	1	5,1	7
	2002	-	4,6	3
Georgia/Georgian GP	1990	-	3,3**	0
	1992	-	7,3**	11

	1995	2	**	5
	1999	-	-	0
Germany/B-90/Grünen	1980	-	1,5	0
	1983	-	5,6	27
	1987	-	8,3	44
	1990	-	4,9	8
	1994	-	7,3	49
	1998	3	6,7	46
	2002	3	8,6	55
Greece/Prassini Pol.	2000	-	-	-
Hungary/Zöld Demokr.	1990	-	0,4	0
	1994	-	0,1	0
	1998	-	0,6	0
	2002	-	3,9**	0
Ireland/Comhaont.Gl.	1981	-	0,2	0
	1987	-	0,4	0
	1989	-	1,5	1
	1992	-	1,4	1
	1997	-	2,8	2
	2002	-	3,8	6
Italy/Fed.D.Verdi	1987	-	2,5	13
	1992	-	2,8	16
	1994	-	2,7	11
	1996	2	2,5	28
	2001	-	2,2	17
Latvia/Latv.Zala P.	1990	2	-	1

	1995	2	-	4
	1998	-	-	0
	2002	1	10**	4
Luxemb./Dèi Grèng	1984	-	4,2	2
	1989	-	10	4
	1994	-	10,1	5
	1999	-	9,1	5
Malta/Alt.Demokrat.	1992	-	1,4	0
	1996	-	1,3	0
	1998	-	1,2	0
Netherl./De Groenen	1986	-	0,2	0
	1989	-	0,4	0
	1994	-	0,1	0
	1998	-	0,2	0
Netherl./GroenLinks	1989	-	4,1	2
	1994	-	3,5	5
	1998	-	7,2	11
	2002	-	7	10
	2003	-	5	8
Norway/Milj.d.Grønne	1989	-	0,4	0
	1993	-	0,1	0
	1997	-	0,2	0
	2001	-	0,2	0
Portugal/Os Verdes	1987	-	12,5**	2
	1991	-	8,8**	2
	1995	-	**	2

	1999	-	**	2
	2002	-	1,2*	2
Romania/F.E.R.				
	2000	-	1,4*	0
Russia/Interreg.GP				
	-	-	-	-
Slovakia/Str.Zelenych				
	1990	-	3,5	6
	1992	-	2,2	0
	1994	-	10,4**	2
	1998	Dep.	2,5*	4
	2002	-	1	0
Spain/Los Verdes				
	1996	-	0,2	0
	1989	-	0,8	0
	1993	-	1,4	0
	1996	-	0,7	0
	2000	-	1,1*	2
Sweden/Milj.d.Gröna				
	1981	-	1,7	0
	1985	-	1,5	0
	1988	-	5	20
	1991	-	3,4	0
	1994	-	5,0	18
	1998	-	4,5	16
	2002	-	4,6	17
Switzerl./Grüne/L.Verts				
	1979	-	0,8	1
	1983	-	6,4	8
	1987	-	8,5	13
	1991	-	6,4	14
	1995	-	5	8

	1999	-	5	9
Ukraine/Ukrain.GP				
	1998	1	5,5	26
	2002	1	1,3	0
UK/G.P.E.W.				
	1979	-	0,1	0
	1983	-	0,2	0
	1987	-	0,3	0
	1992	-	0,5	0
	1997	-	1,4	0
	2001	-	2,9	0
UK/Scottish GP				
	2001	-	0,1*	0

Note: * estimated figures
 ** in coalition

Sumber: http://www.europeangreens.org/info/archive/result_nat_archive/html

Lampiran 2

Isu dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 1994

PARTEIEN ZUR BUNDESTAGSWAHL 1994

(Political Parties)

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
F.D.P Freie Demokratische Partei
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus
REP Die Republikaner
APD Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei Deutschlands
BP Bayernpartei Solidarität Bürgerrechtsbewegung Solidarität
BSA Bund Sozialistischer Arbeiter, deutsche Sektion der Vierten Internationale
LIGA CHRISTLICHE LIGA Die Partei für das Leben
CM CHRISTLICHE MITTE Für ein Deutschland nach Gottes Geboten
ZENTRUM Deutsche Zentrumspartei
GRAUE DIE GRAUEN,- Graue Panther
NATURGESETZ Die Naturgesetz-Partei, Aufbruch zu neuem Bewußtsein
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
TIERSCHUTZ Mensch Umwelt Tierschutz
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei
PBC Partei Bibeltreuer Christen
PASS Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen
STATT Partei STATT Partei Die Unabhängigen

TOP CANDIDATES 1994

CDU Dr. Helmut Kohl
SPD Rudolf Scharping
FDP Dr. Klaus Kinkel
GRÜNE Joschka Fischer

*****	Total Seats		Seats Through First vote (Direct Vote)		Seats Through Second Vote (Party List)	
	change		change		change	
	1994	1990	1994	1990	1994	1990
CDU	244	-24	177	-15	67	-9
CSU	50	-1	44	+1	6	-2
SPD	252	+13	103	+12	149	+1
FDP	47	-32	0	-1	47	-31
Greens	49	+41	0	0	49	+41
PDS	30	+13	4	+3	26	+10
TOTAL	672	+10	328	0	344	10

*****	%	Change 1994-90	Real Numbers	Change 1994-90
eligible voters	-	-	60,396,272	-40,288
Voters	79.1	1.3	47,743,597	+747,682
valid second vote	98.7	-0.2	47,104,576	+648,804
valid first vote	98.3	-0.2	46,949,115	+674,190
invalid second vote	1.3	+0.2	639,021	+ 98,878
invalid first vote	1.7	+0.2	794,482	+ 73,492

DISTRIBUTION OF SECOND VOTE (VOTE VIA PARTY LIST)
(Parteianteile Zweitstimmen)

*****	%	Change 1994-90	Real Numbers	Change 1994-90
CDU	32.4	-2.5	16,089,491	-965,625
CSU	7.3	+0.2	3,427,128	+124,148
SPD	36.4	+2.9	17,141,319	+1,595,953
FDP	6.9	-4.1	3,257,864	-1,865,369
Greens	7.3	+3.5	3,423,091	+1,634,891
PDS	4.4	+2.0	2,067,391	+937,813
REP	1.9	-0.2	875,175	-112,094
BP	0.1	0.0	42,458	+11,143
GRAUE	0.5	-0.3	238,282	-147,628
NATURGESETZ	0.2	-	73,208	-
TIERSCHUTZ	0.2	-	71,959	-
ÖDP	0.4	0.0	182,940	-22,266
PBC	0.1	-	65,351	-
STATT Partei	0.1	-	63,257	-
Others	-	1.8	-	820,000

DISTRIBUTION OF FIRST VOTE (DIRECT VOTE)
(Parteianteile Erststimmen)

*****	%	Change 1994-90	Real Numbers	Change 1994-90
CDU	37.2	-1.1	17,472,188	- 235,386
CSU	7.6	+0.2	3,657,591	+ 233,687
SPD	38.3	+3.1	17,967,555	+1,687,575
FDP	3.3	-4.5	1,558,467	-2,036,668
Greens	6.5	+2.1	3,037,551	+ 999,666
PDS	4.1	+1.8	1,921,612	+ 872,367
REP	1.7	0.0	787,473	+ 19,821
Graue	0.4	-0.1	178,306	-40,106
ÖDP	0.4	-0.1	199,850	- 43,619
Others	0.1	-1.6	34,039	- 755,810

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 DISTRIBUTION OF SEATS IN
THE LÄNDER**

^^^^^^	TOTAL				
	CDU 1)	SPD	FDP	Greens	PDS
LÄNDER Schleswig-Holstein	10	10	2	2	-
Hamburg	5	6	1	2	-
Lower Saxony	28	28	5	5	1
Bremen	2	3	-	1	-
North Rhine-Westphalia	58	66	12	11	1
Hesse	20	19	4	5	1
Rhineland-Palatinate	15	14	2	2	-
Baden-Wuerttemberg	37	25	8	8	1
Bavaria	50	29	6	6	1
Saxony	4	5	-	-	-
Berlin	9	9	2	3	4
Brandenburg	6	12	1	-	4
Mecklenburg-Western Pomerania	7	4	1	-	3
Saxony	21	9	1	2	6
Saxony-Anhalt	10	7	1	1	4
Thuringia	12	6	1	1	4

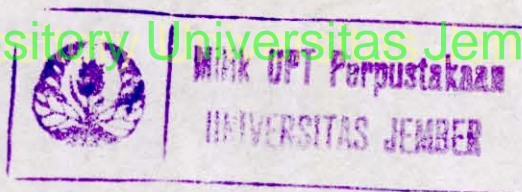
TOTAL	294	252	47	49	30
--------------	-----	-----	----	----	----

1) in Bavaria: CSU

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 DISTRIBUTION OF SEATS
FIRST VOTE (DIRECT VOTE) (*Direktmandate*)**

^^^^^^^^	CDU 1)	SPD	FDP	Greens	PDS
LAENDER Schleswig-Holstein	9	2	-	-	-
Hamburg	1	6	-	-	-
Lower Saxony	17	14	-	-	-
Bremen	-	3	-	-	-
North Rhine-Westphalia	31	40	-	-	-
Hesse	14	8	-	-	-
Rhineland-Palatinate	12	4	-	-	-
Baden-Wuerttemberg	37	-	-	-	-
Bavaria	44	1	-	-	-
Saarland	-	5	-	-	-
Berlin	6	3	-	-	4
Brandenburg	-	12	-	-	-
Mecklenburg-Western Pomerania	-	2	1	-	3
Saxony	21	-	-	-	-
Saxony-Anhalt	10	3	-	-	-
Thuringia	12	-	-	-	-
TOTAL	221	103	-	-	4

1) in Bavaria: CSU



**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 DISTRIBUTION OF SEATS
SECOND VOTE (VOTE VIA PARTY LIST)
(Listenmandate)**

^^^^^^^^	CDU 1)	SPD	FDP	Greens	PDS
Schleswig-Holstein	1	8	2	2	-
Hamburg	4	-	1	2	-
Lower Saxony	11	14	5	5	1
Bremen	2	-	-	1	-
North Rhine-Westphalia	27	26	12	11	1
Hesse	6	11	4	5	1
Rhineland-Palatinate	3	10	2	2	-
Baden-Wuerttemberg	-	25	8	8	1
Bavaria	6	28	6	6	1
Saarland	4	-	-	-	-
Berlin	3	6	2	3	-
Brandenburg	6	-	1	-	4
Mecklenburg-Western Pomerania	-	2	1	-	3
Saxony	-	9	1	2	6
Saxony-Anhalt	-	4	1	1	4
Thuringia	-	6	1	1	4
TOTAL	73	149	47	49	26

(1 in Bavaria: CSU)

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 TURNOUT AND
DISTRIBUTION OF VOTES (%)**

~~~~~	Turnout	CDU(1)	SPD
LAENDER Schleswig-Holstein	81.0	41.5	39.6
Hamburg	79.8	34.9	39.7
Lower Saxony	81.9	41.3	40.6
Bremen	78.6	30.2	45.5
North Rhine-Westphalia	81.9	38.0	43.1
Hesse	82.4	40.7	37.2
Rhineland-Palatinate	82.3	43.8	39.4



Baden-Wuerttemberg	79.7	43.3	30.7
Bavaria	77.0	51.2	29.6
Saarland	83.5	37.2	48.8
Berlin	78.7	31.4	34.0
Brandenburg	71.8	28.1	45.0
Mecklenburg-Western Pomerania	73.0	38.5	28.8
Saxony	72.0	48.0	24.3
Saxony-Anhalt	70.6	38.8	33.4
Thuringia	75.5	41.0	30.2
AREA West w/Berlin west	80.6	42.1	37.5
East w/Berlin east	72.9	38.5	31.5
<b>ELECTION RESULT</b>	<b>79.1</b>	<b>41.4</b>	<b>36.4</b>

(1 in Bavaria: CSU)

### FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 TURNOUT AND DISTRIBUTION OF VOTES (%)

	All.90/			
	FDP	GREENS	PDS	Other
LAENDER Schleswig-Holstein	7.4	8.3	1.1	2.0
Hamburg	7.2	12.6	2.2	3.3
Lower Saxony	7.7	7.1	1.0	2.4
Bremen	7.2	11.1	2.7	3.3
North Rhine-Westphalia	7.6	7.4	1.0	2.8
Hesse	8.1	9.3	1.1	3.7
Rhineland-Palatinate	6.9	6.2	0.6	3.1
Baden-Wuerttemberg	9.9	9.6	0.8	5.7
Bavaria	6.4	6.3	0.6	5.9
Saarland	4.3	5.8	0.7	3.2
Berlin	5.2	10.2	14.8	4.4
Brandenburg	2.6	2.9	19.3	2.0
Mecklenburg-Western Pomerania	3.4	3.6	23.6	2.1
Saxony	3.8	4.8	16.7	2.4
Saxony-Anhalt	4.1	3.6	18.0	2.1
Thuringia	4.2	4.9	17.1	2.5
AREA West w/Berlin west	7.7	7.9	1.0	3.9
East w/Berlin east	3.5	4.3	19.8	2.4
<b>ELECTION RESULT</b>	<b>6.9</b>	<b>7.3</b>	<b>4.4</b>	<b>3.6</b>



**FEDERAL ELECTION RESULT 1994 ELECTORAL DISTRICTS  
(WAHLKREISE) VOTER TURNOUT AND DISTRIBUTION OF SEATS  
(WAHLBETEILIGUNG UND PARTEIANTEILE 1994)**

~~~~~	Turnout	CDU/CSU	SPD
	Turnout 1994		
low (up to 77.60%)	74.0	41.8	32.4
Average (up to 81.61%)	80.0	41.1	37.5
High (up to 87.07%)	83.2	41.5	38.9
ELECTION RESULTS	79.1	41.4	36.4

(Wahlergebnis)

**FEDERAL ELECTION RESULT 1994 ELECTORAL DISTRICTS
(WAHLKREISE) VOTER TURNOUT AND DISTRIBUTION OF SEATS
(WAHLBETEILIGUNG UND PARTEIANTEILE 1994)**

~~~~~	All.90/			
	FDP	Green	PDS	Other
	Turnout 1994			
Low (up to 77.60%)	4.9	5.9	11.2	3.8
average (up to 81.61%)	7.6	8.0	1.7	4.1
high (up to 87.07%)	8.0	7.7	0.9	3.0
<b>ELECTION RESULT</b>	<b>6.9</b>	<b>7.3</b>	<b>4.4</b>	<b>3.6</b>

WAHLERGEBNIS

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 COMPARISON TO 1990  
IN %  
(DIFFERENZ ZU 1990 IN PROZENTPUNKTEN)**

~~~~~	Turnout	CDU/CSU	SPD
	Turnout 1994		
low (up to 77.60%)	+0.0	-2.3	+5.2
Average (up to 81.61%)	+2.1	-2.6	+1.9
High (up to 87.07%)	+1.7	-2.2	+1.6
TOTAL	+1.3	-2.4	+2.9

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 COMPARISON TO 1990 IN %
(DIFFERENZ ZU 1990 IN PROZENTPUNKTEN)**

~~~~~	All.90/			
	FDP	Green	PDS	Other
Turnout 1994				
low (up to 77.60%)	-6.5	+0.2	+4.8	-1.4
average (up to 81.61%)	-2.9	+3.1	+0.9	-0.4
High (up to 87.07%)	-3.1	+3.2	+0.6	-0.1
<b>TOTAL</b>	<b>-4.1</b>	<b>+2.2</b>	<b>+2.0</b>	<b>-0.6</b>

**FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 BALLOTS ACCORDING TO  
SOCIAL GROUPS SECOND VOTE (VOTE VIA PARTY LIST)**

~~~~~	CDU	SPD	FDP
Total	41.4	36.4	6.9
Gender			
Male	40.6	36.1	7.5
Female	42.2	35.9	6.6
Age			
18-24	33.2	34.6	6.3
25-34	32.1	39.4	5.3
35-44	36.8	37.7	6.6
45-59	44.5	36.7	7.8
60+	49.7	34.3	7.5
Age and Gender			
18-24 Male	35.0	32.7	6.7
18-24 Female	30.8	36.5	6.2
25-34 Male	34.9	36.7	5.7
25-34 Female	29.1	42.5	4.9
35-44 Male	35.7	39.2	7.0
35-44 Female	37.6	35.9	6.4
45-59 Male	44.2	36.4	8.7
45-59 Female	45.3	35.9	7.2
60+ Male	47.7	34.7	8.4

60+ Female	52.6	32.2	7.2
Employment			
employed	39.1	36.6	73.2
retirees	48.9	35.7	6.5
trainees	28.8	32.9	6.8
unemployed	30.7	42.4	3.7
Occupation			
blue-collar	36.9	45.3	3.5
employee	38.4	36.4	7.5
civil servant	42.7	32.9	8.0
self-employed	52.2	17.5	14.9
Farmer	64.3	14.0	8.6
union member	30.0	49.5	3.4
non-member	43.7	32.5	8.0
Blue-Collar/Union Member			
union member	29.5	54.8	2.2
non-member	40.9	39.3	4.5
Employee/Union member			
union member	28.0	46.0	4.2
non-member	40.6	34.0	8.3

FEDERAL ELECTION RESULTS 1994 BALLOTS ACCORDING TO SOCIAL GROUPS SECOND VOTE (VIA PARTY LIST)

*****	GREENS	PDS	Others
Total	7.3	4.4	3.6
GENDER			
Males	7.0	4.6	4.2
females	8.2	4.2	2.9
AGE GROUP			
18-24	14.2	5.1	6.6
25-34	12.7	5.5	5.0
35-44	10.5	5.2	3.2
45-59	4.3	4.0	2.7
60+	2.5	3.3	2.7

AGE & GENDER				
18-24	males	12.9	4.8	7.9
	females	15.8	5.5	5.2
25-34	males	11.5	5.2	6.0
	females	14.2	5.6	3.7
35-44	males	9.5	5.0	3.6
	females	12.0	5.1	3.0
45-59	males	3.9	3.9	2.9
	females	5.0	4.3	2.3
60+	males	1.9	4.2	3.1
	females	3.2	2.6	2.2
EMPLOYMENT				
employed		8.2	4.7	4.2
Retirees		2.6	3.9	2.4
Trainees		20.9	6.0	4.6
Unemployed		6.8	12.0	4.4
OCCUPATION				
blue-collar		4.7	4.7	4.9
Employee		8.8	5.8	3.1
civil servant		10.9	2.6	2.9
self-employed		7.7	3.4	4.3
Farmer		4.3	2.7	6.1
union member		7.0	6.3	3.8
non-member		8.0	4.1	3.7
BLUE-COLLAR/ UNION MEMBER				
union member		4.3	4.7	4.5
non-member		5.2	4.9	5.2
EMPLOYEE/ UNION MEMBER				
union member		8.8	9.6	3.4
non-member		9.0	5.0	3.1

THE MOST IMPORTANT ISSUES IN GERMANY

ISSUE	Percentage
Unemployment	66
Asylum Seekers/Immigration	17
Law and Order	11
Environment	10
Housing	10

POPULARITY OF TOP CANDIDATE

	Percentage
KOHL	
Total Respondents	49
Supporters of the CDU/CSU	94
SCHARPING	
Total Respondents	44
Supporters of the SPD	87

GREATER COMPETENCE IN THE REALM OF POLITICS

	CDU/CSU	SPD
Government		
Government ISSUE		
Economy	37	22
Unemployment	24	33
Asylum Seekers/Immigration	31	29
Law and Order	25	16
Environment	13	38
Housing	17	42

Sumber : Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim

Translation: AICGSDOC, dalam The American Institute for Contemporary German Studies(AICGS)—The Johns Hopkins University

<http://www.aicgs.org/wahlen/btagtab4/shtml.htm>

Lampiran 3

su dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 1998

Second (Party) Votes by Party 1998

	%	Diff. 1994-98	absolute #'s	Diff. 1994-98
Eligible voters			60,710,333	+258,324
Voters	82.3	+3.3	49,946,094	+2,208,095
Valid second votes	98.7	0.0	49,300,455	+2,195,281
Invalid second votes	1.3	0.0	645,639	+12,814
Second Votes by Party				
SPD	40.9	+4.5	20,178,838	+3,038,484
CDU	28.4	-5.8	14,004,907	-2,085,053
CSU	6.7	-0.5	3,324,325	-102,871
Grüne	6.7	-0.6	3,300,133	-124,182
FDP	6.2	-0.7	3,080,661	-177,746
PDS	5.1	+0.7	2,513,788	+447,612
Deutschland	0.0	-	6,226	-
APPD	0.1	-	35,347	-
APD	0.0	0.0	6,714	-14,819
BP	0.1	0.0	28,087	-14,404
BüSo	0.0	0.0	9,682	+1,579
BFB - Die Offensive	0.2	-	121,220	-
Chance 2000	0.1	-	28,537	-
CM	0.0	0.0	24,030	+4,143
DPD	0.0	-	2,493	-
DVU	1.2	-	600,194	-
Graue	0.3	-0.2	152,920	-85,722
REP	1.8	-0.1	905,200	+29,961
Familie	0.1	-	24,862	-
Die Frauen	0.1	-	30,388	-
HP	0.0	-	435	-
Pro DM	0.9	-	429,468	-
MLPD	0.0	0.0	4,971	-5,067
Tierschutz	0.3	+0.1	133,590	+61,947

NPD	0.3	-	126,428	-
Naturgesetz	0.1	-0.1	30,791	-42,402
Forum	0.0	-	4,570	-
ödp	0.2	-0.2	97,709	-86,006
PBC	0.1	0.0	71,989	+6,338
AB 2000	0.0	-	3,355	-
Nichtwähler	0.0	-	6,794	-
Pass	0.0	-	5,530	-9,510
PSG (called BSA in 1994)	0.0	0.0	6,273	+4,988
Others	-	-0.2		-72,306

1998 First (Candidate) Votes by Party

	%	Diff. 1994-98	absolute #'s	Diff. 1994-98
Eligible voters			60,710,333	+258,324
Voters	82.3	+3.3	49,946,094	+2,208,095
Valid first votes	98.4	+0.1	49,158,470	+2,209,114
Invalid first votes	1.6	-0.1	787,624	-1,019
First Votes by Party				
SPD	43.8	+5.5	21,532,507	+3,565,694
CDU	32.2	-5.0	15,853,598	-1,619,727
CSU	7.3	-0.5	3,602,027	-55,600
Grüne	4.97	-1.5	2,446,911	-590,991
FDP	3.0	-0.3	1,486,911	-71,274
PDS	4.9	+0.8	2,415,040	+494,620
Deutschland	0.0	-	1,942	-
APPD	0.0	-	1,666	-
APD	0.0	0.0	1,463	-191
BP	0.0	0.0	1,774	-1,550
BüSo	0.0	0.0	10,243	+2,211
BFB - Die Offensive	0.3	-	134,693	-
CHANCE 2000	0.0	-	3,195	-
CM	0.0	0.0	8,992	+5,433
DPD	0.0	-	1,170	-

GRAUE	0.3	-0.1	141,826	-36,624
REP	2.3	+0.6	1,115,072	+327,315
FAMILIE	0.0	-	8,129	-
DIE FRAUEN	0.0	-	3,928	-
HP	0.0	-	524	-
MLPD	0.0	0.0	7,213	+2,281
Tierschutz	0.0	-	1,733	-
NPD	0.1	-	45,060	-
NATURGESETZ	0.1	-0.1	35,114	-23,973
FORUM	0.0	-	6,287	-
ödp	0.3	-0.1	145,146	-54,992
PBC	0.1	0.0	46,421	+19,557
AB2000	0.0	-	4,091	-
PASS	0.0	0.0	10,400	+9,911
DKP	0.0	0.0	2,110	+1,417
DSU	0.0	0.0	8,162	+5,767
ZENTRUM	0.0	0.0	2,074	+585
DMP	0.0	-	1,927	-
FP Deutschlands	0.0	-	132	-
FSU	0.0	0.0	765	+298
STATT Partei	0.0	0.0	4,385	-3,542
Others	0.1	0.0	65,839	+18,012

Voter Participation by Party and State 1998

State	Participation	SPD	CDU-CSU	B90/Greens	FDP	PDS	Others
Schlesw.-Holstein	82.7	45.4	35.7	6.5	7.6	1.5	3.3
Hamburg	81.1	45.8	30.0	10.7	6.4	2.3	4.7
Niedersachsen	84.0	49.4	34.1	5.9	6.4	1.0	3.2
Bremen	82.0	50.2	25.5	11.2	5.9	2.4	4.7
Nordrh.Westf.	83.9	46.9	33.8	6.9	7.3	1.2	4.0
Hessen	84.2	41.6	34.7	8.2	7.8	1.5	6.2
Rheinl.-Pfalz	83.9	41.3	39.1	6.1	7.1	1.0	5.4
Baden-Württt.	83.1	35.6	37.8	9.2	8.8	1.0	7.5

Bayern	79.3	34.4	47.7	5.9	5.1	0.7	6.2
Saarland	84.8	52.4	31.8	5.5	4.7	1.0	4.5
Berlin	81.1	37.8	23.7	11.3	4.9	13.5	8.8
Brandenburg	78.2	43.5	20.8	3.6	2.8	20.3	8.9
Mecklenb. Vorp	80.3	35.4	29.3	2.9	2.2	23.6	6.6
Sachsen	81.6	29.1	32.7	4.4	3.6	20.0	10.2
Sachs.-Anhalt	77.2	38.1	27.2	3.3	4.1	20.7	6.6
Thüringen	82.3	34.5	28.9	3.9	3.4	21.2	8.1
AREA							
West (without Berlin)	82.8	42.4	37.2	7.1	7.0	1.1	5.1
East (with Berlin)	80.3	35.6	27.6	5.2	3.6	19.5	8.5
Total Results	82.3	40.9	35.2	6.7	6.2	5.1	5.9

1998 Difference from 1994 in Percentage Points

State	Participation	SPD	CDU-CSU	B90/Greens	FDP	PDS	Others
Schlesw.-Holstein	+1.8	+5.8	-5.8	-1.8	+0.2	+0.4	+1.3
Hamburg	+1.4	+6.1	-4.9	-1.9	-0.8	+0.1	+1.4
Niedersachsen	+2.2	+8.8	-7.2	-1.2	-1.3	+0.0	+0.8
Bremen	+3.5	+4.7	-4.7	+0.1	-1.3	-0.3	+1.4
Nordrh. Westf.	+2.0	+3.8	-4.2	-0.5	-0.3	+0.2	+1.2
Hessen	+1.9	+4.4	-6.0	-1.1	-0.3	+0.4	+2.5
Rheinl.-Pfalz	+1.6	+1.9	-4.7	-0.1	+0.2	+0.4	+2.5
Baden-Württ.	+3.4	+4.9	-5.5	-0.4	-1.1	+0.2	+1.8
Bayern	+2.4	+4.8	-3.5	-0.4	-1.3	+0.2	+0.3
Saarland	+1.3	+3.6	-5.4	-0.3	+0.4	+0.3	+1.3
Berlin	+2.5	+3.8	-7.7	+1.1	-0.3	-1.3	+4.4
Brandenburg	+6.7	-1.6	-7.3	+0.7	+0.2	+1.0	+6.9
Mecklenb. Vorp	+7.5	+6.6	-9.2	-0.7	-1.2	+3.3	+7.8
Sachsen	+9.6	+4.8	-15.3	-0.4	-0.2	+3.3	+7.8
Sachs.-Anhalt	+6.8	+4.7	-11.6	-0.3	+0.0	+2.7	+4.5

Thüringen	+7.4	+4.3	-12.1	-1.0	-0.7	+4.0	+5.6
AREA							
West (w/o Berlin)	+2.2	+4.8	-5.0	-0.7	-0.7	+0.2	+1.3
East (w/ Berlin)	+6.9	+3.8	-10.9	-0.1	-0.4	+1.9	+5.8
Total Results	+3.3	+4.5	-6.2	-0.6	-0.7	+0.7	+2.3

1998 Seat Distribution by State and Party

State	SPD	CDU	GRÜ	FDP	PDS
Schleswig-Holstein	11	9	2	2	-
Hamburg	7	4	1	1	-
Niedersachsen	35	24	4	5	1
Bremen	3	1	1	-	-
Nordrhein-Westfalen	72	52	11	11	2
Hessen	21	17	2	2	1
Rheinland-Pfalz	15	14	2	3	-
Baden-Württemberg	30	32	8	7	1
Bayern	34	47	6	5	1
Saarland	5	3	-	-	-
Berlin	10	7	3	1	4
Brandenburg	12	5	1	1	4
Mecklenburg-Vorpommern	7	4	-	-	3
Sachsen	12	13	2	2	8
Sachsen-Anhalt	13	6	1	1	5
Thüringen	11	7	1	1	5
Totals	298	245	47	43	36

1998 Vote Distribution by Sex and Age (in percentages)

	SPD	CDU-CSU	Greens	FDP	PDS	others
Sex						
Male	41	35	6	6	5	7
female	41	35	8	6	5	5
Age						
18-24	36	32	10	6	6	12
25-34	42	29	10	6	5	9
35-44	42	29	10	5	7	6
45-59	43	36	5	7	5	4
60+	40	44	2	6	4	4
Age and Sex						
18-24 male	35	32	8	7	5	13
18-24 female	37	31	12	5	6	10
25-34 male	42	30	8	6	5	9
25-34 female	42	27	12	6	6	8
35-44 male	44	31	9	5	6	6
35-44 female	41	29	12	5	7	5
45-59 male	43	36	5	8	5	5
45-59 female	43	35	6	7	5	4
60+ male	39	43	2	7	6	4
60+ female	41	44	3	6	3	3
Totals	40.9	35.2	6.7	6.2	5.1	5.9

1998 Results by Occupation and Social Structure

	SPD	CDU	Greens	FDP	PDS	others
Employment Status						
Employed	41	33	8	7	5	7
Retired	42	41	3	6	5	4
in training	37	27	17	6	6	7
Unemployed	44	23	7	4	13	9
Employment Type						

Blue-Collar	48	30	3	3	6	10
White-Collar	42	32	8	7	6	5
Civil Servants	36	40	11	6	3	4
Self-Employed	22	44	10	15	4	5
Agricultural	15	69	2	9	3	3
Labor Union Membership						
Labor Union Member	56	22	6	3	7	6
Non-Union Member	38	37	7	7	5	6
Blue-Collar Union Members						
Member	61	19	3	2	6	9
Non-Member	43	33	3	4	6	11
White-Collar Union Members						
Member	52	21	10	3	8	6
Non-Member	39	34	8	8	6	5

1998 Results by Religious Affiliation

	SPD	CDU	Greens	FDP	PDS	Others
Catholic	36	47	6	6	1	5
Protestant	46	33	7	7	2	5
None	41	21	8	5	16	9

Sumber : Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim

Translation AICGSDOC, dalam The American Institute for Contemporary German Studies(AICGS)- The Johns Hopkins University <http://www.aicgs.org/wahlen/elect98/shtml.htm>

Lampiran 4

Isu dan Hasil Pemilu Federal (*Bundestagswahl*) Jerman 2002

Preliminary Results 2002: State Level

VOTER TURNOUT AND PARTY VOTE 2002

***	Turnout	SPD	CDU/CSU	GRÜNE	FDP	PDS	Others
Schlesw. Holstein	80.9	42.9	36.0	9.4	8.0	1.3	2.4
Hamburg	79.6	42.0	28.1	16.2	6.8	2.1	4.8
Lower Saxony	81.0	47.8	34.5	7.3	7.1	1.0	2.2
Bremen	78.9	48.6	24.5	15.0	6.7	2.3	3.0
Nordrh. Westf.	80.3	43.0	35.1	8.9	9.3	1.2	2.5
Hessen	80.2	39.7	37.1	10.7	8.2	1.3	2.9
Rheinl.-Pfalz	80.0	38.2	40.2	7.9	9.3	1.0	3.3
Baden-Wurttt.	81.1	33.5	42.8	11.4	7.8	0.9	3.6
Bavaria	81.6	26.1	58.6	7.6	4.5	0.7	2.4
Saarland	80.0	46.0	35.0	7.6	6.4	1.4	3.7
Berlin	77.6	36.6	25.9	14.6	6.6	11.4	4.9
Brandenburg	73.7	46.4	22.3	4.5	5.8	17.2	3.8
Mecklenb. Vorp	71.1	41.7	30.3	3.5	5.4	16.3	2.8
Saxony	73.6	33.3	33.6	4.6	7.3	16.2	5.1
Saxony Anhalt	68.7	43.2	29.1	3.4	7.6	14.4	2.4
Thuringen	74.8	39.9	29.4	4.3	5.9	17.0	3.6
Berlin West	80.7	38.3	40.8	9.4	7.6	1.1	2.8
Berlin East	72.8	39.8	28.3	4.8	6.4	16.8	4.0
Election Results	79.1	38.5	38.5	8.6	7.4	4.0	3.0

DIFFERENCE IN RESULTS: 1998 and 2002 (in percentage points)

Schlesw. Holstein	-1.5	-2.5	+0.3	+2.9	+0.4	-0.2	-0.9
Hamburg	-1.5	-3.7	-1.9	+5.4	+0.3	-0.2	+0.1
Lower Saxony	-2.9	-1.6	+0.4	+1.4	+0.7	+0.0	-1.0
Bremen	-3.2	-1.6	-0.9	+3.7	+0.8	-0.1	-1.7
Nordrh. Westf.	-3.6	-3.9	+1.3	+2.0	+2.0	+0.0	-1.5
Hessen	-4.0	-1.9	+2.4	+2.5	+0.3	-0.2	-3.3

Rheinl.-Pfalz	-3.9	-3.1	+1.1	+1.8	+2.2	+0.0	-2.1
Baden-Wurtt.	-2.0	-2.1	+5.0	+2.2	-1.0	-0.1	-4.0
Bavaria	+2.4	-8.3	+10.9	+1.7	-0.6	+0.0	-3.8
Saarland	-4.8	-6.4	+3.2	+2.1	+1.7	+0.4	-0.8
Berlin	-3.5	-1.2	+2.2	+3.3	+1.7	-2.0	-3.9
Brandenburg	-4.4	+2.9	+1.5	+0.9	+3.0	-3.1	-5.1
Mecklenb. Vorp	-8.3	+6.4	+1.0	+0.6	+3.2	-7.3	-3.8
Saxony	-8.0	+4.2	+0.9	+0.2	+3.7	-3.8	-5.1
Saxony Anhalt	-8.4	+5.1	+1.9	+0.1	+3.5	-6.3	-4.2
Thuringen	-7.5	+5.4	+0.5	+0.4	+2.5	-4.2	-4.5
Berlin West	-2.1	-4.0	+3.8	+2.1	+0.6	-0.1	-2.4
Berlin East	-7.1	+4.7	+1.0	+0.6	+3.1	-4.6	-4.6
Election Results	-3.1	-2.4	+3.4	+1.9	+1.2	-1.1	-2.9

Federal Elections 2002: Seat distribution: State Level

		SPD	CDU/CSU	Grüne	FDP	PDS
Schlesw. Holstein	SCHL	10	8	2	2	-
Hamburg	HAMB	6	4	2	1	-
Lower Saxony	NIED	31	22	5	5	-
Bremen	BREM	2	1	1	-	-
Nordrh. Westf.	NORD	60	49	12	13	-
Hessen	HESS	18	17	5	4	-
Rheinl.-Pfalz	RHEI	12	13	2	3	-
Baden-Wurtt.	BADE	27	34	9	6	-
Bavaria	BAYE	26	58	7	4	-
Saarland	SAAR	4	3	1	1	-
Berlin	BERL	9	6	4	2	2
Brandenburg	BRAN	10	4	1	1	-
Mecklenb. Vorp	MECK	5	4	-	1	-
Saxony	SACH	12	13	2	2	-
Saxony Anhalt	ANHA	10	6	1	1	-
Thuringen	THUE	9	6	1	1	-
Federal Territories	BUND	251**	248***	55	47	2

	Direct mandates (First vote)						List mandates (Second vote)				
SCHL	10	11	-	-	-	-	7	2	2	-	-
HAMB	6	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-
NIED	25	4	-	-	-	6	18	5	5	-	-
BREM	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
NORD	45	19	-	-	-	15	30	12	13	-	-
HESS	17	4	-	-	-	1	13	5	4	-	-
RHEI	7	8	-	-	-	5	5	2	3	-	-
BADE	7	30	-	-	-	25	15	7	4	-	-
BAYE	1	43	-	-	-	25	15	7	4	-	-
SAAR	4	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
BERL	9	-	1	-	2	-	6	3	2	-	-
BRAN	10	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-
MECK	5	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-
SACH	4	13	-	-	-	8	-	2	2	-	-
ANHA	10	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-
THUE	9	1	-	-	-	-	5	1	1	-	-
Federal Territories	171	125	1	-	2	80	123	54	47	-	-

*CSU in Bavaria

** SPD total includes 4 overhang mandates: Hamburg 1, Saxony Anhalt 2, Thuringen 1

*** CDU/CSU total includes 1 overhang mandate: Saxony

State Election Results since 1998

PARTY VOTES (in %)

		Turnout (%)	CDU ¹⁾	SPD	GRÜ ²⁾	FDP	PDS	Rep	Others
01.03.1998	Lower Saxony	73.8	35.9	47.9	7.0	4.9	-	2.8	1.53)
13.09.1998	Bavaria	69.8	52.9	28.7	5.7	1.7	-	3.6	7.44)
07.02.1999	Hessen	66.4	43.4	39.4	7.2	5.1	-	2.7	2.25)
06.06.1999	Bremen	60.1	37.1	42.5	9.0	2.5	2.9	-	6.06)
05.09.1999	Brandenburg	54.3	26.5	39.3	1.9	1.9	23.3	-	7.07)
05.09.1999	Saarland	68.7	45.5	44.4	3.2	2.6	0.8	1.3	2.2
12.09.1999	Thuringen	59.9	51.0	18.5	1.9	1.1	21.3	0.8	5.48)
19.09.1999	Sachsen	61.1	56.9	10.7	2.6	1.1	22.2	1.5	5.09)
27.02.2000	Schleswig-	60.5	35.2	43.1	6.2	7.6	1.4	-	6.10)

Holstein									
14.05.2000	Nordrhein-Westfalen	56.7	37.0	42.8	7.1	9.8	1.1	1.1	1.1
25.03.2001	Baden-Württemberg	62.6	44.8	33.3	7.7	8.1	-	4.4	1.7
25.03.2001	Rheinland-Pfalz	62.1	35.3	44.7	5.2	7.8	-	2.4	4.5(1)
23.09.2001	Hamburg	71.0	26.2	36.5	8.6	5.1	0.4	0.1	23.2(2)
21.10.2001	Berlin	68.1	23.8	29.7	9.1	9.9	22.6	1.3	3.6(3)
21.04.2002	Saxony Anhalt	56.5	37.3	20.0	2.0	13.3	20.4	-	7.1(4)
22.09.2002	Mecklenburg Vorp.	71.1	31.3	40.6	2.6	4.7	16.4	0.3	4.0(5)

DIFFERENCE IN RESULTS: COMPARED TO PREVIOUS ELECTION YEAR

		Turnout (%)	CDU¹⁾	SPD	GRÜ²⁾	FDP	PDS	Rep	Others
01.03.1998	Lower Saxony	0.0	-0.5	3.6	-0.4	0.5	-	-0.9	-2.2
13.09.1998	Bavaria	2.0	0.1	-1.3	-0.4	-1.1	-	-0.3	3.2
07.02.1999	Hessen	0.1	4.2	1.4	-4.0	-2.3	-	0.7	-0.1
06.06.1999	Bremen	-8.5	4.5	9.1	-4.1	-0.9	0.5	-	-8.9
05.09.1999	Brandenburg	-2.0	7.8	-14.8	-1.0	-0.3	4.6	-1.1	4.8
05.09.1999	Saarland	-14.8	6.9	-5.0	-2.3	0.5	0.8	-0.1	-0.8
12.09.1999	Thuringen	-14.9	8.4	-11.1	-2.6	-2.1	4.7	-0.5	3.1
19.09.1999	Sachsen	2.7	-1.2	-5.9	-1.5	-0.6	5.7	0.2	3.4
27.02.2000	Schleswig-Holstein	-2.3	-2.0	3.3	-1.9	1.9	-	-	-2.6
14.05.2000	Nordrhein-Westfalen	-7.3	-0.7	-3.2	-2.9	5.8	-	0.3	-0.4
25.03.2001	Baden-Württemberg	-5.0	3.5	8.2	-4.4	-1.5	-	-4.7	-1.1
25.03.2001	Rheinland-Pfalz	-8.7	-3.4	4.9	-1.7	-1.1	-	1.1	2.3
23.09.2001	Hamburg	2.3	-4.5	0.3	-5.4	1.6	-0.3	-1.7	10.0
21.10.2001	Berlin	2.6	-17.0	7.3	-0.8	7.7	4.9	-1.3	-0.7
21.04.2002	Saxony Anhalt	-15.0	15.3	-15.9	-1.2	9.1	0.8	-	-7.9
22.09.2002	Mecklenburg Vorp.	-8.3	1.1	6.3	-0.1	3.1	-8.0	-0.2	-2.3

-
- 1) CSU in Bavaria
 - 2) GRÜNE/GAL in Hamburg
 - 3) incl. STATT party: 0.7
 - 4) incl. FW: 3.7
 - 5) incl. FWG: 0.4
 - 6) incl. DVU: 3.0; AFB: 2.4
 - 7) incl. DVU: 5.3
 - 8) incl. Pro DM: 2.1; NPD: 1.4
 - 9) incl. SSW: 4.1; NPD: 1.0
 - 10) incl. SSW: 4.1; NPD: 1.0
 - 11) incl. FWG: 2.5; NPD: 0.5; Party for animal protection: 0.9
 - 12) incl. Schill: 19.4; Regenbogen: 1.7
 - 13) incl. GRAUE: 1.4; NPD: 0.9; STATT party: 0.8
 - 14) incl. Schill: 4.5; FDVP: 0.8; Pro DM: 0.4
 - 15) incl. Schill: 1.7; NPD: 0.8

Comparison: City-State Level Election Results VOTER TURNOUT AND PARTY VOTES 2002

Population	Turnout (%)	SPD	CDU/CSU	GRÜNE	FDP	PDS	Others
very low - 170 residents	81.0	34.7	49.2	6.5	6.2	0.8	2.5
low - 300 residents	81.1	37.1	43.4	8.1	7.7	0.9	2.8
medium - 1000 residents	81.5	39.5	38.2	9.8	8.5	1.1	2.9
high - 5300 residents	79.1	41.7	32.3	13.2	7.9	1.8	3.0
Election Results	80.7	38.3	40.8	9.4	7.6	1.1	2.8

DIFFERENCES IN RESULTS (in percentage points)

Population	Turnout (%)	SPD	CDU/CSU	GRÜNE	FDP	PDS	Others
very low - 170 residents	-0.7	-5.3	+6.7	+1.2	+0.2	+0.0	-2.8
low - 300 residents	-2.2	-3.9	+3.9	+1.7	+0.8	+0.0	-2.4
medium - 1000 residents	-2.8	-3.2	+2.6	+2.2	+0.7	+0.0	-2.3
high - 5300 residents	-2.7	-3.8	+1.6	+3.4	+0.9	+0.0	-2.1
Election Results	-2.1	-4.0	+3.8	+2.1	+0.6	-0.1	-2.4

Population: residents / sq. kilometer

data and analysis from the [Forschungsgruppe Wahlen e.V.](http://www.forschungsgruppe.wahlen.de/) Used with permission

Sumber: The American Institute for Contemporary German Studies(AICGS)-The Johns Hopkins University dalam <http://www.aicgs.org/wahlen/btag02/shtml.htm>

Hasil Pemilu di Tingkat Parlemen Eropa 1999

Distribution of Seats

Party	1999 Totals	Difference 1994-1999
SPD	33	-7
CDU	43	+4
The Greens	7	-5
CSU	10	+2
PDS	6	+6
Overall	99	0

Results by Individual Party

	Percentage	Difference '94-'99	Overall Number of Voters	Difference '94-'99
Eligible Voters			60,766,224	+292,314
Participating Voters	45.2	-14.8	27,472,760	-8,822,769
Valid Votes	98.5	+0.9	27,054,722	-8,356,692
Invalid Votes	1.5	-0.9	418,038	-466,077
Party				
SPD	30.7	-1.5	8,306,142	-3,083,555
CDU	39.3	+7.3	10,627,997	-718,736
The Greens	6.4	-3.7	1,704,906	-1,822,362
CSU	9.4	+2.6	2,538,719	+145,345
PDS	5.8	-1.1	1,567,376	-102,940
FLP	3.0	-1.1	820,106	-622,751
RFP	1.7	-2.2	461,088	-925,982
GRAUE	0.4	-0.4	112,248	-163,618
ödp	0.4	-0.4	100,059	-173,717
APD	0.4	-0.3	97,952	-133,313
PASS	0.3	-0.1	71,385	-55,719
BP	0.1	-0.2	15,012	-95,766
PDC	0.3	0.0	68,671	-24,539
Naturgesetz	0.1	-0.2	38,302	-53,729

NPD	0.4	+0.2	107,545	+30,318
CM	0.1	-0.1	30,719	36,047
BüSo	0.0	-0.1	9,449	-14,402
Familie	0.0	0.0	4,112	+1,331
ASP	0.1	-	33,920	-
Zentrum	0.0	-	7,196	-
Die Frauen	0.4	-	99,959	-
HP	0.0	-	11,724	-
Tierschutz	0.7	-	184,795	-
Others	-	-2.4	-	-844,104

Results by Individual State

Federal State	Voter Turnout	CDU/CSU	SPD	The Greens	PDS	FDP	Others
Schleswig-Holstein	38.8	50.5	35.3	6.1	1.4	3.1	3.5
Hamburg	37.0	40.2	37.2	12.0	3.3	3.3	4.0
Niedersachsen	44.2	47.2	39.5	6.1	1.2	2.7	3.3
Bremen	43.8	34.8	43.7	12.2	2.6	2.9	3.8
Nordrhein-Westfalen	43.8	47.3	37.3	7.1	1.3	3.5	3.4
Hessen	42.1	47.3	34.5	8.0	1.6	3.9	4.8
Rheinland-Pfalz	63.9	50.0	35.2	5.2	0.8	3.7	5.2
Baden-Württemberg	40.6	50.9	26.1	9.7	1.1	4.9	7.2
Bayern	44.9	64.0	21.6	6.1	0.7	1.9	5.7
Saarland	60.4	44.9	41.3	5.0	1.0	2.1	5.7
Berlin	39.9	35.0	26.7	12.5	16.7	2.4	6.7
Brandenburg	30.1	29.1	31.6	3.3	25.8	2.3	7.9
Mecklenburg-Vorpommern	50.9	45.4	20.3	2.5	24.3	1.3	6.1
Sachsen	53.6	45.9	19.6	2.7	21.0	2.3	8.5
Sachsen-Anhalt	49.6	19.7	26.7	2.1	20.9	2.9	7.8
Thüringen	58.3	42.4	25.6	2.6	20.6	2.1	7.0
Totals	45.2	48.7	30.7	6.4	5.8	3.0	5.4

Results by Voter Participation Levels

Voter Participation	CDU/CSU	SPD	The Greens	PDS	FDP	Others
up to 41.71%	345.4	32.9	7.4	5.7	3.3	5.5
up to 46.00%	50.9	31.2	7.3	2.8	2.9	4.9
up to 74.19%	49.2	28.7	5.1	8.3	3.0	5.7
Totals	48.7	30.7	6.4	5.8	3.0	5.4

Party Results by Age and Gender

	CDU/CSU	SPD	The Greens	PDS	FDP	Others
Overall	48.7	30.7	6.4	5.8	3.0	5.4
Gender						
Male	49	29	6	7	3	6
Female	47	32	7	5	3	5
Age						
18-24	47	23	11	6	5	9
25-34	45	27	10	5	3	9
35-44	41	33	11	7	3	5
45-59	49	32	5	6	3	5
60 & Over	54	32	2	5	3	4
Age & Gender						
18-24 Male	50	22	9	7	5	9
18-24 Female	43	24	13	6	5	10
25-34 Male	46	27	9	5	3	10
25-34 Female	43	28	12	6	3	8
35-44 Male	43	31	10	7	3	6
35-44 Female	40	35	12	6	3	5
45-59 Male	50	30	5	7	3	4
45-59 Female	48	34	5	5	3	5
60+ Male	54	31	2	7	3	4
60+ Female	54	34	3	4	2	3



Election Results by Occupation

	CDU/CSU	SPD	The Greens	PDS	FDP	Others
Overall	47.8	30.7	6.4	5.8	3.0	5.4
Current Employment Status						
Employed	47	29	8	6	4	7
Retired	54	33	2	6	2	3
In Training	39	26	16	7	5	6
Unemployed	37	32	7	14	1	9
Worker Type						
Blue Collar	45	36	3	7	2	8
White Collar	46	31	7	7	3	6
Civil Servant	47	32	12	3	2	4
Self-Employed	60	18	8	5	6	4
Farmer	74	10	3	5	2	6
Union Status						
Member	34	45	6	8	2	5
Non-Member	52	27	7	5	3	6
Blue Collar & Union Member						
Member	34	49	2	8	2	7
Non-Member	50	30	3	7	2	8
White Collar/ Union Member						
Member	31	44	8	11	2	4
Non-Member	49	28	7	6	4	6

Election results by Religious Denomination

	CDU/CDU	SPD	The Greens	PDS	FDP	Others
Overall	48.7	30.7	6.4	5.8	3.0	5.4
Orientation						

Digital Repository Universitas Jember

Catholic	63	25	5	1	2	5
Protestant	45	37	7	2	4	5
None	34	28	7	20	3	8
Church Attendance						
Every Sunday	76	14	3	1	1	6
Sometimes	57	30	6	1	3	4
Seldom/ Never	44	37	8	2	4	5
Orientation & Attendance						
Catholic/ Every	82	11	2	0	1	4
Catholic/ Sometimes	65	24	5	0	3	3
Catholic/ Seldom- Never	49	34	8	1	3	6
Protestant/ Every	54	24	7	1	2	12
Protestant/ Sometimes	51	35	6	2	3	4
Protestant/ Seldom- Never	41	40	8	3	4	4

Sumber : Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim

Translation: AICGSDOC , dalam The American Institute for Contemporary German Studies (AICGS)

The Johns Hopkins University : <http://www.aicgs.org/wahlen/cuparliament1999/shtml.htm>

Lampiran 6

Federal Governments Since 1949 (Chancellor, tenure, coalition)

Period	Chancellor	Tenure	Coalition
1949-1953	Konrad Adenauer- CDU	20/09/1949-20/10/1953	CDU/CSU, FDP, DP
1953-1957	Konrad Adenauer- CDU	20/10/1953-29/10/1957	CDU/CSU, FVP, DP
1957-1961	Konrad Adenauer- CDU	20/10/1957-14/11/1961	CDU/CSU, DP
1961-1965	Konrad Adenauer- CDU Ludwig Erhard-CDU	14/11/1961-15/10/1963	CDU/CSU, FDP
		16/10/1963-26/10/1965	CDU/CSU, FDP
1965-1969	Ludwig Erhard-CDU	26/10/1965-30/11/1966	CDU/CSU, FDP
	Kurt Georg Kiesinger CDU	01/12/1966-20/10/1969	CDU/CSU, SPD
1969-1972	Willy Brandt SPD	21/10/1969-14/12/1972	SPD, FDP
1972-1976	Willy Brandt SPD	14/12/1972-06/05/1974	SPD, FDP
	Helmut Schmidt SPD	16/05/1974-15/11/1980	SPD, FDP
1976-1980	Helmut Schmidt SPD	15/12/1976-05/11/1980	SPD, FDP
1980-1983	Helmut Schmidt SPD	05/11/1980-01/10/1982	SPD, FDP
	Helmut Kohl CDU	01/10/1982-29/03/1983	CDU/CSU, FDP
1983-1987	Helmut Kohl CDU	29/03/1983-11/03/1987	CDU/CSU, FDP
1987-1990	Helmut Kohl CDU	11/03/1987-02/10/1990	CDU/CSU, FDP
1990-1994	Helmut Kohl CDU	02/10/1990-15/11/1994	CDU/CSU, FDP
1994-1998	Helmut Kohl CDU	15/11/1994-27/10/1998	CDU/CSU, FDP
1998-2002	Gerhard Schoerder SPD	27/10/1998-Okt. 2002	SPD, Alliance90/The Greens
2002-2006	Gerhard Schoerder SPD	Okt.2002-	SPD, Alliance90/The Greens

Sumber : Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages dalam Joachim Windt (2002;18)



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

NAMA : A P R I W A N
NPM : 99 09 10101017

Telah melaksanakan riset / survey pada
Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang :

Dinamika Partai Hijau (Bundnis 90/Die Grunen).....
dalam Kehidupan Politik di Jerman.....
(Sebuah Kajian Politik Hijau di Jerman).....
.....
.....

Untuk keperluan penyusunan Skripsi / Laporan Penelitian.
Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 25 Februari 2003



Maria Margrith Tirtasari
Maria Margrith Tirtasari
Pustakawan



Digital Repository Universitas Jember
**SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 (EX. BP 7)
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR: 70/RIS/PERPUST/II/2003/68

Menunjuk Surat Pengantar Riset Nomor : 092/J25.3.1/PL.5/2003 tanggal 30
Januari 2003 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas JEMBER.

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : APRIWAN
NRP : 99 - 1017
Jurusan : Hubungan Internasional

Telah mengadakan Praktikum Profesi di Perpustakaan BPPK Departemen Luar
Negeri Jakarta selama 2 (dua) hari untuk penyusunan skripsi dengan judul :

**“PERAN PARTAI HIJAU BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN DALAM POLITIK
PEMERINTAH JERMAN. “**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta , 27 Februari 2003
A.n. Kepala Bag. Perpust. Dok. dan
Informasi dan Komunikasi
K. Subag. Perpustakaan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 337818, 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lemlit_unej@jember.telkom.net.id

: 092/J25.3.1/PL.5/2003

30 Januari 2003

: -
: Permohonan Ijin melaksanakan
Penelitian

: Yth.

1. Sdr. Kepala Perpustakaan Pusat Univ. Jember.
2. Sdr. Dekan FISIP Universitas Jember.
3. Sdr. Pimpinan Perpustakaan CSIS, Jakarta.
4. Sdr. Pimpinan Perpustakaan PD II - LIPI, Jakarta.
- ⑤ Sdr. Pimpinan Kedutaan Republik Federal Jerman, Jakarta.
6. Sdr. Pimpinan Gothe Institute of Germany, Surabaya.
7. Sdr. Kepala Direktorat Penelitian & Pengemb. Deplu, Jakarta.

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 0410/J25.1.2/PL.5/2003 tanggal 29 Januari 2003, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : APRIWAN / 99-1017
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik /Hubungan Internasional
Alamat : Jl.Kalimantan XII / 27 Jember.
Judul Penelitian : Peran Partai Hijau Bundnis 90 / Die Grunen Dalam Politik Pemerintah Jerman.
Lokasi : Jember - Surabaya - Jakarta.
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

yang bersangkutan sudah
mendapatkan bahan informasi
di Kedutaan Jerman

Botschaft
der
Bundesrepublik Deutschland
J A K A R T A



a.n. Ketua,
Sekretaris

Dr. Didik Sulistyanto
NIP. 131 792 232

